

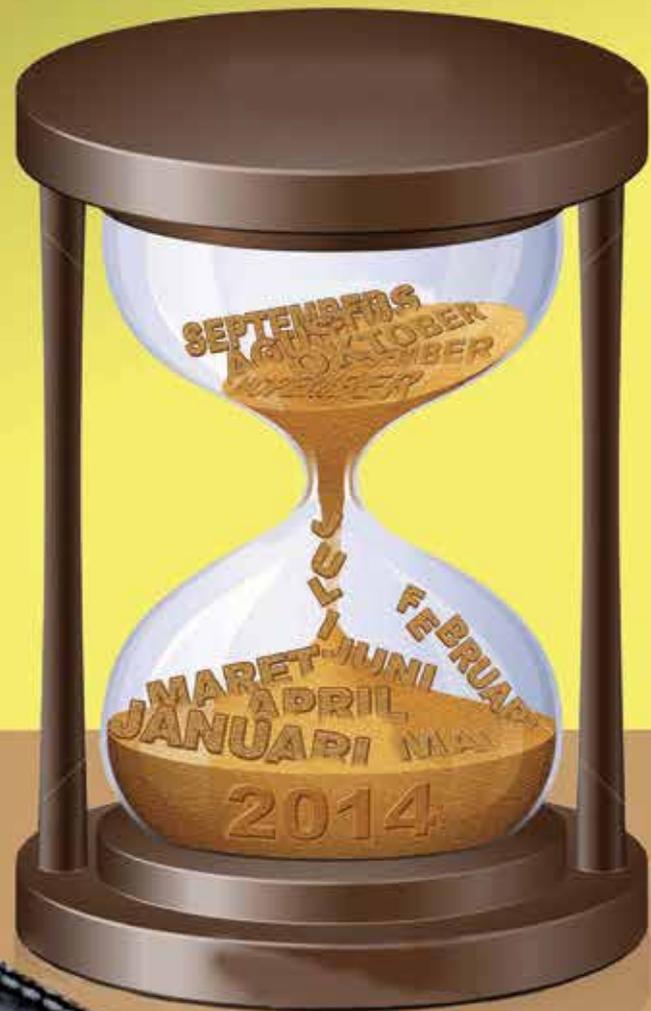
Edisi 120 TH. XLIV, 2014



Parlementaria

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KILAS BALIK DPR 2014



ISSN 1979-5912
9 771979 591288

Parlementaria

PENGAWAS UMUM:

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH:

Dr. Winantuningtyastiti, M. Si
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH:

Achmad Djuned SH, M.Hum
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

PIMPINAN PELAKSANA:

Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si.
(Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI:

Dadang Prayitna, S.IP. M.H.
(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI:

Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan),
Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR:

Sugeng Irianto, S.Sos
M. Ibnur Khalid
Iwan Armanias
Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI:

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI:

Nita Juwita, S.Sos
Supriyanto
Agung Sulistiono, SH
Rahayu Setiowati
Muhammad Husen
Sofyan Effendi

PENANGGUNGJAWAB FOTO:

Eka Hindra

FOTOGRAFER:

Rizka Arinindya
Naefuroji
M. Andri Nurdriansyah

SEKRETARIAT REDAKSI:

I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI:

Abdul Kodir, SH
Bagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI,
Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350
Fax. (021) 5715536,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com;
www.dpr.go.id/berita



PENGANTAR REDAKSI

Di penghujung tahun 2014 Parleментарia menyajikan Kalaidoskop perjalanan DPR selama tahun politik ini. Berbagai kegiatan mewarnai kinerja para wakil rakyat periode 2009-2014 yang mengakhiri masa baktinya pada akhir September, dan catatan sejarah baru bagi anggota DPR periode 2014-2019 yang dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu.

Bagi legislator yang telah mengabdikan dirinya di DPR tinta emas telah ditorehkan dengan melahirkan sejumlah undang-undang yang monumental dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Termasuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang berhasil mengawal kasus-kasus yang merugikan masyarakat dan fungsi diplomasi parlemen yang telah mensejajarkan posisi bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain serta aktif dalam pergaulan internasional.

Sementara bagi anggota baru meski agak sedikit terganggu dengan terbelahnya menjadi dua kubu, fungsi-fungsi DPR telah dijalankan dengan baik. Baik dalam rapat-rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum maupun pengawasan dan penyerapan aspirasi melalui kunjungan spesifik maupun kunjungan kerja.

Pada awal masa kerjanya, DPR sempat

diwarnai ketegangan politik yang cukup tinggi. Namun, semuanya segera berakhir dengan kesepakatan islah yang membanggakan semua pihak. Ketua DPR berharap, hal itu harus disikapi sebagai proses menuju kematangan berdemokrasi.

Damai dua kubu diperkuat dengan disetujuinya RUU Revisi MD3 yakni pasal 74 ayat 3,4,5 dan 6, dan pasal 98, disepakati untuk dihapus. Pasal ini berisi tentang hak DPR yaitu interpelasi, angket dan menyatakan pendapat yang awalnya bisa digunakan di tingkat komisi. Artinya, setelah direvisi, hak DPR hanya berlaku dalam rapat paripurna saja.

Revisi juga meliputi penambahan satu di kursi Wakil Ketua di setiap alat kelengkapan Dewan, dari semula tiga menjadi empat wakil. Kemudian, peniadaan aturan mengenai sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat negara apabila tidak melakukan rekomendasi DPR.

Kita semua berharap, ke depan tak ada lagi dikotomi KIH dan KMP. DPR akan segera bekerja sesuai mandatnya, karena keanggotaan DPR sudah lengkap. Kita juga berharap DPR lebih solid memperjuangkan aspirasi rakyat.



**Kini Majalah
dan Buletin
Parlementaria
hadir lebih dekat
dengan Anda.**

Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI
Loby Gedung Setjen DPR RI
Ruang Loby Ketua
Ruang Loby Wakil Ketua
Ruang Yankes

Terminal 1 dan 2
Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parleментарia dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parleментарia di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.

KILAS BALIK DPR 2014

Selama tahun 2014 DPR telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebagai tahun, tahun terakhir DPR periode 2009-2014 (berakhir bulan September) dan tahun pertama anggota DPR periode 2014-2019 yang dilantik pada tanggal 1 Oktober, perjalanan DPR selama tahun 2014 diwarnai aneka kegiatan politik yang cukup menyita waktu.

PROFIL FAHRI HAMZAH

| 52

Tuturnya lugas apa adanya. Pandangannya visioner, menunjukkan kapasitas intelektualnya yang mumpuni. Di tengah kesibukan bekerja, ia menerima kehadiran Parlementaria dengan penuh keramahan. Inilah Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS. Kepada Parlementaria ia berbagi cerita menarik tentang masa kecilnya di kampung dan nostalgianya menjadi aktivis kampus.



SOROTAN

| 68

KONTROVERSI KARTU JOKOWI DI MATA DPR

Belum lama ini, Pemerintah telah meluncurkan kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kehadiran ke tiga kartu tersebut, memang sudah diprediksi sebelumnya, yaitu untuk melindungi masyarakat yang rentan terkena dampak pencabutan BBM bersubsidi.



DAFTAR ISI

PROLOG

Kilas Balik DPR RI 2014 **8**

LAPORAN UTAMA

Kaleidoskop DPR RI 2009-2014 **9**

SUMBANG SARAN

Mengukur Kinerja DPR RI periode 2009-2014 **31**

ANGGARAN

Anggaran Kesehatan Belum Memenuhi Amanat Undang-Undang **37**

FOTO BERITA

41

KIAT SEHAT

Gaya Hidup Sehat **49**

PROFIL

Fahri Hamzah
Dari Aktivis Kampus ke Parlemen **52**

KUNJUNGAN KERJA

58

SOROTAN

Kontroversi Kartu Jokowi di Mata DPR **68**

LIPUTAN KHUSUS

Dialog Kunci Menuju Parlemen Asia **71**

SELEBRITIS

Muchsin Alatas & Titiek Sandhora
Pasangan Abadi yang Tak Ingin Berpolitik **74**

PERNIK

Burt Prioritaskan Sarana Prasarana DPR RI **77**

POJOK PARLE

Indahnya Perdamaian **79**

SELEBRITIS

| 74

MUCHSIN ALATAS & TITIEK SANDHORA PASANGAN ABADI YANG TAK INGIN BERPOLITIK

Sedikit sekali pasangan artis yang mampu mempertahankan mahligai pernikahannya hingga puluhan tahun lamanya. Muchsin Alatas dan Titiek Sandhora, satu dari sedikit pasangan artis yang mampu mematahkan anggapan orang akan kehidupan artis yang identik dengan kawin-ceraai.





Permohonan Mendapatkan Buletin dan Majalah Parlementaria

Perkenalkan saya adalah guru di SMKN 1 Randudongkal, Pemalang, Jawa tengah.

Berdasarkan informasi yang tertera pada majalah dan buletin parlementaria bahwa, untuk bisa mendapatkan buletin dan majalah tidak dikenai biaya. Maka dari itu saya mencoba untuk konfirmasi, bagaimana agar buletin dan ma-

jalah tersebut bisa didapatkan untuk menambah koleksi perpustakaan di sekolah kami, dengan harapan agar para siswa juga menjadi lebih dekat dengan wakil rakyatnya dengan membaca informasi kegiatan wakil rakyat baik yang ada di buletin maupun majalah parlementaria.

Besar harapan kami yang ada di daerah bisa mendapatkan informasi

dari kegiatan dewan melalui buletin dan majalah parlementaria.

Demikian konfirmasi dari saya, atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih

Kurniawan

Guru SMKN 1 Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah

Solusi Alternatif Pilkada

Berdasarkan pengalaman pada pilkada langsung yang memiliki banyak kelemahan antara lain biaya tinggi, politik uang dan menimbulkan konflik horisontal, saya mengusulkan agar dilakukan lelang jabatan ala Jokowi sehingga dapat mengadopsi dan memodifikasi pelaksanaan pilkada.

Adapun tata cara pemilihan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pencalonan, dimana masing-masing Parpol mencalonkan 4 kader terbaik;
2. Persyaratan bakal calon;

3. Materi ujian;
4. Materi pelatihan;
5. Penggajian;
6. Penghargaan;
7. Sanksi.

Bahwa dengan tata cara tersebut diharapkan akan mendapatkan Bupati/Walikota yang berdedikasi tinggi, berintegritas, cerdas, jujur dan berkepribadian baik. Selain itu dapat menghemat biaya, menghilangkan konflik horizontal dan politik uang, memperoleh pemerintahan yang bersih dan kuat serta

persaingan yang sehat.

Saya ingin menyarankan kepada warga bangsa agar bersikap dewasa dalam berpikir dan bertindak demi kemajuan bangsa dan negara, sehingga tidak ada waktu yang terbuang hanya untuk mengurus hal-hal yang tidak perlu. Semoga saran ini dapat berguna bagi bangsa dan Negara Indonesia

Azwar Hasiar

Depok, Jawa Barat

Proklamasi Ilmu Pengetahuan

Bapak Abdul Rasyad mengirim sebuah tulisan tentang Siklus Kehidupan Alam Semesta.

Pada intinya tulisan tersebut menceritakan tentang manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai derajat yang paling mulia di sisi Tuhan YME, dan mempunyai tugas untuk memperbaiki kehidupan di dunia, namun terkadang manusia tidak mengenali alam semesta yang merupakan alamnya sendiri, sehingga banyak terjadi kesalahan, baik yang menyangkut penataan pemerintahan, agama, ekonomi dan hukum maupun yang lainnya.

Bahwa pengirim sebelumnya juga menyampaikan tulisan tentang "Bagaimana

membentuk Pemerintahan yang baik dan benar serta selamat lahir dan batin" dan telah mendapatkan tanggapan berupa surat pemberitahuan yang intinya menyatakan bahwa surat pelapor telah diterima, berdasarkan surat No. DAP/05640/SETJEN-DPR RI/PL01/6/2013 tanggal 24 Juni 2014.

Pengirim berharap tulisan tersebut dapat berguna bagi kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia.

Abdul Rasyad

Jakarta Selatan, DKI Jakarta





Memajukan Wawasan Hidup Berbangsa dan Bernegara

Saya selaku keluarga perintis dan pejuang kemerdekaan RI, ingin mengajukan saran-saran yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Adapun saran-saran ini saya sampaikan agar menambah wawasan hidup dalam berbangsa dan bernegara, diantaranya sebagai berikut:

Bahwa kedaulatan dan kekuasaan berada ditangan rakyat, dengan mengedepankan demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal, sehingga dalam menentukan sesuatu diutamakan pelaksanaannya melalui musyawarah untuk mufakat bukan melalui voting.

Bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, jika dipergunakan dengan baik dan

benar akan dapat mensejahterakan rakyatnya.

Saya berharap kiranya saran-saran tersebut dapat berguna bagi perbaikan terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia.

*Ade Suwardi
Pandeglang, Banten*

Petisi Arwah (Aris Wahyudi) tentang Sistem Pemerintahan di Indonesia

Saya merasakan demokrasi Indonesia saat ini lebih memprioritaskan pemilihan kepala pemerintahan namun tidak pernah membahas sistem pemerintahan.

Bahwa sistem pemerintahan mempunyai pengaruh besar terhadap perjalanan bangsa, sehingga sistem pemerintahan yang terlalu sentralistik akan dapat membuat seorang kepala pemerintahan yang baik pun menjadi diktator.

Saya mengusulkan pergantian sistem pemerintahan dari sistem presidensial kembali lagi menjadi sistem parlementer seperti yang terjadi pada masa awal kemerdekaan.

Adapun dasar pengajuan petisi tersebut karena beberapa kekurangan dari sistem presidensial, yaitu sebagai berikut:

- Sistem Presidensial sulit untuk

melahirkan negarawan.

- Sistem presidential memberikan presiden kekuasaan diktatorial.
- Sistem Presidential beresiko memicu perang saudara.
- Sistem Presidential rawan terhadap peperangan eksekutif versus legislatif.
- Sistem Presidensial membuat pemerintah terdorong untuk bekerja secara Sistem Kebut Setahun.
- Sistem Presidential tidak sensitif terhadap aspirasi rakyat.
- Sistem Presidensial tidak bisa membedakan Kepala Pemerintahan yang baik dari yang buruk.
- Sistem Presidensial meng-kondisikan dilakukannya kebohongan publik.

- Sistem Presidensial adalah jalan demokrasi berbiaya tinggi.
- Sistem Parlementer adalah wujud dari pelaksanaan sila ke-4 Pancasila.

Demikian sudah terbukti bahwa Sistem Parlementer telah terbukti menyelamatkan negeri kita dari kehancuran sebagaimana pada saat revolusi kemerdekaan.

Saya berharap petisi tersebut dapat berguna bagi Bangsa dan Negara Indonesia, khususnya terkait dampak pelaksanaan Pilpres 2014 yang memicu timbulnya dikotomi "Pemerintahan Oposisi", sehingga diharapkan masalah ini bisa diredakan

*Aris Wahyudi
Cianjur, Jawa Barat.*

Kecewa Dengan Pelayanan PT Telkom

Ditengah serbuan dari provider mobile, Telkom seharusnya lebih meningkatkan pelayanan khususnya untuk pelanggan telpon rumah. Namun ini sebaliknya. Sudah lebih dari tiga kali saya mengadakan rusaknya telpon rumah saya di Kampung Cibitung, Padurenan Bekasi ke no telp 147, tapi sampai sekarang, Rabu (17/12) jangankan teratasi, teknisi dari PT Telkom pun tidak kunjung datang.

Dengan adanya surat ini, saya berharap perhatian dari PT Telkom untuk segera menindaklanjuti pengaduan saya ini. Jangan sampai PT Telkom sebagai satu-satunya BUMN semakin terpuruk dengan "tingkah" atau kinerjanya sendiri. Terimakasih

*RS- Bekasi
(No telp ada pada Redaksi Majalah Parlementaria)*

KILAS BALIK DPR 2014

Selama tahun 2014 DPR telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebagai tahun terakhir DPR periode 2009-2014 (berakhir bulan September) dan tahun pertama anggota DPR periode 2014-2019 yang dilantik pada tanggal 1 Oktober, perjalanan DPR selama tahun 2014 diwarnai aneka kegiatan politik yang cukup menyita waktu. Khususnya di tahun politik 2014, ada dua even pemilu yakni pemilu legislatif tanggal 9 April dan pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli, kegiatan para anggota Dewan banyak diwarnai dengan persiapan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Meski demikian, di akhir periode pengabdianannya, Dewan tetap semangat menghasilkan sejumlah Undang-undang yang monumental diantaranya RUU Kelautan, RUU Perlindungan Anak dan RUU Kesehatan Jiwa. Selain itu RUU APBN 2015, RUU Pengelolaan Keuangan Haji dan RUU Perkebunan.

Di bidang pengawasan aktivitas para legislator juga tak kalah padat seperti Timwas Kasus Bank Century berhasil menyusun rekomendasi agar DPR periode selanjutnya tetap bisa mengawal kasus talangan Bank Century terkait uang negara sebesar

Rp 6,7 triliun tersebut. Rekomendasi Timwas DPR tetap mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tersangka lain sebab hingga kini baru BM yang sudah di vonis di pengadilan. Sementara dalam berbagai kesempatan termasuk raker Timwas dengan KPK dinyatakan secara tegas bahwa tersangka kasus Century BM dan kawan-kawan.

Dengan segala dinamikanya, perjalanan DPR selama tahun 2014 khususnya untuk DPR periode 2009-2014 telah menorehkan catatan penting bagi perjalanan sejarah bangsa, meski tetap tidak sepi dari kritikan dan sorotan masyarakat.

Sedangkan untuk anggota DPR baru yang dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu, hingga akhir masa persidangan II tahun 2014-2015 tanggal 5 Desember 2014 ternyata kinerjanya tidak semulus pelantikannya. Beberapa jam setelah dilantik pada pagi tanggal 1 Oktober, malam hingga pagi berdebat soal pemilihan Pimpinan DPR. DPR terbelah menjadi dua koalisi, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Sebagaimana diakui Ketua DPR Setya Novanto, di awal masa kerjanya, DPR sempat diwarnai ketegangan politik yang cukup

tinggi. Namun, semuanya segera berakhir dengan kesepakatan islah yang membanggakan semua pihak. "Hal ini harus disikapi sebagai proses menuju kematangan berdemokrasi," ungkapnya.

Pada Senin 17 Nopember lalu menjadi hari bersejarah bagi DPR, karena dua kubu yang selama ini berseteru dipertemukan kembali untuk menandatangani kesepakatan penting menyangkut pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan upaya mengubah UU No.17/2014 tentang MD3. Delegasi KIH diwakili Pramono Anung dan Oilly Dondokambey. Sementara KMP diwakili Hatta Rajasa dan Idrus Marham.

Semangat yang diusung adalah DPR yang solid dan bersatu demi mewujudkan DPR yang modern dengan indikator parlemen yang mudah diakses oleh publik, parlemen yang berbasis informasi dan teknologi, serta parlemen yang berperan dan berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Kini, DPR lebih kondusif dalam mengemban amanah konstitusi. Kesadaran bernegara, lanjut Novanto, sudah menjadi komitmen bersama para anggota DPR untuk mewujudkan DPR yang modern di masa depan. (mp)

KALEIDOSKOP PIMPINAN DPR RI



Marzuki Alie menerima Dubes Korea

Korea Pandang Indonesia Sebagai Mitra Strategis

Akhir Januari 2014, Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young Sun. Kepada Ketua DPR, Kim kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra yang sangat strategis untuk berinvestasi. Marzuki menyambut baik sikap Korsel tersebut. Bahkan, sang Dubes berharap, Indonesia menyederhanakan izin investasi dalam layanan satu atap untuk kemudahan kegiatan investasi.



Marzuki Alie terima Dirut BPJS Fahmi Idris

Ketua DPR Terima Keluhan Masyarakat Soal JKN

Masa transisi pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyisakan banyak masalah di awal pemberlakuannya. Di Jakarta, masyarakat miskin yang dahulu mudah berobat gratis dengan menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS), tak mudah lagi berobat ketika kartu JKN diberlakukan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pertengahan Januari lalu, Ketua DPR RI Marzuki Alie, mempertemukan rakyat miskin Jakarta dengan Kepala

BPJS Kesehatan Fahmi Idris di DPR.

Perubahan akses kesehatan dari KJS ke JKN, membuat rumah sakit di Jakarta kebanjiran keluhan rakyat miskin yang tak bisa langsung berobat. Masa-masa transisi pemberlakuan JKN dibicarakan secara tuntas oleh Ketua DPR. Terobosan penyelesaian pun dilakukan dengan tatap muka bersama warga miskin. Mereka belum memiliki kartu JKN dari BPJS Kesehatan.

DPR Fasilitas Pertemuan Warga Gunung Kerinci

Gunung Kerinci di Jambi sudah mengancam warga di kaki gunung tersebut. Kelak bila gunung ini benar-benar meletus, warga di kaki gunung terisolir, tak punya akses jalan evakuasi untuk menyelamatkan diri. Untuk membuka jalur evakuasi harus membuka kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) milik Kementerian Kehutanan. Harus ada prosedur izin yang berbelit untuk membuka TNKS. Sementara ancaman ledakan Gunung Kerinci, bisa terjadi kapan saja tanpa pemberitahuan.

Untuk itulah, pertengahan Febru-

ari 2014 lalu, Marzuki mempertemukan Bupati Kerinci, Masyarakat Kerinci, dan Kemenhut. Ketika itu, Marzuki berharap, Kemenhut sebagai pemilik otoritas TNKS, mengeluarkan izin pembukaan hutan untuk membuat jalur evakuasi warga bila terjadi bencana letusan Gunung Kerinci. Akhirnya, Kemenhut pun memberi izin resmi pembukaan hutan dan disambut gembira oleh Bupati dan warga Kerinci.

Pemilu Berkualitas Jadi Harapan Masyarakat

Para Pimpinan Lembaga-lembaga Negara bertemu di kompleks parlemen pada Maret lalu, membincang momentum Pemilu 2014. Para Pimpinan Lembaga Negara termasuk Ketua DPR RI Marzuki Alie yang hadir saat itu, sepakat bahwa pemilu harus berkualitas seperti diharapkan masyarakat Indonesia.

Dalam pertemuan konsultasi tersebut, masing-masing Pimpinan Lembaga Negara menyampaikan pandangannya sesuai kapasitas lembaga yang dipimpinnya. Yang dibicarakan tentu menyangkut isu-isu aktual nasional termasuk soal pe-



Presiden SBY, Wapres Boediono, dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara gelar pertemuan di DPR

milu. "Semua bicara sesuai dengan pandangannya masing-masing. Saya tadi sampaikan bahwa pemilu yang demokratis dan berkualitas itu jadi harapan masyarakat dan kita semua," jelas Marzuki.

Pertemuan tersebut menghasilkan 18 poin kesimpulan yang dibacakan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto. Semuanya menyangkut penyelenggaraan Pemilu 2014. Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan MPR RI, Ketua DPR RI, Pimpinan DPD, Ketua MK, Ketua MA, Ketua KY, dan Ketua BPK. Hadir pula sejumlah menteri mendampingi Presiden.

Masyarakat Harus Ikut Ciptakan Pemilu Damai

Juli 2014, sebelum Pilpres dihelat, Ketua DPR RI Marzuki Alie menggelar pertemuan dengan para delegasi civitas akademika dari 14 Perguruan Tinggi di DPR. *Head to head* dua pasang capres dan cawapres sempat mengawatirkan berbagai kalangan. Apalagi, ketika itu, media massa nasional ikut larut dalam pertarungan dua kubu capres.

Ketua DPR RI Marzuki Alie megembangkan agar semua elemen masyarakat berpartisipasi mengawasi pelaksanaan pilpres 2014. "Semua ele-



Ketua DPR Setya Novanto kunjungi Polres Jaksel

guran Tinggi itu sebenarnya digagas *Central for Election and Political Party (CEPP)* Universitas Indonesia.

Hadir mendampingi Marzuki, Agun Gunanjar Sudarsa Ketua Komisi II, Arif Wibowo Wakil Ketua Komisi II, dan Azhar Romli Anggota Komisi II. Pertemuan tersebut mengajak semua civitas akademika untuk peduli menciptakan pemilu yang menyejukkan di tengah masyarakat. Pro aktif perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam ikut merumuskan

dini hari, lima nama mengisi kursi Pimpinan DPR. Setya Novanto dari F-PG terpilih sebagai Ketua DPR menggantikan Ketua lama Marzuki Alie. Di kursi Wakil Ketua ada Fahri Hamzah (F-PKS), Fadli Zon (F-Ge-rindra), Agus Hermanto (F-PD), dan Taufik Kurniawan (F-PAN).

Kegiatan Pimpinan Baru

Setelah resmi dilantik sebagai Pimpinan DPR yang baru, berbagai kegiatan langsung dilakukan, termasuk menerima kunjungan kehormatan para Dubes Negara-negara Sahabat. Untuk membangun kerja sama dengan insan media, Pimpinan DPR yang dikomandoi Setya Novanto mengunjungi media-media nasional, di antaranya Redaksi Kompas dan MNC Grup. Bahkan, sebelumnya para Pemimpin Redaksi Media Massa juga sudah diundang ke DPR.

Ketua DPR Setya Novanto sempat mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menemui dua mahasiswa aktivis HMI yang telah memeras dirinya. Dia bahkan memaafkan keduanya dan menandatangani surat jaminan penangguhan penahanan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mendatangi anak seorang tukang sate di Polda Metro Jaya yang dituduh menghina Presiden Jokowi lewat twitternya. (mh) foto: iwan armanias, naefurodjie, andri/parle/hr



Pimpinan DPR RI kunjungi MNC Grup

men masyarakat agar berpartisipasi memberikan kontribusi untuk mengawasi dan mengawal pilpres 9 Juli bisa berlangsung secara damai dan aman. Itu yang kita harapkan," kata Marzuki. Pertemuan dengan 14 Per-

formulasi kampanye damai.

Pimpinan DPR Baru Terbentuk

Oktober 2014, pimpinan DPR yang baru terbentuk. Setelah melalui Rapat Paripurna maraton hingga

LANJUTKAN REVISI UU PENYIARAN DAN UU TELEKOMUNIKASI



Kisruh yang terjadi di manajemen TVRI menyebabkan Komisi I DPR terpaksa membintangi atau menahan anggaran RKA-KL TVRI tahun anggaran 2014. Komisi I menduga terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh manajemen stasiun televisi tertua di Indonesia tersebut dalam penggunaannya.



Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menyatakan bahwa Komisi I hanya menahan belanja modal. Dengan kejadian ini TVRI harus membenahi manajemennya, artinya TVRI tidak bisa membuat program baru, namun untuk belanja gaji, listrik dan sebagainya tidak dibintangi

atau diblokir.

Komisi I kata Tantowi, sedang menindaklanjuti hal ini, bahkan hal ini bisa mengarah ketindakan pelanggaran hukum. Dan apabila terbukti melakukan penyelewengan dana, dimana dana tersebut adalah dana APBN, yang berarti itu notabene adalah dana rakyat, maka implikasinya adalah hukum.

Ketua Komisi I DPR Machfud Siddiq mengakui masih ada PR yang belum terselesaikan dan ini menjadi prioritas legislasi yaitu revisi UU Penyiaran yang didalamnya termasuk pengaturan mengenai LPP RRI dan TVRI. Masalah itu belum diselesaikan karena belum ada kesepakatan pandangan politik legislasi antara DPR dengan Pemerintah. DPR periode sekarang ini diharapkan ada kesepakatan politik sehingga revisi UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi bisa dilanjutkan.

Dengan merebaknya industri penyiaran, bukan hanya lembaga-lembaga penyiaran swasta nasional tetapi juga mulai masuknya lembaga penyiaran asing yang menjadi konsen Komisi I. Secara umum isi siaran di Indonesia belum secara sungguh-sungguh dan terarah bisa mendorong pencapaian kepenti-



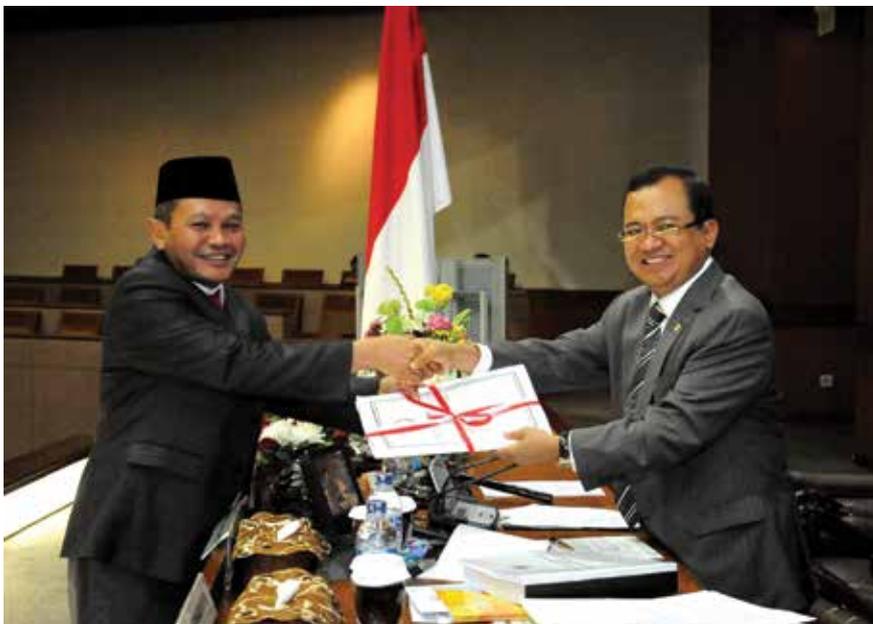
Ketua Komisi I DPR Machfud Siddiq

ngan-kepentingan nasional diantaranya pembentukan karakter bangsa serta pencerdasan masyarakat.

Ketua Komisi I DPR Machfudz Siddiq mengemukakan, masih banyak siaran TV yang terjebak pragmatisme sehingga siaran yang ratingnya tinggi dan dapat iklan besar tetapi dari sisi kualitasnya rendah. "Masih diperlukan regulasi serta peningkatan kualitas siaran serta membutuhkan komitmen bersama seluruh penyelenggara lembaga penyiaran," ujarnya. (spy) foto: andri/parle/hr

KALEIDOSKOP KOMISI II

UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN; TONGGAK TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERKUALITAS



Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu saat menyerahkan Laporan Komisi II kepada Pimpinan Rapat Paripurna DPR Priyo Budi Santoso

Salah satu hasil kerja Komisi II sepanjang tahun 2014 yang cukup menarik adalah RUU Administrasi Pemerintahan yang disetujui Rapat Paripurna DPR pada akhir September 2014. "RUU tentang Administrasi Pemerintahan ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas. Terutama penggunaan wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu.

Dengan disahkannya RUU tentang Administrasi Pemerintahan diharapkan dapat menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan atau pejabat pemerin-

tahan. "Kita juga ingin memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparaturnya pemerintahan, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat," tambahnya.

Selain pengesahan undang-undang, Komisi II DPR sepanjang 2014 juga menelurkan beberapa pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Pembentukan tiga DOB meliputi Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan di Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Buton Tengah di Sulawesi Tenggara. Selain itu, ada pembentukan satu DOB yang belum bisa dilanjutkan pembahasannya. "Terhadap satu RUU Pembentukan Kota Raha di Sulawesi Tenggara, dimohonkan dalam Sidang Paripurna DPR agar disepakati dan diambil kesepakatan untuk tidak dilanjutkan pembahasannya," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, pembahasan DOB Kota Raha tidak dapat dilanjutkan karena mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan, kemampuan ekonomi dan infrastruktur daerah.

Lain halnya dengan RUU Pertanahan, meski RUU Pertanahan masuk dalam Prolegnas sejak 2012, sampai saat ini RUU itu masih belum dilanjutkan pembahasannya. Dalam pembahasan di tingkat Panja, pemerintah mengusulkan sebanyak 776 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Komisi II DPR yang membidangi pertanahan itu, prinsipnya berkeinginan melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanahan. Dalam pembahasan di tingkat Panja terakhir, setidaknya sudah menyelesaikan 245 DIM.

Namun masih banyak DIM bersifat substansi yang belum dibahas dan belum mendapat persetujuan lantaran memerlukan waktu yang panjang, pemikiran mendalam, kecermatan, dan penuh kehati-hatian. "Maka dalam rapat Panja RUU Pertanahan pada tanggal 27 September 2014, pemerintah menyatakan tidak sanggup dan mengusulkan untuk tidak dilanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanahan pada tahap pembicaraan tingkat II," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja.

DPR pun akan menindaklanjuti dengan merujuk pada Pasal 10 Peraturan DPR No.3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang. Menurutnya, sembilan fraksi dan pemerintah menyepakati penarikan RUU tersebut.

"Pemerintah dan Komisi II telah menyepakati untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanahan agar menghasilkan sebuah regulasi bidang pertanahan yang komprehensif dan mendorong



Khatibul Umam Wiranu menyerahkan laporan Komisi II kepada Menteri PAN dan RB di Paripurna DPR RI

agar RUU tentang Pertanahan dapat masuk dalam Prlegnas tahun 2015-2019 dan menjadi RUU prioritas tahun 2015," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dari sisi fungsi pengawasan, persoalan tenaga honorer 2 (K2) kerap kali menjadi *concern* Komisi II DPR. Bahkan anggota Komisi II DPR Gamari Sutrisno mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN dan RB harus segera menuntaskan persoalan tenaga honorer Kategori 2 (K2).

"Masalah ini sudah sangat berlarut-larut Pak Menteri, dan saya tidak ingin mendiskusikan terus menerus, oleh sebab itu saya sebagai anggota Komisi II DPR mengusulkan kepada Pak Menteri agar persoalan ini segera tuntas," kata Gamari saat Komisi II DPR Raker dengan MenPan dan RB Azwar Abubakar, di Jakarta, Senin, (30/6).

Ia menambahkan, selain itu perlu ada batas waktu yang jelas kapan tuntasnya, karena ia khawatir kedepannya saat Pemerintahan dan DPR yang baru nanti persoalan ini akan menjadi terbengkalai.

"Oleh sebab itu karena saya melihat ada peluang untuk segera

menyelesaiannya, maka peluang inilah yang kami harap bisa dimanfaatkan oleh MenPan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer K2 ini, terutama sesuai dengan yang sudah diamankan dalam PP 56 Tahun 2012 sebagai revisi dari PP 48 Tahun 2005," tegas politis PKS ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan bahwa pemerintah tidak ada niat untuk memperlambat, "Saya satu-satunya Menteri yang membuat program 100 hari terakhir, salah satunya masalah tenaga honorer ini selesai, dan 'gak' ada niat memperlambat, namun memang manajemennya tidak mudah," tegasnya.

Raker dengan MenPan dan RB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar kali ini ditutup dengan menghasilkan kesimpulan, Komisi II DPR meminta kepada Kementerian PAN dan RB dan BKN untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer khususnya yang termasuk dalam Kategori II dengan membuat batas waktu agenda penyelesaiannya secara konkret dan tuntas sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No 56 Tahun 2012.

Komisi II DPR mengapresiasi Kementerian PAN dan RB dalam penyelenggaraan proses seleksi KASN dan Pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) serta Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) yang telah berjalan dan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Di bidang legislasi yang paling menonjol adalah pada saat Paripurna DPR, Jumat (26/9) mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU yang menyetujui opsi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) melalui DPRD. Keputusan tersebut, dilakukan setelah Rapat Paripurna DPR melakukan mekanisme pemungutan suara atau *voting*.

Hasilnya sebanyak 226 anggota DPR menyatakan Pilkada sebaiknya dilakukan melalui DPRD, dan 135 anggota dewan memilih mendukung Pilkada langsung. Namun karena banyaknya protes dari berbagai kalangan, akhirnya Presiden SBY mengeluarkan Perppu Pilkada yang baru akan dibahas DPR pada masa persidangan II tahun 2014/2015 pada Januari yang akan datang. (nt)

foto: iwan armanias/parle/hr

KITA TERUS BEKERJA



Pimpinan Komisi III setelah Sidang Penetapan Pimpinan Komisi III

Tok. Palu diketuktn pimpinan sidang Aziz Syamsudin, suaranya nyaring. Itu bisa jadi menandakan kebulatan hati untuk meneruskan rapat walaupun mitra kerja yang diundang Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly belum jua datang. "Menkumham sudah kita panggil dua kali, nanti ada pemanggilan ketiga, kalau masih tidak datang kita gunakan mekanisme lain sesuai UU no.17 tahun 2014 tentang MD3, kita terus bekerja," tegas Aziz yang juga Ketua Komisi III DPR itu.

Itulah warna persidangan di Komisi III akhir November lalu ketika nuansa tarik menarik diantara Koalisi Merah Putih dan Koalisis Indonesia Hebat masih berlangsung. Walaupun tertatih-tatih akibat sejumlah mitra kerja tidak datang memenuhi undangan rapat tetapi pada prinsipnya komisi yang membidangi bidang hukum ini terus dapat bekerja. Setidaknya saat itu rapat dengan Panitia Pemilihan Calon Pimpinan KPK masih terus berjalan.

Itu pula yang ditekankan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menetapkan empat Pimpinan Komisi III yang akan

bekerja setelah mendapat mandat rakyat bekerja selama lima tahun sampai 2019 nanti. "Kita terus mencoba untuk melakukan musyawarah mufakat namun belum menemukan titik temu. Tadi rapat sudah kuorum, secara anggota dan fraksi jadi legal tidak masalah sedikitpun," tandasnya. Ia menyerahkan palu kepada ketua terpilih yang didampingi tiga wakil ketua yaitu, Desmon Junaidi Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra, Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dan Mulfahri Harahap dari Fraksi PAN.

Legislasi dan Anggaran

Ada tekad dari anggota DPR hasil Pemilu 2014 untuk menyelesaikan problema di bidang legislasi lebih baik dibanding periode sebelumnya. Menurut Aziz tidak tercapainya target prolegnas faktornya banyak, bisa dari pemerintah maupun dewan. Ia menyebut target realistis penyelesaian UU adalah 3-4 bulan untuk 1 RUU. Kalau ada 11 komisi, itu berarti target ideal adalah 33 RUU setiap tahunnya ditambah hasil kerja Panja dan



Komisi III usai rapat dengan mitra kerja di Medan, Sumut

Pansus.

Bagi Martin Hutabarat dari FP Gerindra revisi UU KUHP dan KUHP mesti menjadi bagian dari target legislasi yang harus diselesaikan. "Ini kehormatan bagi saya bisa melaksanakan tugas kembali di Komisi III. Satu yang jadi perhatian saya adalah RUU KUHP dan KUHP, ini harus bisa kita selesaikan pada periode ini," katanya saat dihubungi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Di bidang anggaran Komisi III masih memberikan perhatian pada penegakan hukum dengan menyepakati anggaran kepolisian pada APBN 2015 sebesar Rp47,566 triliun. Hal yang menarik perhatian publik adalah disetujuinya anggaran bagi pengadaan anggota Polwan yang ingin mengenakan jilbab. "Kalau dulu pernah dipermasalahkan soal anggaran yang tidak ada, sekarang pada RAPBN 2015 sudah kita sepakati. Sekarang bola ditangan Mabes Polri. Kita tunggu realisasi penggunaan jilbab melalui SK Peraturan Kapolri," kata Wakil Ketua Komisi III periode 2009-2014 Al Muzammil Yusuf saat memimpin rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, awal Juli lalu.

Pengawasan

Wakil Ketua Komisi III Desmon J. Mahesa menilai pilihan Presiden Jokowi terhadap politisi Partai Nasional Demokrat M Prasetyo menunjukkan adanya bargaining. Ada indikasi partai politik yang berada di pemerintahan ingin mengamankan posisi masing-masing. "Itu yang jadi pertanyaan saya, Presiden Jokowi memilih seorang Jaksa Agung dalam konteks penegakan hukum atau pengamanan posisi-posisi politik," pungkas politisi

Fraksi Partai Gerindra ini.

Anggota Komisi III DPR RI Almuzammil Yusuf menyatakan prihatin atas terjadinya konflik antara prajurit TNI Batalyon Yonif 134 dengan Brigade Mobil (Brimob) Polri di Batam, Kepulauan Riau. "Saya sangat prihatin, sejak 2005 hingga saat ini telah terjadi lebih dari 30 kali bentrok TNI-Polri yang menewaskan puluhan orang dari kedua pihak," katanya. Politisi FPKS ini menilai perlu kebijakan integral agar kejadian serupa tidak meluas dan terulang kembali.

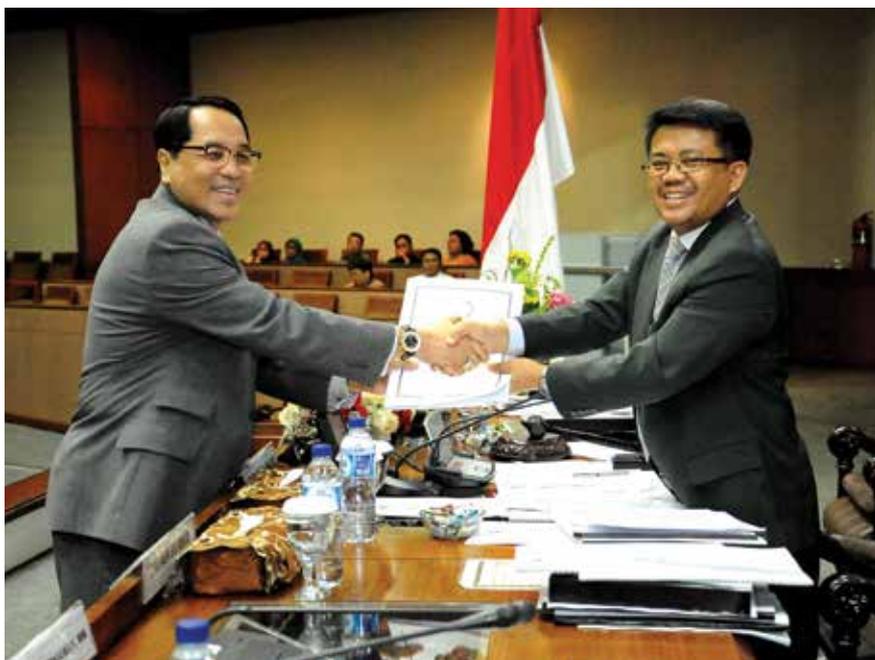
Penanganan kasus narkoba di wilayah Polda Kalimantan Barat khususnya yang melibatkan perwira menengah AKBP IED menjadi perhatian Komisi III. Akhir September Komisi Hukum khusus berkunjung ke provinsi ini melakukan pemantauan penanganan kasus yang mendapat sorotan publik ini.

Anggota Komisi III dari FPG Bambang Soesatyo memberikan apresiasi kepada Polri karena pengamanan Pemilu 2014 cukup baik dan kali ini dilaksanakan dengan anggaran yang minim.

Sementara Nasir Djamil (FPKS) memberikan catatan khusus terkait pengamanan Pemilu Legislatif lalu. Ia menilai ada *mindset* yang berkembang ditengah petugas di lapangan yang hanya fokus asal jangan bentrok. "Saya melihat ada *mindset* dikalangan petugas yang penting jangan berantem, persoalan suara dikasi siapa itu urusan kalianlah. Itu keliru. Ada perampok demokrasi yang berusaha merampas suara rakyat untuk kepentingan mereka, ini juga harus jadi perhatian," tekannya. (iky) foto: iwan armanias, andri/parle/hr

KALEIDOSKOP KOMISI IV

UNTUK PERTAMA KALINYA INDONESIA PUNYA UU KELAUTAN



Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo (F-PG) menyerahkan laporan pembahasan RUU tentang Kelautan kepada Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman (F-PKS)

Rancangan Undang-undang (RUU) Kelautan akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang (UU) dalam Sidang Paripurna DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, Senin 29 September 2014. Dengan begitu, Indonesia pertama kalinya memiliki UU Kelautan setelah 69 tahun merdeka. UU ini mempertegas Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara maritim.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo, menjelaskan RUU Kelautan terdiri atas 13 Bab dan 72 Pasal mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Disamping itu mengatur pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, dan tata kelola serta kelembagaan.

UU tentang Kelautan bertujuan mendayagunakan sumber daya kelautan dan kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara. RUU ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia, memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang,

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Laut sebagai penghubung pulau-pulau yang berada di dalamnya memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang

juang serta media pemersatu dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut, dan menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, serta memiliki lebih dari 17.500 pulau. Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam peredaran, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan.

Di samping itu, potensi sumber daya alam di wilayah laut, baik yang hayati ataupun non hayati, sangat melimpah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut termasuk sumber daya yang diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sangat logis jika pemanfaatan laut dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegas politisi dari dapil Jawa Tengah III.

Lebih lanjut, Pemerintah, diminta untuk segera melakukan sosialisasi setelah RUU ini diundangkan. Selain itu, agar peraturan turunan yang diamanatkan dalam RUU ini, yaitu 6 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden segera diterbitkan.

(as) foto: iwan armanias/parle/hr

INFRASTRUKTUR MASIH JADI PERSOALAN



Persoalan infrastruktur dan *backlog* anggaran pada tahun 2014 masih menjadi persoalan krusial pemerintah di masa mendatang. Selain itu persoalan Legislasi yang belum tuntas harus segera diselesaikan pada era Jokowi nanti.

"Permasalahan bidang infrastruktur dan perhubungan yang perlu kita carikan solusinya antara lain beban anggaran untuk infrastruktur, khususnya dibidang kemaritiman yang masih minim, termasuk beberapa UU yang harus segera diselesaikan seperti UU Sistem Transportasi Nasional, UU Jasa Konstruksi dan UU Arsitektur," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia kepada Parlemenaria baru-baru ini.

Seperti diketahui, untuk infrastruktur ke-PU-an, kebutuhan anggaran pada tahun 2015 mencapai Rp123,29 triliun. Namun, pagu yang tersedia sekitar Rp74,2 triliun sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp49 triliun. *Baglock* anggaran untuk sektor perhubungan juga terbilang besar mencapai Rp26 triliun lebih pada tahun 2015, dimana kebutuhan anggaran di bidang perhubungan mencapai Rp70 triliun

lebih, sementara pagu yang tersedia hanya sebesar Rp44,6 triliun.

Sementara, data yang dipaparkan Indef, perkembangan infrastruktur di Indonesia relatif lambat. *The Global Competitiveness Report* 2013-2014 menyebut infrastruktur Indonesia menempati peringkat 61



Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia

dari 144 negara, masih di bawah Thailand yang berada di posisi 47 dan Malaysia di peringkat ke-29. Panjang jalan raya di Indonesia hanya 502 km tidak sebanding dengan luas daratannya yang mencapai 1.919.443 km. Sehingga ini tidak

mampu menunjang aktivitas ekonomi secara optimal, begitu juga dengan infrastruktur udara dan laut.

"Tahun 2015 pasar bebas Asean mulai berlaku. Jika kita ingin tetap bisa bersaing, Indonesia harus berbenah, khususnya untuk infrastruktur mengingat daya saing infrastruktur kita masih rendah. Begitu juga dengan SDM-nya harus kita persiapkan dengan baik. Karena itu, tak hanya, perlu upaya-upaya percepatan di bidang infrastruktur yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK ke depan, tapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM kita agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," kata Yudi.

Kita akui berdasarkan *The Global Competitiveness Report* 2012-2013 oleh *World Economic Forum*, daya saing Indonesia berada di peringkat 50 dari 144 negara yang dinilai. Posisi ini menurun dua tingkat dibandingkan 2011-2012 dan enam tingkat dibanding 2010-2011. Infrastruktur berada di posisi ke tiga sebagai masalah utama yang mengganggu kemudahan berbisnis (*doing business*). Birokrasi yang tak efisien dan korupsi masih menjadi dua penghambat utama.

Dalam survei WEF kategori infrastruktur yang mengalami peningkatan dari peringkat 91 (2012) ke 82 (2013). Secara spesifik, infrastruktur jalan meningkat dari peringkat 90 (2012) ke 78 (2013), perkeretaapian (51 ke 44), pelabuhan laut (104 ke 89), bandar udara (89 ke 68) dan elektrifikasi (98 ke 89). Namun, infrastruktur Indonesia yang bercokol di peringkat 82 masih kalah dibanding Cina (74), Thailand (61) dan Malaysia (25). Indonesia pun tertinggal jauh dari negeri jiran lainnya yakni Singapura yang berada di peringkat kelima. (Sugeng) foto: rizka/parle/hr

KALEIDOSKOP KOMISI VI

UU PERINDUSTRIAN DISAHKAN

Awal tahun 2014, Komisi VI menghasilkan produk UU monumental dengan disahkannya UU Perindustrian menggantikan produk UU lama No.5/1984. UU ini berparadigma baru dengan menjadikan sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Untuk itu, sektor industri yang didorong ke depan adalah industri yang memiliki kedalaman struktur, yaitu yang menguasai industri hulu hingga hilir dan berdaya saing tinggi.

Ketua Komisi VI DPR RI waktu itu, Airlangga Hartarto (F-PG), menyampaikan, industri yang visible dibangun di Indonesia adalah yang memiliki basis bahan baku dalam negeri, basis tenaga kerja, dan basis energi. Dalam rumusan UU Perindustrian itu, dirumuskan tentang pembangunan sentra-sentra industri daerah. Kelak, ada wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil menengah.

Industri hijau juga mendapat perhatian serius dalam UU ini. Industri hijau adalah yang produknya ramah lingkungan dengan meminimalisir limbah atau memanfaatkan bahan daur ulang. Ada apresiasi yang bisa diberikan untuk para pelaku pengembangan industri hijau ini, yaitu berupa benefit fiskal tertentu. Produk dalam negeri juga mendapat perhatian lebih dalam UU Perindustrian baru ini. Harus ada keberpihakan pada produk dalam negeri yang digariskan dalam bentuk TKDN (tingkat kandungan dalam negeri).

UU Perdagangan Disahkan

Satu lagi UU monumental yang diinisiasi Komisi VI DPR disahkan. Akhir Januari 2014, UU ini menjadi pelipur lara di tengah kekosongan aturan hukum yang memadai di sektor perdagangan. Pimpinan Komisi VI dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan waktu itu, sampai menggelar jumpa pers di *Press Room* DPR untuk menyambut kehadiran UU ini.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto saat itu, menegaskan, UU ini antiliberalisme. UU Perdagangan yang baru tersebut menggantikan UU produk kolonial Belanda yang sejak tahun 1934 diberlakukan di Tanah Air. Sebelum UU ini disahkan, aturan yang digunakan adalah UU Penyaluran Perusahaan 1934 yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Bedrijfsreglementerings Ordonnatie 1934*.

Hal krusial yang diatur dalam UU Perdagangan baru ini adalah perlindungan komoditas penting dan pokok yang menjadi hajat hidup rakyat Indonesia. Ini untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga



Pimpinan Komisi VI menggelar jumpa pers Januari 2014. UU Perindustrian disahkan

komoditas penting, seperti pangan, pupuk, semen, dan lain-lain. UU ini sekaligus juga melengkapi produk UU lainnya, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Kepabeanaan, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, dan lain-lain.

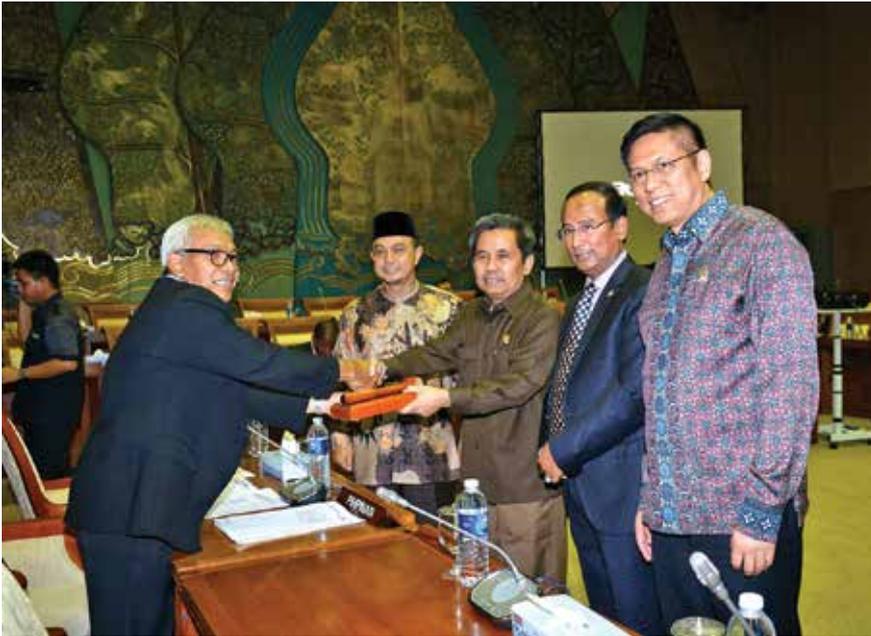
Komisi VI Bentuk Panja Merpati

Menyusul kinerja PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang terus memburuk, Komisi VI DPR akhirnya membentuk Panitia Kerja (Panja) pada pertengahan 2014. Konflik internal antara manajemen dan para karyawan di maskapai plat merah itu, terus berkepanjangan. Komisi VI pun telah mengeluarkan beberapa rekomendasi. Banyak penyimpangan yang terungkap di PT. MNA setelah Panja Komisi VI bekerja.

Salah satu rekomendasi tersebut di antaranya, meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan PT. MNA, termasuk mengaudit pengadaan pesawat MA-60 yang terindikasi korupsi. Rekomendasi lainnya, Merpati diminta memberhentikan segera direksi PT MNA dan menggantinya dengan yang baru. Selanjutnya, Merpati juga diminta mengajukan pola restrukturisasi utang jangka panjang sekaligus menyelesaikan utang kepada karyawan Merpati.

Salah kelola menjadi sumber kerugian PT. MNA. Akibatnya, negara ikut menanggung kerugian dengan menekan beban keuangan negara. Sejak tahun 1998, Merpati sudah mulai merugi. Total utang per Januari 2014 saja sebesar Rp7,647 triliun. Panja Komisi VI menilai, Menteri BUMN yang waktu itu dijabat Dahlan Iskan, tidak menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap PT. MNA. (mh) foto: rizka/parle/hr

PERSOALAN SUBSIDI BBM MENCUAT



Penyerahan palu Pimpinan Komisi VII

Pro-Kontra kenaikan Harga BBM Bersubsidi diprediksi akan semakin menguat di DPR RI, bahkan akan memanas diiringi interpelasi anggota Dewan terhadap kebijakan itu. Saat ini memang harga minyak kembali tenggelam ke level terendah dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan harga tertinggi sepanjang 2014, harga minyak sekarang hampir separuhnya saja. Permintaan minyak pun diperkirakan bakal anjlok ke level yang belum pernah terjadi dalam satu dekade terakhir. Hal itu nantinya yang akan menjadi isu hangat dikalangan anggota Dewan dan dipertanyakan kepada pemerintah alasan pencabutan subsidi dengan menaikkan harga keekonomian BBM premium dan solar dimana harga minyak berada di posisi terendah saat ini.

Dari sisi anggaran, Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha, saat ini DPR RI tengah mempersiapkan *baseline* anggaran pemerintah



Wakil Ketua Komisi VII Satya W Yudha

ke depan. "Perlu dipikirkan bagaimana pemberian bantalan apabila terjadi perubahan besaran subsidi kita, yaitu jaringan pengamanan sosial, target *lifting*, pergerakan ICP (Minyak Mentah Indonesia), besaran subsidi BBM dan listrik," ujarnya.

Dia menambahkan, berdasarkan UU APBN-P 2014, pasal 14 ayat 13 dinyatakan apabila terjadi perge-

seran parameter yaitu subsidi BBM yaitu menyangkut ICP dan kurs, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian. "Selain itu, apabila ada tindakan yang perlu diambil saat volume BBM subsidi 46 juta kiloliter pemerintah terlewat, maka jika tidak ingin dianggap melanggar UU harus mengkonsultasikan dengan DPR," katanya.

Sementara terkait legislasi, Komisi VII DPR memiliki 18 RUU yang menjadi Prolegnas seperti revisi UU Kelistrikan, Minerba, Migas yang menjadi topik utama legislasi di sektor energi. Sebelumnya, Komisi VII DPR juga telah menuntaskan Undang-undang (RUU) mengenai persetujuan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tentang pencemaran asap lintas.

"Itu merupakan perjanjian lintas batas terkait asap, yang berpedoman jangan sampai mengorbankan kedaulatan kita jika ada kebakaran hutan. Sementara Malaysia, Singapura apabila terganggu akibat asap, mereka dapat membantunya tetapi harus berkoordinasi dengan pusat. Kemudian soal Revisi UU Migas masih berada di Baleg dan akan diputuskan apakah Panja besar atau kecil," jelasnya.

Dari sisi pengawasan, lanjutnya, Komisi VII DPR mengharapkan adanya paradigma baru soal energi karena energi tidak hanya dipandang sebagai pendapatan negara tetapi harus bisa menjadi *engine of growth* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kita juga tidak ingin keuangan negara bobol akibat tindakan ilegal penyelundupan BBM, serta keinginan meningkatkan elektrifikasi rasio periode menjadi 90 persen," katanya.

(Sugeng) foto: iwan armanias, naefuro-djie/parle/hr

KALEIDOSKOP KOMISI VIII

LAHIRKAN TIGA UNDANG-UNDANG FUNDAMENTAL



Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifah Amaliah usai membacakan Laporan Pembahasan RUU JPH di Paripurna



Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifah Amaliah

Sepanjang tahun 2014 telah banyak yang dilakukan Komisi VIII DPR RI terkait dengan ketiga fungsi kedewannya, yakni pengawasan, anggaran dan legislasi.

Fungsi Pengawasan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI telah melakukan banyak hal terhadap para mitra kerjanya. Salah satunya adalah keberhasilan Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian agama untuk menurunkan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Tahun 2014 sebesar 308 Dolar Amerika atau sebesar 59.700 rupiah. Pada tahun 2013 M/ 1434 H, pemerintah menetapkan BPIH sebesar 3.527 dolar Amerika atau sebesar 33.859.200 rupiah, maka di tahun ini Komisi VIII bersama Kementerian Agama sepakat untuk menetapkan biaya BPIH menjadi sebesar 3.219 dolar Amerika atau sebesar 33.799.500

rupiah.

Fungsi Anggaran

Komisi VIII DPR RI memberikan tambahan anggaran tahun 2014 sebesar 900 Miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai mitra kerjanya. Hal itu digunakan untuk melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Diantaranya untuk peningkatan sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana, pemenuhan logistik dan peralatan pasca bencana yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan letak geografis yang terkena dampak bencana. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta pemenuhan



Suasana Rapat Komisi VIII

pusat pengendalian operasi (pusdalops), serta penyediaan pusdiklat penanggulangan bencana.

Fungsi Legislasi

Dalam fungsi legislasi, setidaknya tiga Undang-undang telah dihasilkan Komisi VIII di tahun 2014.

UU Jaminan Produk Halal

Setelah melalui lima kali masa persidangan akhirnya lewat sidang paripurna DPR RI, Kamis (25/9) mengesahkan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi Undang-undang. Diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa Amalia, RUU ini dibentuk untuk memberikan rasa nyaman di masyarakat dalam menggunakan produk halal. Sekaligus menumbuhkan kesadaran bagi produsen akan pentingnya produk halal dan mewajibkannya untuk memberikan jaminan kehalalan produk. Produk yang dimaksud yakni makanan, minuman, komestik dan lain-lain. Lamanya pembahasan RUU ini didasari atas sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan atas

beberapa substansi yang ada dalam RUU tersebut, sehingga membutuhkan pendalaman dan penyamaan persepsi antara DPR dan pemerintah. Namun akhirnya perbedaan tersebut dapat terselesaikan.

Revisi UU Perlindungan Anak

Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyepakati RUU perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. RUU tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, Kamis (25/9). Pembahasan RUU ini menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amalia dikarenakan penilaian bahwa Undang-undang yang ada sebelumnya belum mampu mengakomodir permasalahan anak yang terjadi saat ini. Sehingga perlu perubahan paradigma perlindungan anak. Dengan kata lain, perlunya perbaikan pengorganisasian terhadap perlindungan anak dalam lintas sektoral sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Dengan

demikian perlindungan anak akan lebih holistik, komprehensif dan terintegrasi dengan baik dari daerah hingga pusat.

UU Pengelolaan Keuangan Haji

Sidang Paripurna DPR RI, Senin (29/9) menyetujui sekaligus mengesahkan RUU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi undang-undang. Dalam penjelasannya, Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah mengatakan ada beberapa materi pokok yang diketengahkan dalam RUU ini. Diantaranya penjelasan yang dimaksud keuangan haji dalam RUU ini. Serta adanya terobosan-terobosan baru, seperti pembentukan badan atau lembaga khusus pengelolaan keuangan haji yang dinamakan BPKH atau badan pengelola keuangan haji. Selain itu, adanya pembuatan *virtual account* bagi jamaah haji sehingga bisa memonitor nilai manfaat masing-masing secara berkala. (Ayu) foto: iwan armanias, andri/parle/hr

KALEIDOSKOP KOMISI IX

TIGA UU PENTING BERHASIL DISAHKAN



Ketua Panja UU Kesehatan Jiwa Nova Riyanti Yusuf memenuhi nazarnya nyebur di kolam DPR RI

Tahun 2014 adalah tahun terakhir bagi Anggota DPR RI periode 2009-2014 dan tahun pertama bagi Anggota DPR RI periode 2014-2019. Di akhir tahun keanggotaan yang juga merupakan tahun politik ini, Dewan tetap semangat melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Komisi IX DPR yang membidangi Kesehatan dan Tenaga Kerja di bidang legislasi berhasil menyelesaikan 3 (tiga) Undang-Undang (UU) yaitu UU tentang Kesehatan Jiwa, UU tentang Tenaga Kesehatan dan UU tentang Keperawatan.

UU Kesehatan Jiwa disahkan Rapat Paripurna DPR Selasa (8/7/2014). Dengan disahkannya UU ini, Dewan berharap dapat meningkatkan kesehatan jiwa baik mutu, akuntabilitas dan perlindungan yang non diskriminatif.

UU Kesehatan Jiwa memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang yang mengalami masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa. Melalui UU ini diharapkan pelayanan kesehatan sema-

kin terintegrasi melalui upaya promotif, preventif dan rehabilitatif, serta meningkatkan mutu kesehatan jiwa sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembahasan Undang-undang Kesehatan Jiwa sudah bergulir sejak diwacanakannya tahun 2010, artinya sudah hampir lima tahun RUU Kesehatan Jiwa mandek hingga akhirnya disetujui di tingkat Paripurna DPR RI pada bulan Juli 2014.

Usai UU Kesehatan Jiwa disahkan di Paripurna, Ketua Panja RUU Kesehatan Jiwa Nova Riyanti Yusuf yang akrab dipanggil Noriyu, akhirnya memenuhi khaulnya atau janjinya yang akan nyebur ke kolam DPR bila RUU ini disahkan.

Saat nyebur Nova mengenakan baju berwarna biru yang bertuliskan "mental health" dengan motif celana hijau bunga. Dirinya nyebur ditemani oleh 10 orang rekannya yang mengenakan kaos serupa, menurutnya, aksi ini merupakan bentuk luapan berbagai keresahan.

Menurutnya, RUU kesehatan jiwa tidak mudah untuk

diselesaikan, bahkan membutuhkan lima tahun. "Ini terakhir kalinya sejak tahun 1998 reformasi saya menduduki kembali kolam ini, dan sangat diluar prediksi apalagi saat itu saya sempat menjadi pimpinan Komisi, dan kita terus berkomitmen untuk RUU Kesehatan jiwa," tandasnya.

UU Tenaga Kesehatan disahkan DPR pada Kamis (25/9/2014), dengan diundangkannya UU ini dapat meningkatkan tenaga kesehatan di Indonesia yang memadai baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya. Tenaga kesehatan berkualitas, dengan sendirinya kualitas pelayanan kesehatan dapat berkembang menuju ke arah yang lebih baik di negeri tercinta ini.

UU ini diharapkan dapat menjamin setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil merata, aman berkualitas dan terjangkau. Selain itu, UU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan disahkan DPR dengan catatan dari anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka yang meminta pengesahan ditunda karena ada diskriminasi atas tenaga kesehatan dan disabilitas.

Sementara, **UU Keperawatan** yang merupakan RUU Usul Inisiatif DPR RI disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat Paripurna DPR Kamis (25/9/2014).

Diharapkan dengan disahkannya UU Keperawatan ini, perawat sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di dalam menjalankan tugasnya mendapatkan ketenangan dan perlindungan hukum. Sehingga layanan praktek keperawatan yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih profesional dan akuntabel sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimiliki oleh perawat.

Pembahasan UU Keperawatan dilakukan secara simultan dengan pembahasan UU Tenaga Kesehatan. Hal ini dilakukan semata untuk memastikan bahwa masing-masing UU yang saling berkaitan ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.

UU yang mengatur penyelenggaraan praktek keperawatan secara komprehensif ini nantinya diharapkan dapat memberikan jaminan peningkatan mutu perawat dan pelayanan keperawatan serta perlindungan hukum kepada perawat dalam penyelenggaraan keperawatan.

Di bidang pengawasan, terkait persoalan *outsourcing* di perusahaan-perusahaan BUMN, Panja *Outsourcing* Komisi IX DPR telah menetapkan 12 (duabelas) rekomendasi yang harus dilaksanakan Menteri BUMN. Menteri BUMN pada saat itu (Dahlan Iskan.red) telah sepakat untuk melaksanakan rekomendasi Panja *Outsourcing* Komisi IX DPR tersebut.

Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menakertrans dan Menteri BUMN pada tanggal 4 Maret 2014 bersepakat untuk :

- Mengangkat semua pekerja penyerahan sebagian pekerjaan dan pemborongan pekerjaan (*outsourcing*) yang ada di perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diangkat menjadi pekerja tetap oleh perusahaan BUMN tersebut.
- Mempekerjakan kembali semua pekerja *outsourcing* yang sudah di PHK dan sedang dalam proses PHK pada posisi semula dan jabatan semestinya sesuai dengan asal profesionalitas di perusahaan BUMN.
- Memenuhi semua hak-hak normatif para pekerja di perusahaan BUMN.
- Membayar secara penuh hak-hak lainnya kepada pekerja BUMN yang menjadi korban PHK tidak sah dengan mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (sc) foto: naefurodjie, andri/parle/hr

Rapat kerja Komisi IX dengan Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Menakertrans Muhaimin Iskandar



KALEIDOSKOP KOMISI X

MULAI DARI UJIAN NASIONAL HINGGA KURIKULUM 2013

Selama kurun waktu 2014, pendidikan sebagai salah satu bidang kerja Komisi X pun tak luput dari berbagai permasalahan. Ujian Nasional, mendapat perhatian khusus Komisi X pada awal tahun 2014. Pasalnya, kecacauan UN 2013 menjadi pelajaran berharga, sehingga diharapkan tidak terjadi di tahun 2014. Komisi X pun mewanti-wanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selaku penyelenggara UN, untuk mempersiapkan UN 2014 secara maksimal dan penuh kehati-hatian.

Bahkan, Komisi X mengancam, jika Pemerintah masih gagal dalam penyelenggaraan UN 2014, DPR tak akan menyetujui anggaran UN 2015. Demi suksesnya penyelenggaraan UN 2014 di berbagai tingkat, Komisi X pun mengadakan kunjungan spesifik ke beberapa daerah, untuk memantau langsung jalannya UN.

Hasil pantauan DPR, UN 2014 berjalan cukup sukses, walaupun masih ada sedikit kekurangan. Walaupun DPR menyetujui pelaksanaan UN, namun UN bukan satu-satunya penentu kelulusan bagi peserta didik. UN lebih berfungsi sebagai pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia secara nasional.

Jelang pertengahan 2014, Indonesia dikejutkan dengan kasus pelecehan yang menimpa salah satu murid Taman Kanak-kanak Jakarta International School (JIS). Banyak yang menyayangkan kejadian yang sepatutnya menimpa anak usia dini ini. Sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, dimana anak seharusnya mendapatkan keamanan dan kenyamanan, malah mendapatkan pelecehan.

Komisi X sendiri menilai kejadian ini bak pukulan telak bagi pendidikan Indonesia. Untuk itu, Komisi X mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan investigasi mendalam terhadap kejadian ini. Dalam hal ini, tambah Reni, sekolah gagal dalam memberikan perlindungan kepada muridnya. Sekolah terkesan bersembunyi dibalik statusnya yang bersifat internasional, namun tidak dapat menjamin keamanan muridnya.

Di bidang legislasi, Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Komisi X DPR RI tentang Sistem Perbukuan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Ketua Panja RUU Sisbuk Utut Adianto menyatakan, dengan adanya RUU Sisbuk ini diharapkan dapat menekan harga buku, baik buku pendidikan maupun buku umum, sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Selain itu, RUU ini juga dapat memberikan perlindungan hak cipta dan royalti bagi para penulis.

September 2014, DPR Periode 2009-2014 berakhir, dan digantikan oleh DPR Periode 2014-2019 yang dilantik pada 1 Oktober 2014. Susunan Pimpinan Komisi



Penetapan Pimpinan Komisi X

X pun berubah. Teuku Riefky Harsya, dari Fraksi Partai Demokrat, terpilih secara aklamasi untuk memimpin Komisi X DPR RI. Mendampingi Riefky sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR secara berturut-turut adalah Ridwan Hisyam (F-Partai Golkar), Nuroji (F-Partai Gerindra), dan Sohibul Iman (F-Partai Keadilan Sejahtera).

Masih dari bidang pendidikan, Komisi X terus memantau pelaksanaan Kurikulum 2013. Kurikulum yang mulai diujicoba pada pertengahan 2013 ini sebelumnya sudah sering dibahas antara Komisi X dengan Mendikbud, dalam kesempatan rapat kerja. Komisi X mengingatkan, Pemerintah jangan terburu-buru menerapkan kurikulum baru ini, pasalnya persiapan yang masih kurang.

Bahkan, hingga penghujung 2014, implementasi K13 dinilai masih diliputi permasalahan. Bahkan, hujan protes terus dilayangkan kepada pemerintah. Selain proses pendistribusian buku yang tak kunjung selesai, pihak sekolah mengeluhkan pelatihan guru belum dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah sendiri yang menentukan target di tahun 2014 ini distribusi buku dan pelatihan guru dapat diselesaikan. Namun, hingga pertengahan Agustus 2014, masih banyak sekolah yang menerima buku.

Hadirnya kurikulum 2013 yang diharapkan mampu mengatasi persoalan pendidikan di Indonesia, menurut beberapa pihak malah akan menjadi bumerang bagi siswa dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya. Hingga kini, DPR terus memantau perkembangan pelaksanaan K13, terutama implementasinya di sekolah. Kini, setelah Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dijabat oleh Anies Baswedan, berjanji akan mengevaluasi K13, direvisi, untuk kemudian dijalankan lagi. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr

BERKUTAT DENGAN APBN DAN PERBANKAN



DPR tetapkan anggota BPK

Komisi XI DPR RI memiliki posisi sangat strategis. Mengingat, Komisi Ekonomi ini memiliki lingkup kerja di bidang keuangan, perencanaan pembangunan, hingga perbankan. Di awal tahun 2014, Komisi XI memiliki tugas untuk menindaklanjuti usulan Gubernur BI baru untuk masa 2013-2018 yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY mengusulkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai calon Gubernur BI untuk menggantikan Darmin Nasution yang akan berakhir pada 22 Mei 2014. Akhirnya, setelah melalui proses *fit and proper test* yang cukup ketat, Komisi X menyetujui Agus untuk menjabat orang nomor satu di bank sentral itu. Keputusan ini kemudian ditetapkan dan disetujui di rapat paripurna.

Dipertengahan 2014, Komisi XI kembali melakukan pemilihan. Kali ini, Komisi XI harus menyeleksi satu calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, untuk menggantikan Taufiqurrachman Ruki, yang telah memasuki pensiun. Hasil voting tertutup, Komisi XI akhirnya memilih Agus Joko Pramono sebagai anggota BPK Pengganti Antar Waktu.

Berselang satu bulan kemudian, Komisi XI memilih Hendar sebagai Deputy Gubernur BI, untuk menggantikan Muliaman D Hadad. Sebelumnya, Hendar menjabat sebagai Asisten Gubernur BI. Pemilihan dilakukan lewat mekanisme voting. Dalam voting tersebut, Hendar mendulang dukungan sebanyak 24 suara, mengungguli Treesna W Suparyono dan Mulya Siregar. Masih di bulan yang sama, Komisi XI juga memilih Mirza Adityaswara untuk kembali menjabat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.

Komisi XI pun tak luput menyoroti masalah APBN. DPR menilai Pemerintah harus mengoptimalkan pendapatan negara dan mengurangi defisit. DPR dan Pemerintah

menyepakati Pendapatan Negara pada RAPBN 2015 mengalami peningkatan sebesar 7,76 persen APBN-P 2013 sebesar Rp 1.635,4 triliun menjadi Rp 1.762,3 triliun. Namun, pendapatan negara masih dapat dioptimalkan lebih tinggi dari target dalam RAPBN 2015, jika fungsi kontrol dan pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik.

Penghujung Agustus 2014, Olly Dondokambey di-daulat menjadi Ketua Komisi XI, menggantikan Emir Moeis. Dengan demikian, formasi untuk Pimpinan Komisi XI yaitu Ketua Komisi XI akan dijabat oleh Olly Dondokambey, dan tiga Wakil Ketua Komisi XI tetap sama, yaitu Andi Timo Pangerang (Fraksi Demokrat) Harry Azhar Azis (Fraksi Golkar) dan Andi Rahmat (Fraksi PKS).

Memasuki bulan September 2014, Komisi XI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK. Sebanyak 63 calon anggota BPK diuji, untuk bersaing untuk mendapatkan 5 (lima) kursi di Anggota BPK. Kelima anggota BPK yang berhasil lolos melalui mekanisme voting adalah Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Aziz, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, dan Eddy Mulyadi Soepardi.

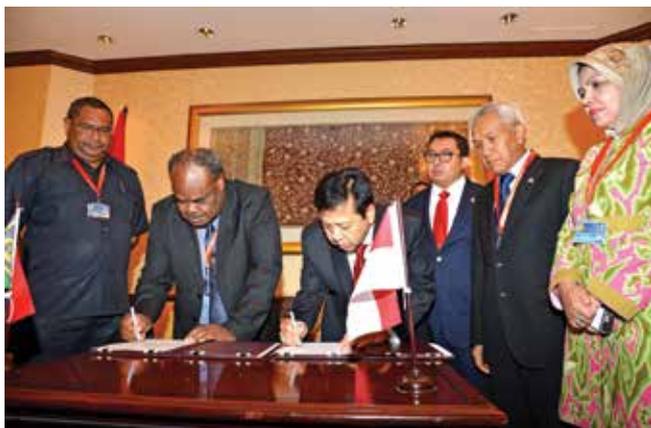


Penetapan Pimpinan Komisi XI

Masih dalam bulan yang sama, Komisi XI menabur prestasi di bidang legislasi, dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang Perasuransian. Kemudian, Rapat Paripurna juga secara aklamasi telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Memasuki DPR periode 2014-2019, empat Pimpinan Komisi XI ditetapkan. Terpilih secara aklamasi Fadel Muhammad (F-Partai Golkar) menjadi Ketua Komisi XI DPR, didampingi oleh tiga Wakil Ketua Komisi XI, yaitu Gus Irawan Pasaribu (Fraksi Partai Gerindra), Marwan Cik Asan (Fraksi Partai Demokrat), dan Jon Erizal (Fraksi Partai Amanat Nasional). (sf) foto: iwan armanias, andri/parle/hr

PERAN MEMBANGUN DIPLOMASI PARLEMEN



Ketua DPR RI menandatangani MOU dengan Ketua Parlemen Vanuatu

Kabar itu disampaikan pada saat penutupan Sidang Pleno Ketujuh *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di Lahore, Pakistan, awal Desember lalu. DPR kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah sidang *Standing Committee on Economic Matters*. "Ini kepercayaan kepada DPR dari Sidang Pleno APA, tentu akan kita laksanakan karena UU juga mengamanatkan DPR perlu mengambil peran," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin lima anggota delegasi ke acara itu.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI memainkan peran penting dalam peran diplomasi antar parlemen atau dikenal dengan *P to P diplomacy*. Misi itu diemban oleh GKSAB (Grup Kerja Sama Bilateral) atau diplomasi juga bisa dilakukan dalam persidangan organisasi parlemen. Pertengahan November lalu Surabaya mendapat kehormatan menjadi tuan rumah *Parliamentary Event on MDGs Acceleration and Post 2015 Development Agenda*. Anggota parlemen dari 20 negara Asia Pasifik khusus bersidang membahas target MDGs yang sudah di depan mata, tahun 2015 nanti.

Akhir Agustus DPR juga menjadi tuan rumah *workshop* pertemuan anggota parlemen yang mempunyai komitmen kuat memberantas korupsi - *Workshop on stronger Ethics and Integrity : Path For Parliament to Combat Corruption*. Sejumlah tokoh anggota parlemen anti korupsi dari manca negara tampil menjadi pembicara dalam *Board Meeting* di Jakarta.

Sebelumnya awal Juni, ibukota Jakarta juga menjadi tuan rumah persidangan *Standing Committee on Economics Affairs Asian Parliamentary Assembly* (APA). Menurut Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung kegiatan ini sekaligus menjadi pesan penting bagi dunia. "Di tengah kesibukan kita menyelenggarakan Pemilu Presiden, ada revitalitas antar kandidat dan pendukungnya, In-

donesia tetap sejuk dan damai serta bisa menyelenggarakan forum internasional secara baik. Ini perlu kita tunjukkan kepada masyarakat dunia," kata dia.

Pimpinan Baru Semangat Baru

Nurhayati Ali Assegaf Anggota F-PD DPR terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Bersama tiga Wakil Ketua, Teguh Juwarno (F-PAN), Meutya Viada Hafid (F-PG), dan Rofi Munawar (F- PKS), langkah diplomasi parlemen memasuki babak baru sampai tahun 2019 nanti.

Sejumlah pertemuan bilateral digelar. Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Perancis-Indonesia Jean-Jacques Guillet memimpin delegasi melakukan kunjungan balasan atas kunjungan delegasi DPR RI ke Perancis beberapa waktu lalu. Guillet menyebut Indonesia memainkan peran penting di kawasan regional. Perancis sangat berkepentingan membangun kerja sama dengan Indonesia dalam segala bidang.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menetapkan pimpinan BKSAP

Disela-sela Sidang Pleno ke tujuh APA di Pakistan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga melakukan pertemuan bilateral dengan Pimpinan Parlemen Tiongkok dan Rusia. Ketua DPR RI Setya Novanto juga menandatangani MOU dengan Pimpinan Parlemen Vanuatu saat menghadiri pertemuan di Surabaya.

Sebelumnya di awal tahun, Parlemen Italia juga meminta dukungan DPR agar memberikan suaranya kepada Senator Barbara untuk menjadi Sekjen Organisasi Parlemen Dunia IPU (Inter Parliamentary Union). Ketua Delegasi Parlemen Iran Mehdi Koocheckzadeh juga menyambangi DPR membawa pesan kerja sama di bidang energi. (iky) foto: eka hindra, andri/parle/hr

BADAN ANGGARAN DPR RI: FOKUS PADA APBN



Suasana Rapat Banggar

Pertengahan tahun 2014, DPR menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2013. Atas pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN 2013 oleh Pemerintah tersebut, BPK telah memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tak berselang lama, Badan Anggaran bersama Pemerintah menyepakati beberapa asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014. Dimana sebelumnya, asumsi makro ini sudah dibahas oleh Pemerintah dengan Komisi XI.

Pertumbuhan ekonomi disepakati di angka 5,5 persen. Untuk inflasi, Pemerintah mengusulkan sebesar 5,3 persen. Selain itu, disepakati pula Tingkat Bunga SPN 3 Bulan sebesar 6,0 persen, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp 11.600 per dolar AS. Nilai tukar rupiah yang dipatok dalam RAPBN-2014 sebesar Rp11.600 per dolar merupakan yang terlemah sepanjang 14 tahun terakhir.

Sementara itu, harga minyak disepakati U\$D105 per barel. Untuk *lifting* minyak disepakati 818 ribu barel per hari, lebih rendah dari APBN 2014 sebesar 870 ribu barel per hari. *Lifting* gas 1.224,0 ribu barel setara minyak per hari. Terakhir kesepakatan *lifting* migas 2.042,0 ribu barel per hari. Untuk angka belanja negara dalam APBN-P 2014 sebesar Rp 1.876,9 triliun. Sementara angka pendapatan negara sebesar Rp 1.635,4 triliun.

Jelang tahun 2015, DPR dan Pemerintah mulai membahas RAPBN 2015. Pembahasan diawali dengan Pembicaraan Pendahuluan. Pembicaraan Pendahuluan

memiliki peran yang sangat strategis, karena berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

RAPBN 2015 merupakan APBN transisi atau APBN tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke tiga tahun 2015-2019, sekaligus pelaksanaan tahun pertama pemerintahan baru.

Usai membahas secara intens selama satu bulan penuh, akhirnya DPR dan Pemerintah menyepakati RAPBN 2015. RAPBN ini bersifat *baseline*, karena berada pada masa transisi pemerintahan, sehingga dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintahan baru.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, nilai tukar Rp 11.900, serta tingkat suku bunga



Anggota Banggar sedang berdialog dengan Menkeu

SPN 3 bulan sebesar 6,0 persen. Selain itu, disepakati juga hanya minyak atau ICP sebesar 105,0 US\$/barel, *lifting* minyak dan gas bumi sebesar 2.148,0 ribu barel per hari, dengan komposisi *lifting* minyak 900 ribu barel per hari dan *lifting* gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan asumsi dasar tersebut, maka pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2015 disepakati sebesar Rp 1.793,6 triliun, sementara untuk belanja negara, disepakati belanja sebesar Rp 2.039,4 triliun. (sf) foto: andri/parle/hr

TIMWAS CENTURY

DPR PERLU LANJUTKAN PENGAWASAN KASUS BANK CENTURY



Suasana rapat Timwas Century DPR dengan Pemerintah

Tidak hanya pada tahun 2014, hampir sepanjang DPR periode 2009-2014 kasus dana talangan Bank Century memperoleh porsi pemberitaan DPR maksimal. Meski demikian, Timwas Century pada laporan akhir periode pengabdianya belum bisa menuntaskan kasus mega skandal yang merugikan negara Rp 6,7 triliun tersebut.

Karena itu dalam laporan akhir di depan Sidang paripurna 29 September 2014 merekomendasikan kepada DPR periode 2014-2019, masih perlu melanjutkan pengawasan terhadap rekomendasi DPR terhadap penyelesaian kasus Bank Century.

Pengawasan Timwas DPR mencakup penegakan hukum, **asset recovery** oleh Pemerintah, pengembalian dana nasabah PT Antaboga dan kebijakan legislasi. Hal itu untuk memastikan bahwa setiap keputusan tuntas

dan memberikan rasa aman, nyaman dan pasti sebagai dasar bagi rasa keadilan masyarakat Indonesia dan citra baik di mata dunia.

Sedangkan Timwas terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) merekomendasikan agar DPR segera menyelesaikan RUU tentang Perubahan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

"Persoalan TKI seharusnya menjadi potensi, bukan beban karena terkait dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bila penempatan dan perlindungan TKI dikelola dengan baik maka akan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri," kata Wakil Ketua Timwas TKI Adang Daradjatun. (mp) foto: dok./parle/hr

UU MONUMENTAL, KADO ISTIMEWA BALEG



Penandatanganan RUU Keperawatan di Baleg DPR RI

Tahun 2014 ini, Badan Legislasi DPR RI (Baleg) menargetkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2014 sebanyak 69 RUU dan 5 RUU Kumulatif Terbuka, serta ditambah 1 RUU dari Pemerintah menjelang akhir periode. Dari RUU Prioritas Tahun 2014 yang ditargetkan tersebut, dapat diselesaikan dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR sebanyak 22 RUU dan 12 RUU Kumulatif Terbuka.

Sementara 27 RUU masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, 9 RUU akan memasuki Pembicaraan Tingkat I, 7 RUU dalam proses penyusunan di DPR, dan 5 RUU proses penyusunan di Pemerintah.

Ada beberapa catatan dalam perjalanan proses pembahasan RUU, diantaranya RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (RUU dari Pemerintah) diputuskan substansinya cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), RUU tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) diputuskan substansi cukup diatur dengan PP, dan RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Departemen Pertahanan Keamanan

RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan, Logistik, dan Industri Pertahanan diputuskan substansi cukup diatur dengan PP.

Di akhir masa keanggotaan DPR periode 2009-2014 ini, Baleg berhasil mempersembahkan Undang-Undang monumental yang sangat dinantikan masyarakat dan merupakan kado istimewa bagi bangsa Indonesia.

Undang-Undang (UU) tersebut antara lain UU Hak Cipta, UU Keperawatan, UU Jaminan Produk Halal, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), UU Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada) dan UU Pemerintahan Daerah.

Terkait rendahnya capaian legislasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 yang sudah ditetapkan, Pimpinan Baleg pada saat itu telah menyampaikan usulan penanganan RUU yang masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I dapat dilanjutkan oleh Keanggotaan Dewan periode berikutnya (2014-2019) dengan catatan tidak semua RUU dapat dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan.

Usulan ini merupakan terobosan, karena selama ini tidak dikenal luncuran atau *take over* pembahasan RUU pada setiap pergantian periode keanggotaan Dewan. Luncuran tersebut merupakan upaya agar program yang sudah ditetapkan bersama dapat dicapai pada akhir periode DPR 2009-2014 atau setidaknya tidaknya mencapai 50% dari program RUU yang ada.

Namun hal ini tentunya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh semua pihak terkait khususnya di lingkungan DPR dan pemerintah. Serta diberikan landasan hukum dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI. (sc) foto: iwan armanias/parle/hr

KALEIDOSKOP SETJEN DPR RI

SETJEN DPR UKIR PRESTASI DI 2014

Di tahun 2014 berbagai penghargaan dan prestasi telah diukir oleh Kesetjenan DPR RI, diantaranya:

Bronze Winner

Setjen DPR RI membuka tahun 2014 dengan keberhasilan meraih penghargaan *Bronze Winner* dalam ajang *The 3rd Indonesia In-house Magazine Award (InMA) 2014* lewat Majalah Parlemen DPR RI. Majalah yang dikelola oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR ini menarik perhatian dewan juri yang menilai 201 cover media dari 55 lembaga dan korporasi yang berpartisipasi.

"Ini merupakan apresiasi dari para juri profesional yang tentu punya kriteria yang objektif. Penghargaan ini menunjukkan kita sudah berada di jalur yang benar dan sekaligus memotivasi kita untuk bisa lebih baik," kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR Djaka Dwi Winarko usai menerima penghargaan langsung dari Ketua Umum SPS yang juga Menteri BUMN Dahlan Iskan di Provinsi Bengkulu, Sabtu (8/2/2014).

Executive Committee Association of Secretaries General of Parliament (ASGP)

Setjen DPR pertengahan Maret 2014 lalu menorehkan prestasi yang mengharumkan nama bangsa dengan menjadi anggota *Executive Committee ASGP*. Lewat voting dengan sistem *secret ballot*. Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti saat itu berhasil meraih suara 46 mengalahkan Yunani dan India yang masing-masing meraih 39 dan 20 suara, serta 1 (satu) suara abstain.

Tentu bukan hal yang mudah menjadi anggota *Executive Committee ASGP*, mengingat selama ini keterwakilan Asia dalam forum pertemuan dan komunikasi antar-Sekretaris Jenderal dan pejabat



Kepala Biro Humas dan Pemberitaan (kanan) menerima penghargaan dari Ketua KIP

Setjen parlemen sedunia ini hanya diwakili oleh Mr. Somsak Manunpichu, *Secretary General of the Senate of Thailand*. Itupun baru resmi diangkat sebagai Anggota *Executive Committee* pada Oktober 2013 lalu.

"Keberhasilan menduduki posisi *Executive Committee ASGP* ini akan semakin meningkatkan peran Indonesia pada pergaulan dunia internasional, khususnya di tingkat parlemen," tegas Win ketika itu.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari KIP

Dipenghujung tahun 2014, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jumat (12/12) meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia sebagai badan publik yang mampu memberikan keterbukaan informasi publik. DPR RI meraih peringkat 12 dari 135 lembaga negara yang termasuk dalam kategori badan publik lembaga/badan.

Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI, Djaka Dwi Winarko usai menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden mengatakan DPR sebagai lembaga negara yang dibiayai oleh negara dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Sehingga sudah seyogyanyalah masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai berbagai hal terutama terkait proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut publik. Dengan demikian diharapkan masyarakat juga dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan yang tentunya akan berpengaruh terhadap nasib masyarakat dan negara secara keseluruhan.

"Kita harus optimis bisa meraih peringkat yang lebih tinggi lagi, karena sesuai amanat Undang-undang sebagai badan publik kita wajib memberikan informasi terhadap publik," tegas Djaka. (Ayu) foto: naefurodjie/parle/hr

Mengukur Kinerja DPR RI periode 2009-2014

Oleh: Tim peneliti Center for Election and Political Party, Universitas Indonesia

*“The only man who behaves sensibly is my tailor;
he takes my measurements a new every time he sees me,
while all the rest go on with their old measurements and expect me to fit them”
George Bernard Shaw (winner of Nobel Prize in Literature 1925)*

Pendahuluan

Mengukur kinerja DPR? Bagaimana caranya? Apa alat ukurnya? Apakah seperti *meteran* yang digunakan tukang jahit? Kenapa tukang jahit? Karena tukang jahit adalah tukang ukur yang paling rasional. Mereka tidak pernah menggunakan ukuran lama untuk menjahit baju baru. Mengapa tukang jahit selalu menggunakan ukuran terbaru? Supaya bajunya pas dan nyaman dipakai. Sehingga pelanggan merasa senang dan puas. Ini adalah pelajaran yang diperoleh George Bernard Shaw, pemenang Nobel Sastra Tahun 1925, dari tukang jahit. Tukang jahit bukan peneliti. Tetapi, pendekatan yang digunakan keduanya sama: kuantitatif (ukuran baju) dan kualitatif (tingkat kepuasan pelanggan). Belajar dari Shaw, studi juga akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengu-

kur kinerja Dewan. Untuk memudahkan, tulisan ini dibagi dalam beberapa bagian: ‘DPR RI pasca Reformasi 1998’ yang mendiskusikan beberapa dampak perubahan politik, ‘metodologi’ yang membahas variabel dan indikator kinerja, ‘evaluasi kinerja’ yang mengukur capaian pelaksanaan fungsi-fungsi yang dilakukan, kemudian ditutup dengan ‘beberapa catatan’ yang merupakan masukan untuk DPR RI periode 2014-2019. Untuk memperkaya analisis, pengalaman parlemen di Negara lain ditambahkan pula.

DPR RI pasca Reformasi 1998

Berbagai perubahan politik pasca Reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR RI menjadi lebih demokratis dan akuntabel; dan membuat anggota Dewan menjadi lebih bebas dan terbuka dalam menyam-

paikan pendapat. Walaupun, dalam beberapa kasus, perubahan tersebut juga telah menimbulkan kesulitan tersendiri. Sebagai contoh, proses formulasi sejumlah undang-undang menjadi berlangsung lama karena diwarnai perdebatan sengit bahkan ada yang *deadlock*, menjadi sangat menyita waktu, energy dan biaya. Sehingga jadwal penyelesaian undang-undang tersebut meleset dari tenggat waktu yang direncanakan. Diantara berbagai perubahan politik pasca Reformasi 1998, ada dua yang dianggap paling signifikan mempengaruhi kinerja Dewan.

Pertama, terkait dengan posisi dan relasi Dewan dengan lembaga negara lain. Salah satunya adalah berubahnya praktik ketatanegaraan dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*. Perubahan tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi *check and balance* di tiga



Demo mahasiswa duduki Gedung DPR 1998

lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang menghasilkan *division of power* (pembagian kekuasaan) dan bukan *separation of power* (pemisahan kekuasaan). Penekanan *division of power* memiliki arti tersendiri karena pelaksanaan fungsi pembuat kebijakan (legislatif), pelaksana kebijakan (eksekutif), dan pengawas kebijakan (yudikatif) dapat dilakukan secara bersama-sama. Sebagai contoh: fungsi legislasi, yang menjadi domain utama DPR, dilakukan bersama-sama antara DPR [dan DPD] de-

Metodologi: variable dan indikator

Metodologi sangat penting karena menentukan validitas kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan studi ini valid maka ada dua prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, variable dan indikator yang digunakan harus bisa mengukur tingkat efektivitas kinerja Dewan. Ini karena kinerja Dewan ditentukan oleh kerja politik, dan kerja politik diukur dengan indikator efektivitas. Kerja politik tidak diukur dengan indikator efisiensi. Kerja politik hampir selalu

(menetapkan produk hukum dan peraturan perundangan yang tepat, mengalokasikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan memastikan bahwa lembaga eksekutif bekerja dengan efektif) maka visi Dewan dapat tercapai. Sejauh mana visi ini tercapai, dapat diukur melalui berbagai indikator, misalnya, *Gross Domestic Product* (GDP), *Human Development Index* (HDI), dan *Happy Planet Index* (HPI). Walaupun ketiga indikator tersebut memiliki banyak kelemahan, saat ini belum ada indikator lain yang lebih baik.

Kedua, tingkat efektivitas kinerja Dewan harus diukur dengan pendekatan kuantitatif (angka) dan pendekatan kualitatif (huruf). Apabila menggunakan hanya salah satu pendekatan, hasil pengukuran menjadi tidak komprehensif dan kesimpulannya menjadi tidak valid. Sebagai contoh, menghitung jumlah undang-undang yang sedang, akan dan telah ditetapkan sangat mudah. Namun, apakah jumlah undang-undang dapat digunakan sebagai indikator tingkat efektivitas kinerja Dewan? Apakah semakin banyak undang-undang yang dihasilkan maka kinerja DPR semakin baik? Bagaimana bila ternyata undang-undang tersebut tidak mencerminkan aspirasi rakyat banyak? Bagaimana bila ternyata undang-undang tersebut di-*judicial review*, di-amandemen ataupun dibatalkan MK segera setelah ditetapkan? Ini memperlihatkan bahwa data jumlah undang-undang (kuantitatif) tidak cukup untuk menilai kinerja fungsi legislasi Dewan. Data jumlah undang-undang harus ditambah dengan data mengenai kualitas undang-undang (kualitatif).

Namun, harus diakui sangat sulit untuk menentukan kriteria objektif kualitas sebuah undang-undang; apalagi setiap undang-undang unik sehingga tidak dapat diperbandingkan. Kualitas undang-undang, misalnya, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentu tidak dapat dibandingkan dengan kualitas undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Menentukan tingkat efektivitas kinerja Dewan memang tidak mudah, tetapi bukan



Suasana pelantikan anggota baru DPR periode 2014-2019

ngan Pemerintah dengan kedudukan yang setara.

Kedua, terkait dengan berubahnya *atmosphere* (suasana/ lingkungan) persidangan dan rapat-rapat di DPR. Sidang paripurna, rapat komisi, atau pun rapat panitia khusus sekarang ini sangat sering diwarnai debat terbuka, silang pendapat, hujan interupsi, *walk out* dan insiden. Hal yang jarang ditemui di DPR sebelumnya. Sekarang ini para Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat tidak mau lagi berperan sebagai *yes man/woman*. Walaupun, ada juga diantara mereka yang agak terlalu bersemangat ketika menyampaikan pendapat terutama bila sedang di sorot kamera.

tidak efisien karena adanya silang-pendapat, tarik-menarik kepentingan, lobby-negosiasi-intervensi, prosesnya tidak linear. Sehingga, untuk mengukur kinerja Dewan, pertanyaannya adalah: sejauh mana DPR (Lembaga dan anggota) telah bekerja secara efektif untuk mewujudkan visi yang diembannya, yaitu: "Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur." Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi yang secara prinsip mengacu kepada tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Asumsinya, bila ketiga fungsi ini dilakukan dengan baik

tidak mungkin. The Commonwealth Parliamentary Association berhasil mengatasi permasalahan ini dan kemudian mengusulkan penggunaan standar yang sama untuk mengukur kinerja Parlemen di Negara-negara Commonwealth;¹ The World Bank Institute juga mengusulkan berbagai variable dan indikator untuk mengukur tingkat efektivitas Parlemen;² sedangkan The Inter-Parliamentary Union telah berhasil mengembangkan *tool-kit* untuk mengevaluasi fungsi Parlemen.³

Evaluasi Kinerja: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

Secara konstitusional, DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam rangka menjalankan fungsi representasi Dewan. Dalam praktiknya, dinamika pelaksanaan tiga fungsi tersebut relatif tinggi.

Fungsi Legislasi

Dewan dituntut untuk dapat menyelesaikan semua RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas. Tuntutan tersebut tentu saja sulit dipenuhi. Pertama, DPR pasca reformasi berbeda 180° dengan DPR masa Orde Baru. Dulu, proses legislasi sebatas prosedural, sebagai *tukang stem-pel* undang-undang yang di-inisiasi pemerintah. Sehingga tidak heran, DPR periode itu selalu dapat menyelesaikan seluruh RUU yang direncanakannya. Sekarang, proses legislasi lebih substansial, undang-undang dicermati dan diperdebatkan terlebih dahulu sebelum ditetapkan. Sehingga masuk akal bila tidak semua undang-undang bisa diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati. Kedua,

Dewan terkendala oleh ketidaksinkronan waktu antara penetapan Prolegnas, penetapan anggaran, dan Laporan Kinerja DPR RI. Laporan kinerja DPR RI disampaikan pada setiap Tahun Sidang (16 Agustus–15 Agustus tahun berikutnya) sementara Prolegnas setiap tahun ditetapkan berdasarkan tahun takwim (Januari–Desember). Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 akan selesai

jabatannya. Bahkan *House of Representative* (HoR) Australia, pada periode masa jabatan 2004-2006, hanya mampu menyelesaikan 69,3% target RUU mereka (321 UU dari 463 RUU). Coba bandingkan dengan HoR Amerika Serikat (AS), pada periode masa jabatan 2005-2006, yang menyelesaikan 1,35% target RUU mereka (143 UU dari 10.558 RUU). Lihat Tabel 2.

Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Legislasi DPR RI Periode 2010-2014

Tahun	RUU Prolegnas	Inisiator RUU			Output				
		DPR	DPD	Pemerintah	Non-Kumulatif	Kumulatif Terbuka	Oleh DPR	Oleh Pemerintah	Jumlah
2010	70 RUU	36 RUU	-	34 RUU	8 UU	7 UU	6 UU	9 UU	15 UU
2011	70 RUU	37 RUU	-	33 RUU	20 UU	5 UU	12 UU	13 UU	25 UU
2012	69 RUU	46 RUU	-	23 RUU	10 UU	22 UU	18 UU	14 UU	32 UU
2013	75 RUU	48 RUU	-	27 RUU	11 UU	11 UU	11 UU	11 UU	22 UU
2014	68 RUU	44 RUU	1 RUU	23 RUU	3 UU	7 UU	5 UU	5 UU	10 UU
Jumlah	352 RUU	211 RUU	1 RUU	140 RUU	52 UU	52 UU	52 UU	52 UU	104 UU

Sumber: Majalah Parlemen DPR RI: Dinamika DPR Periode 2009-2014. Edisi 116 TH. XLIV, 2014, hlm 17.

Tabel 2: Perbandingan Politik Legislasi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia

Indikator	House of Representative Australia (Periode 2004-2006)	House of Representative Amerika Serikat (Periode 2005-2006)
RUU yang Diajukan	463 RUU	10.558 RUU
UU yang Disahkan	321 UU	143 UU

Sumber: kompilasi dari berbagai dokumen

pada bulan Desember, sementara laporan kinerja disampaikan bulan Agustus. Pengaturan waktu yang tidak 'pas' ini menyebabkan DPR, di dalam Laporan kinerjanya seolah-olah gagal menuntaskan semua 'pekerjaannya'.

Dewan diberikan "rapor merah" beberapa waktu lalu oleh satu LSM yang mengklaim berfungsi sebagai *parliamentary watch*. LSM tersebut menggunakan kriteria kuantitatif, salah satunya, dengan membandingkan jumlah RUU Prolegnas dan UU yang dihasilkan. Memang benar, capaian fungsi legislasi Dewan tidak menggembirakan. Dari Tahun 2010 sampai 2014, hanya 29,5% jumlah RUU Prolegnas berhasil diselesaikan menjadi UU. Lihat Tabel 1. Tetapi, sebenarnya, sangat amat jarang ada Parlemen di dunia yang mampu menyelesaikan semua RUU yang mereka rencanakan di awal periode

Bila melihat angka capaian fungsi legislasi diatas, apakah dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi HoR AS buruk, lebih buruk dari pada DPR RI? Bila DPR RI dapat "rapor merah" maka HoR AS "tidak naik kelas?" Pertanyaan tersebut, tentu tidak bisa dijawab hanya dengan menghitung jumlah UU yang dihasilkan. Kesimpulan yang diambil berdasarkan data kuantitatif seperti itu tidaklah valid. Supaya kesimpulan yang diambil valid, data kuantitatif harus dilengkapi dengan data kualitatif. Diantaranya: bagaimana posisi dan relasi parlemen, bagaimana proses perundang-undangan, bagaimana kualitas UU yang dihasilkan. Membandingkan ketiga Negara, ternyata, pertama, sistem Pemerintahan, sistem Parlemen, masa jabatan, jumlah kursi, inisiator RUU dan jumlah komite/Komisi di parlemen berbeda. Lihat Tabel 3. Kedua,

1 Recommended Benchmarks for Democratic Legislatures, Commonwealth Parliamentary Association, December 2006

2 Legislative Oversight and Budgeting – A World Perspective, Stapenhurst, Pelizzo R, Olson D, von Trapp L, World Bank Institute, 2008

3 Evaluating Parliament – A self-assessment toolkit for parliaments”, Inter-Parliamentary Union, 2008.

Tabel 3: Perbandingan Politik Legislasi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia

Indikator	Indonesia	Amerika Serikat	Australia
Sistem Pemerintahan	Presidensial	Presidensial	Parlementer
Sistem Parlemen	Soft Bikameral	Bikameral	Bikameral
Masa Jabatan	5 Tahun	2 Tahun	Maksimal 3 Tahun
Jumlah Kursi	696 kursi (560 Kursi DPR, 136 DPD)	535 kursi (435 kursi HoR, 100 HoS)	226 kursi (150 kursi HoR, 76 HoS)
Inisiator RUU	3 (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemerintah)	3 (House of Representative, House of Senate, Eksekutif)	2 (House of Representative, House of Senate)
Jumlah Komite / Komisi	11 Komisi DPR, 4 Komite DPD	HoR 26 Komite, HoS 25 Komite	31 Komite (HoR, HoS)

Sumber: kompilasi dari berbagai dokumen

BAGAN 1: TAHAPAN PEMBENTUKAN PERUNDANGAN DI INDONESIA



BAGAN 2: TAHAPAN PEMBENTUKAN PERUNDANGAN DI AMERIKA SERIKAT



proses pembentukan perundangan juga berbeda. Indonesia yang paling sederhana, sedangkan Amerika Serikat yang paling rumit. Apakah proses pembentukan perundangan yang relative sederhana di Indonesia menyebabkan DPR RI lebih mudah mencapai target legislasi dibandingkan Amerika Serikat? Dan, apakah proses yang rumit di Amerika Serikat menjamin bahwa UU yang dihasilkan tidak mudah dibawa ke MK (untuk dibatalkan atau diamandemen)? Yang jelas, UU yang dihasilkan oleh HoR di Amerika Serikat dan Australia hampir tidak ada yang di-judicial review dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sejak ditetapkan. Lihat Bagian 1, 2 dan 3.

Fungsi Anggaran

Secara teori, melakukan evaluasi terhadap fungsi anggaran lebih mudah bila dibandingkan dengan melakukan evaluasi terhadap fungsi legislasi karena variable dan indikatornya jelas. Seperti yang telah ditetapkan oleh paket UU tentang Keuangan Negara (UU No.17 /2003, UU No.1/2004, UU No.15/2004 dan UU No.25/2004) mengharuskan sistem perencanaan dan penganggaran dilakukan secara transparan, efisien dan akuntabel; selain menuntut adanya disiplin anggaran dan jaminan kesinambungan anggaran. Tetapi, karena issue anggaran sangat sensitif dan politis, secara praktik evaluasi fungsi anggaran menjadi tidak mudah. Bahkan, seringkali lebih sulit dibandingkan evaluasi fungsi legislasi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi transparansi informasi anggaran di Indonesia membanggakan. Survey *Open Budget Index* tahun 2012 yang dilakukan oleh *International Budget Partnership*⁴ menempatkan Indonesia pada peringkat terbaik pertama di Asia Tenggara dan peringkat terbaik kedua di Asia setelah Korea Selatan. Survey dilakukan di berbagai negara dengan menanyakan, beberapa diantaranya, apakah ada mekanisme tanya-jawab bagi publik

4 <http://survey.internationalbudget.org/#rankings> diakses 9/12/2014

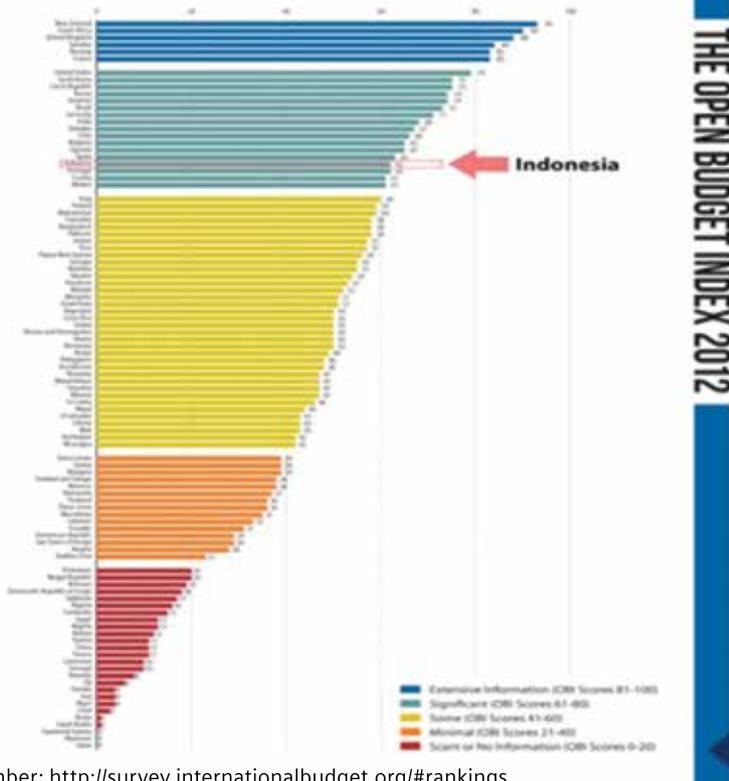
BAGAN 3: TAHAPAN PEMBENTUKAN PERUNDANGAN DI AUSTRALIA



yang berkaitan dengan anggaran, apakah ada mekanisme bagi publik untuk berpartisipasi, dan apakah ada lembaga independen yang ikut mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran. Lihat Gambar 1 dibawah.

Walaupun hasil survey tersebut membanggakan, efektivitas kinerja fungsi anggaran DPR [baca: Badan Anggaran] sangat perlu ditingkatkan. Lobby-negosiasi-intervensi politik harus ditiadakan. Salah satunya melalui pembentukan Kan-

Gambar 1: Peringkat Transparansi Informasi Anggaran



Sumber: <http://survey.internationalbudget.org/#rankings>

tor Anggaran (*Budget Office*). Kantor Anggaran diperlukan untuk (1) melakukan kajian tentang rencana kerja pemerintah, kebijakan dan prioritas anggaran, pokok-pokok kebijakan fiskal, analisis ekonomi makro; (2) membantu Badan Anggaran melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi APBN; (3) melakukan penelitian; (4) menyediakan informasi data yang memadai; (5) menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk mendapatkan informasi dan data yang *valid* dan *reliable*, seperti, lembaga penelitian, Universitas, Biro Statistik dan lainnya. Dengan adanya Kantor Anggaran, anggota Dewan dapat lebih fokus berperan sebagai "*authoritative allocation of values*" sehingga kepentingan rakyat diharapkan bisa lebih terlindungi. Untuk semakin menjamin bahwa setiap rupiah, baik sebagai pendapatan negara maupun belanja negara yang dikelola Pemerintah, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Di samping itu, setiap rupiah yang dikelola oleh Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, melalui wakilnya di DPR RI. Kantor Anggaran sebenarnya sudah sejak lama didirikan di berbagai Parlemen dunia. Di Amerika Serikat, "*The Congressional Budget Office (the CBO)*" sudah berdiri sejak tahun 1974, sebagai perwujudan *Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974*. *The CBO* kini diperkuat oleh 200 staff spesialis keuangan yang berpendidikan pascasarjana.⁵

Fungsi Anggaran Dewan bersifat otoritatif karena apabila Dewan tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan pemerintah, pemerintah harus menjalankan APBN tahun lalu. Senat di Australia juga memiliki kewenangan yang sama. Dalam model *strong bi-cameralism* dengan *sistem non-fix term* di Australia, Senate memiliki hak budget yang sangat menentukan. Apabila Senat dua kali menolak usulan pemerintah, maka terjadi *double desolution*, pemerintahan harus dibubarkan dan dalam waktu 36 hari sudah harus terben-

5 <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CDOC-110hdoc49/pdf/CDOC-110hdoc49.pdf> diakses 8/12/2014

APBNP 2014		APBN 2015
5,5		5,8
5,3		4,4
6,0		6,0
11.600		11.900
105		105
818		900
1.224		1.248

tuk pemerintahan baru, seperti yang terjadi pada masa PM Gough Whitlam pada tahun 1975 (Chusnul, 2014).

Fungsi Pengawasan

Secara kuantitatif, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI sangat baik karena banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Tetapi, secara kualitatif, terutama bila dilihat dari tindak-lanjut kegiatan pengawasan, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan masih dipertanyakan. Selama ini rekomendasi dan simpulan Dewan termasuk Tim di bawah koordinasi Langsung Pimpinan Dewan masih banyak yang belum ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Diantaranya adalah rekomendasi dan simpulan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No.11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No.21 tahun 2011 ten-

tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu rekomendasi Tim Aceh adalah mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan Perpres mengenai Penyerahan Kantor BPN menjadi perangkat daerah Aceh, namun sampai saat ini Perpres yang dimaksud belum dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan Tim Papua mendorong dilaksanakan Inpres No.5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, namun perlu diakui dampak dari Pelaksanaan *on top mechanism* mengenai alokasi dana otonomi khusus dan dana otonomi khusus infrastruktur belum optimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebenarnya secara kelembagaan, Dewan dapat menggunakan berbagai haknya (Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat) untuk mengawasi tindak lanjut dari rekomendasi dan simpulan yang sudah dihasilkan tetapi Dewan sangat berhati-hati untuk menggunakan hak tersebut.

Fungsi pengawasan dilakukan oleh Dewan, antara lain, melalui kegiatan rapat kerja, rapat dengan pendapat, dan rapat dengar pendapat umum, selain membentuk Tim pengawasan/tim khusus, dan melakukan kunjungan kerja (kunker). Dalam rangka fungsi pengawasan, DPR RI juga telah menindaklanjuti berbagai pengaduan yang datang dari masyarakat. Tugas ini dinyatakan dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s dan Pasal 79 huruf j serta Peraturan DPR RI No-

mor 01/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, serta Pasal 160 ayat (3) huruf f, di mana salah satu fungsi pengawasan DPR RI adalah merespons pengaduan masyarakat. Namun agaknya, Dewan kurang optimal dalam memanfaatkan teknologi Informasi. Padahal, Dewan dapat memperluas jangkauan Pengawasan dan meningkatkan kecepatan dalam memberikan tanggapan atas pengaduan Masyarakat melalui teknologi informasi.

Penutup

Mengukur kinerja DPR adalah pekerjaan yang mudah bila hanya menggunakan variable dan indikator kuantitatif. Menjadi sulit, bila harus mengkombinasikannya dengan variable dan indikator kualitatif. Program/ kegiatan yang sudah dilakukan dan produk yang sudah dihasilkan dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR RI banyak sekali. Bila semua itu diukur secara kuantitatif dapat disimpulkan bahwa kinerja DPR baik. Namun harus diingat bahwa pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi representasi DPR. Bila ditanya apakah program/ kegiatan yang dilakukan dan produk yang dihasilkan sudah benar-benar mencerminkan aspirasi konstituen yang diwakilinya dan mendukung visi yang diembannya, yaitu: "Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur" maka dapat disimpulkan kinerja DPR belum baik. Tetapi, yang paling memiliki hak otoritatif untuk menjawab adalah rakyat. Rakyat lah yang harus ditanya: apakah semua program/ kegiatan dan produk tersebut sudah tepat dan memberi manfaat? Karena rakyat yang senang dan puas akan memilih partai/kandidat yang sama lima tahun lagi, sama seperti pelanggan yang senang dan puas akan kembali lagi menjahitkan baju di tukang jahit yang sama.



Ketua DPR RI Marzuki Alie kunjungi korban banjir



PELAYANAN PENGOBATAN MASAL DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS JARINGANNYA
TAHUN 2013



ANGGARAN KESEHATAN BELUM MEMENUHI AMANAT UNDANG-UNDANG

Pembangunan kesehatan merupakan investasi terhadap modal manusia, yang dapat mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Tingkat kesehatan yang baik dan prima akan memungkinkan seseorang hidup lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, masyarakat dengan kesehatan prima memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berperan serta dalam pembangunan nasional, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Upaya penyediaan, pemeliharaan serta peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan bagi seluruh rakyat dengan prinsip: nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Selain sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa tingkat kesehatan yang baik, juga merupakan masukan bagi penurunan tingkat kemiskin-

Gambar 2. Skema Jaminan Kesehatan di Indonesia



Sumber : Suharto (2009) dengan modifikasi

an. Hubungan kausalitas antara kesehatan dan kemiskinan terjadi karena kesehatan memegang peranan besar dalam merubah status individu seseorang menjadi miskin atau mengangkatnya dari kemiskinan. Kondisi kesehatan yang buruk dapat menjadi salah satu faktor yang akan membawa seseorang pada lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan berpotensi besar membawa seseorang pada status kesehatan yang rendah.

Pelayanan kesehatan ini juga sesuai amanat konstitusi, yaitu pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan "setiap

Tabel 1. Anggaran Kesehatan, 2009-2015 (Miliar Rupiah)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
						APBN	RAPBN
I. Belanja Pemerintah Pusat	23,286.9	28,376.2	35,930.6	41,097.0	46,724.5	66,469.8	61,237.5
A. Melalui K/L	21,764.9	26,430.0	33,638.8	38,450.7	43,712.4	61,611.1	55,920.9
1. Kementerian Kesehatan	18,001.5	22,428.3	26,871.3	30,575.6	35,172.4	46,459.0	47,429.8
2. Badan POM	530.3	603.5	764.8	1,108.1	1,114.5	1,133.1	1,207.6
3. BKKBN	1,148.4	1,332.8	2,353.3	2,213.7	2,387.2	2,888.4	2,881.1
4. K/L Lainnya	2,084.6	2,065.4	1,358.4	2,397.9	2,543.7	11,092.0	2,009.5
4. Kementerian PU	1,270.7	1,142.5	535.2	1,343.7	971.1	8,827.8	817.3
5. Kementerian Pertanian	538.3	559.7	68.6	63.7	171.1	274.1	199.7
6. Kementerian Pertahanan	-	-	117.8	204.3	242.0	120.7	552.1
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	93.5	60.7	332.3	539.8	111.6
8. Kementerian PDT	-	-	24.1	7.7	4.6	329.9	5.4
9. BPPT	10.1	7.1	35.4	-	17.9	5.8	17.0
10. Kementerian Pemuda dan Olahraga	44.9	65.6	-	86.7	40.2	8.8	80.6
11. BP Batam	-	-	21.0	20.5	21.3	64.9	24.0
12. Kementerian Ristek	20.6	18.5	23.6	22.4	32.6	23.0	20.9
13. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	8.9	3.4	190.5	192.7	252.8	22.1	-
14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	9.7	174.3	319.2	387.4	513.7	83.6
15. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58.4	26.2	52.7	50.6	44.2	235.5	39.0
16. Kementerian Lingkungan Hidup	26.6	26.2	21.7	25.6	26.2	57.7	58.3
17. Kementerian Kelautan dan Perikanan	106.1	206.5	-	-	-	68.1	-
B. Melalui Belanja Non K/L	1,522.0	1,946.2	2,291.8	2,646.3	3,012.2	4,858.7	5,316.6
i. Subsidi Untuk Air Bersih	-	-	-	-	0.0	20.0	0.0
ii. Askes PNS dan Tunj Kes Veteran	1,522.0	1,946.2	2,291.8	2,646.3	3,009.5	4,838.7	5,304.3
II. Melalui Transfer ke daerah	6,024.5	4,640.7	5,077.3	5,478.9	6,008.1	4,017.2	6,895.6
1. DAK Kesehatan	3,999.3	2,805.5	2,949.8	2,985.8	3,009.1	3,129.9	3,398.2
2. DAK Sanitasi	568.6	354.1	412.5	460.6	552.5	-	900.4
3. DAK Keluarga Berencana	327.5	326.2	361.8	389.7	429.7	-	502.6
4. Perk dari Dana Otsus	1,129.0	1,154.9	1,353.2	1,642.9	2,016.8	887.3	2,094.4
III. Total Anggaran Kesehatan	29,311.4	33,016.9	41,007.9	46,575.9	52,732.7	70,487.0	68,133.2
<i>Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara</i>	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	3.8	3.4

Sumber: Kementerian Keuangan

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dalam implementasinya, Undang-undang No 36 Tahun 2009 Republik Indonesia Tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

Tentunya, pelayanan kesehatan

ini tak lepas dari alokasi anggaran. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengamanatkan besarnya alokasi anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN diluar gaji. Namun ironisnya, dalam implementasinya, amanat tersebut belum dapat terlaksana, bahkan sempat mengundang pengajuan permohonan uji materiil terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun

2012 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Dalam rentang waktu 2009-2014, besarnya anggaran kesehatan yang dipetakan pemerintah masih berkisar 3,1-3,4% terhadap APBN. Meskipun demikian, dalam rentang waktu tersebut terjadi peningkatan anggaran kesehatan hingga mencapai 140%. Dan dari sejumlah tersebut, rata-rata sekitar 12-13% telah dialokasikan melalui transfer ke daerah dan sisanya dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat.

Anggaran sektor kesehatan terhadap PDB menunjukkan kemampuan Pemerintah dalam memobilisasi potensi ekonomi negara yang ada. Selama periode 2005-2012, persentase anggaran kesehatan Indonesia terhadap GDP cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Persentase anggaran kesehatan Indonesia

Tabel 2. Anggaran Kesehatan Terhadap GDP Indonesia dan Beberapa Negara (%)

NEGARA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Thailand	3.5	3.5	3.6	3.9	4.1	3.8	4.1	3.9
Malaysia	3.2	3.6	3.5	3.4	3.9	4	3.8	3.9
Indonesia	2.8	2.9	3.1	2.8	2.8	2.9	2.9	3
Filipina	3.9	4	3.9	3.8	4.3	4.2	4.4	4.6
Vietnam	5.9	6.5	7.1	6	6.5	6.9	6.8	6.6
Myanmar	2.1	2	1.9	2	2.1	1.9	1.8	1.8
Rwanda	6.1	10	10	10.1	10	10.8	11	10.7
Tanzania	4	6.5	5.7	5.4	5.6	7.2	7.4	7
Liberia	8	10.9	10.2	11.8	14.4	13.1	15.6	15.5
Cili	6.6	6.2	6.4	6.8	7.5	7.1	7.1	7.2
Ethiopia	4.1	4.2	4.8	4.3	4.5	4.7	4.1	3.8
Timor Leste	7.3	10.6	8	8.6	6.8	5.6	4.6	4.3

Sumber : World Bank

Ketersediaan Versus Kebutuhan Tenaga Kesehatan Tahun 2013



masih dibawah persentase negara-negara Asia, terkecuali Myanmar. Bahkan, persentase anggaran kesehatan Indonesia tidak lebih baik dibandingkan beberapa negara berpendapatan rendah di Afrika. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih terdapat potensi sumberdaya ekonomi yang masih dapat dimobilisasi oleh pemerintah untuk sektor kesehatan.

Pencapaian Indikator Kesehatan Indonesia

Pembangunan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Dalam tahun 2010-2013, jumlah fasilitas kesehatan cenderung meningkat. Meskipun rasio jumlah Puskesmas per 100.000 penduduk mengalami sedikit penurunan, namun rasio jumlah tempat tidur di

rumah sakit per 100.000 penduduk meningkat cukup signifikan, yaitu dari 68,88 persen di tahun 2010 menjadi 107,39 persen di tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fasilitas kesehatan yang tersedia untuk menampung pasien semakin besar.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada jumlah tenaga kesehatan. Rasio beberapa jenis tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, dokter umum, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat, telah memenuhi target renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014. Namun demikian, masih terdapat kekurangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan juga terlihat dari pencapaian indikator derajat kesehatan. Beberapa indikator derajat kesehatan menunjukkan adanya perbaikan. Namun demikian, data menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan, baik dalam rencana strategis (renstra) Kementerian

Tabel 3. Kondisi Data Derajat Kesehatan di Indonesia

No	Derajat Kesehatan	2010	2011	2012	2013	Keterangan
1	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	34		32		SDKI 2007, 2012
2	Angka kematian neonatal (per 1000 kelahiran hidup)	19		19		SDKI 2007, 2013
3	Angka kematian balita (per 1000 kelahiran hidup)	44		40		SDKI 2007, 2014
4	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	228		359		SDKI 2007
5	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,43	69,65	--	--	Badan Pusat Statistik
6	Annual parasite incidence/ API (per 1000 penduduk)	1,96	1,75	1,69	--	Ditjen PP & PL
7	CDR (case detection rate- angka penemuan kasus TB) (%)	79,30	83,5	82,4	38,4**	Ditjen PP & PL
8	CNR kasus baru (BTA positif, BTA negatif&ekstra paru) (per 100.000 penduduk)			82,38	62**	Ditjen PP & PL
9	CNR semua kasus (per 100.000 penduduk)			135,21	64**	Ditjen PP & PL
10	Success rate (SR) TB (%)	91,00	90,3	90,2	80,8**	Ditjen PP & PL
11	Kasus baru AIDS ditemukan	6.845	7.004	5.686	460*	Ditjen PP & PL
12	Kasus baru HIV ditemukan	21.591	21.031	21.511	5.368*	Ditjen PP & PL
13	Kasus kumulatif AIDS	24.131	37.201	42.887	43.347*	Ditjen PP & PL
14	Kasus kumulatif HIV		76.879	98.39	103.739*	Ditjen PP & PL
15	Non polio (acute flaccid paralysis) AFP rate (per 100.000 anak<15 tahun)	2,62	2,74	2,77		Ditjen PP & PL
16	Angka insiden (incidence rate) IR DBD (per 100.000 penduduk)	65,70	27,56	37,11		Ditjen PP & PL
17	Case fatality rate (CFR) DBD (%)	0,87	0,91	0,90		Ditjen PP & PL
18	Jumlah penderita filariasis	11.969	12.066	11.982		Ditjen PP & PL
19	Angka penemuan penyakit kusta per 100.000 penduduk	7,22	8,08	6,59		Ditjen PP & PL

Sumber : Kementerian Kesehatan *) Tahun 2013 data per triwulan I **) Tahun 2013 data per triwulan II

Kesehatan tahun 2014 maupun target MDGs 2015.

Misalnya, di tahun 2012, angka kematian bayi masih berada di angka 32, angka ini hanya turun tipis dari tahun 2010. Bila melihat pada pencapaian tersebut, maka diperlukan upaya keras untuk mencapai target Renstra Kementerian kesehatan sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup, dan target MDGs sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup. Demikian pula indikator angka kematian ibu tahun 2012 yang mengalami kenaikan dari tahun 2010. Kondisi ini jelas membutuhkan usaha yang tidak ringan untuk mencapai angka yang ditargetkan dalam MDGs, yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada beberapa indikator lainnya.

Jaminan Kesehatan Nasional Versus Kartu Indonesia Sehat

Upaya untuk mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai program jaminan kesehatan telah dilakukan pemerintah. ILO (*International Labour Organization*) mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat tujuh skema jaminan kesehatan yang ada dan pernah ada di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peme-

rintah mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai berlaku pada tahun 2014. Selanjutnya, periode pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN. Kedua program ini sama-sama bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh untuk setiap rakyat Indonesia.

Pada tahap ini, Kartu Indonesia Sehat mencakup 86,4 juta jiwa keluarga miskin penerima bantuan iuran JKN, dan 32,9 ribu jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Bersama dengan program bantuan keluarga sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar, cakupan peserta Kartu Indonesia Sehat secara bertahap diperluas kepada 15,5 juta keluarga yang termasuk dalam 25 persen penduduk dengan status Sosial Ekonomi terendah.

Anggaran yang digunakan untuk penyediaan Kartu Indonesia Sehat menggunakan anggaran yang telah tersedia dalam APBN 2014. Anggaran yang digunakan merupakan dana cadangan perlindungan sosial dan dana cadangan resiko fiskal dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN), yaitu ba-

gian anggaran yang belum dianggarkan dalam anggaran ke Kementerian dan Lembaga, dan dapat digunakan untuk prioritas pembangunan nasional. Sedangkan pembiayaan nilai manfaat KIS 2014 menggunakan anggaran bagi penerima bantuan iuran (PBI) kesehatan yang telah dialokasikan dalam APBN 2014 untuk penyelenggaraan JKN. Anggaran tersebut dialokasikan melalui DIPA Kementerian Kesehatan untuk 86,4 juta orang.

Dengan berbagai program yang diluncurkan pemerintah, diharapkan dapat mendekatkan akses terhadap kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keluarga miskin. Yang menjadi penting juga adalah bahwa pengalokasian anggaran kesehatan dapat memenuhi amanat Undang-undang Kesehatan tanpa mengenyampingkan kemampuan anggaran negara dan prioritas pembangunan.

Ditulis oleh:

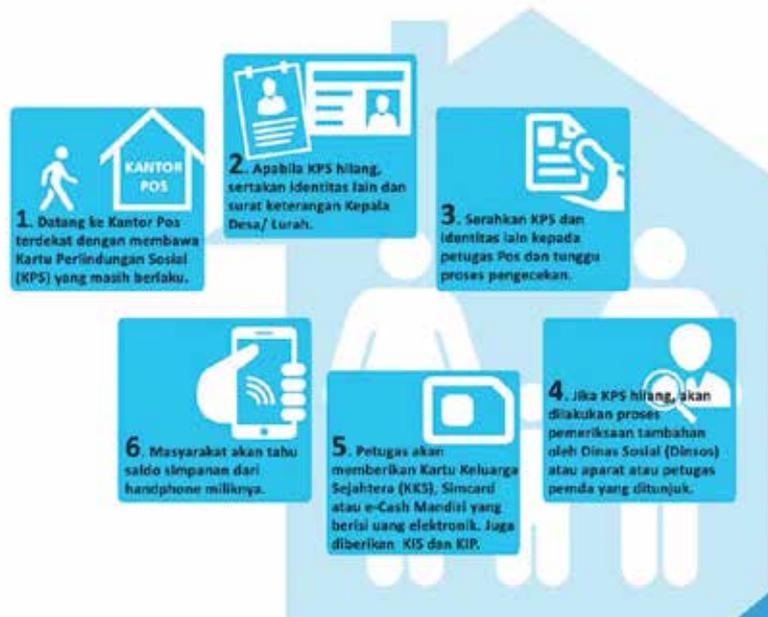
Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setjen DPR RI, Setyanta Nugraha

Analisis APBN Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setjen DPR RI, Titik Kurnianingsih

Disunting oleh: sf/parle

CARA MENGURUS KIS dan KKS

TIP Gunakan Uang
Gunakan bantuan
simpanan secara
bijak untuk kegiatan
produktif, misal untuk
sekolah dan menjaga
kesehatan anggota
keluarganya dan sisakan
sebagian untuk simpanan.





Kebijakan Energi

Suasana Rapat Paripurna DPR RI ke XVII mengenai Laporan Komisi VII terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Foto: Andri



Keluhan Nelayan

Komisi VII DPR RI pantau dampak kenaikan BBM bagi nelayan di SPBN Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Foto: Agung



Ceria bersama anak pulau

Tim Kunker Komisi V ke Labuan Bajo NTT. Foto: Ayu



Kanal Banjir Siak

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR meninjau Sungai Siak, Riau sebagai kanal banjir untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya. Foto: Rizka



Bukan Ninja

Tim Kunker Komisi VI meninjau pengolahan ikan tuna di cold storage PT Harta Samudera, dilanjutkan TPI dan Los Sayur di Pasar Mardika, Ambon. Foto: Ibnur Khalid





Nyaris Terjerembab

Anggota Komisi X periode 2009-2014, Harbiah Salahuddin hampir terjatuh dari kapal ketika melakukan kunjungan kerja di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Foto: Sofyan



Serius

Tim Kunker Komisi V DPR RI serius mendengarkan penjelasan Kepala KSOP Bena Bali. Foto: Suciati



Peduli Banjarnegara

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti kunjungi lokasi dan korban bencana longsor Banjarnegara. Foto: Husen





Rumput Laut

Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Siti Hediati Soeharto meninjau petani rumput laut di desa Laikang Kabupaten Takalar, Sulsel. Foto: Iwan Armanias





Kesiapan Pelabuhan

Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Muhidin M. Said meninjau Pelabuhan Bitung Sulawesi Utara dalam rangka persiapan Natal dan Tahun Baru. Foto: Eka Hindra



GAYA HIDUP SEHAT

Dr. Naharus Surur, M.Kes (Konsultan Kesehatan/Wakil Ketua Baznas)

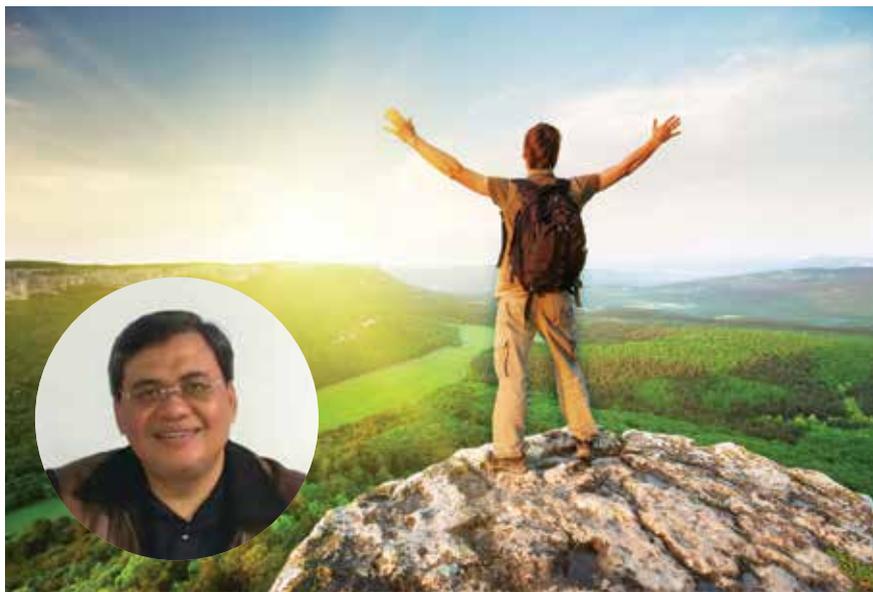
Paradigma Sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik. Manusia tidak dipandang dan dijadikan sebagai obyek kesehatan, namun sebagai subyek sehingga kesehatan menjadi modal utama bagi manusia yang sangat vital.

Melihat masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor, pembangunan kesehatan akan berhasil manakala dijadikan sebagai *mainstream* pembangunan. Sukses tidaknya kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan dari sektor-sektor lain. Jangan dianggap bahwa kesehatan itu hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja, dalam hal ini Kemenkes, namun ditentukan oleh kerjasama dari sektor-sektor yang lain.

Menurut Hendrick L. Blumm, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat atau perorangan, yaitu: perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan dan keturunan.



Dari ke 4 faktor di atas ternyata pengaruh perilaku/gaya hidup cukup besar diikuti oleh pengaruh faktor lingkungan, pelayanan kesehatan dan keturunan. Ke empat faktor di atas sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Menurut teori lama H.L. Blum (1956), gaya hidup atau perilaku itu hanya berpengaruh kurang dari 50% terhadap status derajat hidup perseorangan



dan masyarakat. Akan tetapi di era digital seperti sekarang, para ahli kesehatan dunia generasi saat ini, memberikan bobot yang sangat besar terhadap pengaruh gaya hidup tersebut lebih dari 75% dibanding 3 faktor yang lain.

Gaya hidup/perilaku yang sehat pada level individu akan menunjang meningkatnya derajat kesehatan pada level masyarakat dan negara, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Gaya hidup seperti apa dan bagaimana mewujudkannya itulah yang ingin diuraikan dalam tulisan kali ini secara bersambung.

Lingkungan yang mendukung gaya hidup bersih juga berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam kehidupan di sekitar kita dapat kita rasakan, daerah yang kumuh dan tidak dirawat biasanya banyak penduduknya yang mengidap penyakit seperti: gatal-gatal, infeksi saluran pernafasan dan infeksi saluran pencernaan. Penyakit Demam Berdarah juga dipengaruhi oleh faktor ling-

kungan. Lingkungan yang tidak bersih, banyaknya tempat penampungan air yang tidak pernah dibersihkan menyebabkan perkembangan nyamuk aedes aegypti penyebab demam berdarah meningkat. Hal ini menyebabkan penduduk di sekitar memiliki risiko tergigit nyamuk dan tertular demam berdarah.

Ketersediaan fasilitas dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat perwujudan derajat kesehatan masyarakat. Dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata dan terjangkau akan meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas tentunya harus ditopang dengan tersedianya tenaga kesehatan yang merata dan cukup jumlahnya serta memiliki kompetensi di bidangnya.

Banyak penyakit-penyakit yang dapat dicegah, namun sebagian penyakit tidak dapat dihindari, seperti penyakit akibat dari bawaan atau keturunan. Semakin besar penduduk yang memiliki

risiko penyakit bawaan akan semakin sulit upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Oleh karena itu perlu adanya konseling perkawinan yang baik untuk menghindari penyakit bawaan yang sebenarnya dapat dicegah munculnya. Akhir-akhir ini teknologi kesehatan dan kedokteran semakin maju. Teknologi dan kemampuan tenaga ahli harus diarahkan untuk meningkatkan upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pola Gaya Hidup Sehat

Gaya hidup (*lifestyle*) adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat, dan opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status sosialnya. Gaya hidup merupakan 'frame of reference' yang dipakai seseorang dalam bertindak laku dan konsekuensinya akan membentuk pola perilaku tertentu. Terutama bagaimana dia ingin dipersepsikan oleh orang lain, sehingga gaya hidup sangat berkaitan dengan status sosial yang disandangnya.

Gaya hidup sehat adalah segala kebiasaan dan perilaku yang ditunjukkan dalam kerangka mencapai status kesehatan individu dan masyarakat yang baik. Gaya hidup sehat meliputi pola nutrisi (makanan dan minuman sehat), pola aktivitas (olah raga dan aktivitas sehari-hari termasuk kerja), pola istirahat (tidur dan rehat sesaat), pola mengatasi stress, dan pola pikir & ibadah. Gaya hidup sehat ini akan dijelaskan secara detail satu persatu di bawah ini;

Pertama, Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Nutrisi yang baik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air dan mineral.

Penelitian dibidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang



Kesebelasan Anggota DPR RI bertanding melawan kesebelasan wartawan

optimal. Pada masa lalu, penelitian mengenai nutrisi hanya terbatas pada pencegahan penyakit kurang gizi dan menentukan standar kebutuhan dasar nutrisi pada makhluk hidup. Angka kebutuhan nutrisi (zat gizi) dasar ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Recommended Daily Allowance* (RDA).

Seiring dengan perkembangan ilmiah dibidang medis dan biologi molekular, bukti-bukti medis menunjukkan bahwa RDA belum mencukupi untuk menjaga fungsi optimal tubuh dan mencegah atau membantu penanganan penyakit kronis. Bukti-bukti medis menunjukkan bahwa akar dari penyakit kronis adalah 'stress oksidatif' yang disebabkan oleh berkelebihannya 'radikal bebas' di dalam tubuh.

Penggunaan nutrisi dalam level yang optimal, dikenal dengan *Opti-*

mal Daily Allowance (ODA), terbukti dapat mencegah dan menangani stress oksidatif sehingga membantu pencegahan penyakit kronis. Level optimal ini dapat dicapai bila jumlah dan komposisi nutrisi yang digunakan tepat. Dalam penanganan penyakit, penggunaan nutrisi sebagai pengobatan komplementer dapat membantu efektifitas dari pengobatan dan pada saat yang bersamaan mengatasi efek samping dari pengobatan. Karena itu, nutrisi/gizi sangat erat kaitannya dengan kesehatan yang optimal dan peningkatan kualitas hidup. (Wikipedia)

Namun dalam kenyataannya ODA itu tidak hanya bersifat komplementer dalam mengefektifkan pengobatan dan mengeliminasi efek obat. Akan tetapi, dia juga sangat efektif dalam terapi untuk penyakit-penyakit akut maupun kronis. Banyak sekali para dokter dan tenaga



kesehatan baik yang ada di dalam maupun luar negeri yang membuktikan kehebatan terapi nutrisi ini. Kebanyakan orang hanya tahu terapi nutrisi lebih kearah pengelolaan obesitas (kegemukan), dan memang sangat efektif mengatasi masalah obesitas ini.

Bila pemilihan nutrisi ini benar baik dalam komposisinya, apakah itu keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air dan mineral berbanding dengan kebutuhan manusia sesuai dengan daerah dan jenis profesinya. Maka hal tersebut, akan sangat berpengaruh positif terhadap kesehatan seseorang.

Pemilihan jenis nutrisi menjadi pilihan utama dalam kerangka untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan tubuh. Bila pemahaman ini tidak dimiliki oleh kita bersama, maka akan berakibat buruk terhadap kesehatan baik dalam

jangka pendek maupun panjang.

Kita sering mengabaikan apakah jenis makanan murni (asli tanpa olahan/ makanan *fresh*), ataupun makanan olahan yang harus kita konsumsi setiap hari. Kebanyakan dari kita ternyata lebih banyak memilih makanan olahan (makanan yang sudah ditambah dengan berbagai zat kimiawi, dimasak dan dikemas dengan kaleng/plastik dll), dengan alasan praktis dan telah dipromosikan/ diiklankan dengan besar-besaran seolah-olah makanan tersebut bergizi baik. Padahal makanan olahan tersebut, sudah ada intervensi atau campur tangan manusia sesuai dengan selera dan asumsi gizi yang baik buat tubuh, namun ternyata dalam waktu yang lama makanan olahan tersebut berdampak buruk terhadap tubuh manusia.

Kedua, jenis karbohidrat yang sesuai dengan anatomi tubuh ma-

nusia, adalah karbohidrat kompleks (karbohidrat yang dicerna dan diserap oleh tubuh secara perlahan-lahan, seperti beras merah/ gandum/ kacang-kacangan/ polong-polongan/ buah-buahan/ sayur-sayuran dll), bukan jenis karbohidrat simple/ sederhana (karbohidrat yang cepat dicerna/ diserap oleh tubuh, seperti makanan olahan/ gula putih/ tepung putih/ beras putih dll).

Jenis lemak yang dibutuhkan tubuh adalah lemak essential/ tak jenuh yang terdapat pada minyak omega 3 (berasal dari ikan pedalaman/ ikan salmon/ikan liar di laut dalam/ikan segar/ ikan berukuran kecil), namun juga bisa berasal dari minyak jagung, minyak kedelai, minyak rami, kacang-kacangan, biji-bijian seperti kenari, minyak zaitun, alpukat, telur dll. Sementara jenis lemak yang kedua adalah lemak jenuh yang kebanyakan harus kita hindari, yang terdapat pada daging berwarna merah, makanan yang terbuat dari susu, jerohan dll.

Ketiga adalah lemak Trans atau lemak terhidrogenasi yang harus dihindari untuk dikonsumsi. Ini adalah lemak buatan manusia yang relatif baru yang tujuan awalnya untuk memproduksi mentega buatan dari minyak nabati pada saat terjadi pakeklik. Ide awalnya sangat bagus, namun produk lemak Trans ini seperti margarin atau mentega ternyata sangat beracun bagi tubuh manusia karena menghalangi metabolisme dan menambah berat badan.

Sementara jenis protein yang baik untuk kebutuhan tubuh kita berasal dari; kacang-kacangan, polong-polongan, kedelai (tahu, tempe dll), biji-bijian, telur, daging berwarna putih, ikan, daging sapi dan kambing yang organik (pemakan rumput-rumputan).

Vitamin adalah bahan organik, sementara mineral adalah bahan an-organik. Kedua nutrisi esensial ini bekerja saling melengkapi dalam menjalankan mereka masing-masing. Ada yang berasal dari makanan yang kita makan dan air yang kita minum, namun ada juga yang harus dikonsumsi dari suplemen luar. (*)

foto: andri/parle/hr



Fahri Hamzah

Dari Aktivistis Kampus ke Parlemen

Tuturnya lugas apa adanya. Pandangannya visioner, menunjukkan kapasitas intelektualnya yang mumpuni. Di tengah kesibukan bekerja, ia menerima kehadiran Parlemenaria dengan penuh keramahan. Inilah Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS. Kepada Parlemenaria ia berbagi cerita menarik tentang masa kecilnya di kampung dan nostalgianya menjadi aktivis kampus.

Bicara soal ekonomi Islam dan dunia dakwah, pria Sumbawa ini sangat tepat diajak berbincang. Sebagai aktivis kampus, pergaulannya sangat luas, hingga mengantarkannya ke panggung politik nasional. Fahri pernah menjadi Anggota MPR RI Utusan Golongan dari unsur pemuda pada 1998-1999. Ia diminta oleh Presiden Habibie waktu itu untuk menjadi anggota MPR.



Foto kenangan bersama sang Ayah (Fahri duduk)

Anak Petani

Utan, Sumbawa Besar, 1971. Sebuah kecamatan di pesisir Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di situ ada nama kampung yang unik bernama "Jorok". Terdengar tak enak, memang. Tapi, *jorok* dalam bahasa Sumbawa berarti sudut. Itu adalah kampung yang sangat asri dan permai. Topografinya memang dekat dengan pantai. Tapi, di kedalaman pulau masih ada hutan yang rapat dan lebat. Belum ada listrik yang menerangi kampung kala itu.

Masyarakatnya mengidentifikasi diri sebagai orang pesisir. Sebagai orang pesisir vokal Fahri terdengar keras, itu lantaran saat bicara suaranya harus selalu lebih keras daripada suara ombak. Mayoritas

berprofesi sebagai nelayan, disusul kemudian petani, perambah hutan, pedagang, dan pegawai pemerintahan. Pantai dan laut tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Sungai-sungai mengalir begitu jernihnya. Hamparan sawah membentang sejauh mata memandang. Orang-orang desa masih mengambil air minum dari sungai yang jernih.

Hutan yang lebat juga memberikan sumber penghidupan yang sangat kaya bagi penduduk setempat. Di kampung ini terkenal juga dengan hasil padi hutan yang dibudidayakan para perambah hutan. Rasa berasnya ternyata lebih enak daripada yang ditanam di sawah. Para perambah kerap membuka hutan dengan menanam padi.

Ketika mentari pagi mulai menampakkan diri dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, penduduk di kampung Jorok, Utan, Sumbawa, mulai bergegas untuk beraktivitas. Para nelayan mengayuh perahunya ke tengah laut, membentangkan jala untuk menangkap ikan. Para petani ke ladang masing-masing, merawat tanaman budidayanya. Para pedagang pun mulai menjajakan dagangan ke pasar-pasar tradisional dan pusat keramaian dadakan yang muncul setiap musim.

Adalah Hamzah Ahmad dan Siti Nurjannah, sepasang insan penduduk kampung Jorok, Utan, yang hidupnya sederhana dan sangat religius. Hamzah adalah seorang petani yang sebelumnya pernah menjadi guru. Sementara Nurjannah adalah wanita sederhana yang kerap membantu ekonomi keluarga dengan menjual makanan rumahan dan pandai menjahit. Sepasang insan ini sedang berbahagia, karena segera dikarunia anak kelima.

Saat itu, musim kampanye pemilu 1971. Seluruh pelosok Tanah Air sedang ramai dengan pesta demokrasi lima tahunan di masa Orde Baru. Tak ketinggalan, di Utan, Sumbawa juga ramai dengan panggung kampanye. Atribut kampanye bertebaran meramaikan suasana kampung. Syahdan, tepat di hari pencoblosan, ketika semua warga kampung dan keluarganya berbondong-bondong

mendatangi bilik suara, Nurjannah justru sedang bersusah payah menjalani persalinan seorang diri di rumahnya.

Tanpa bantuan siapa pun, tampaknya ia terbiasa melakukan persalinan sendiri. Tahmid tiada henti terucap, mensyukuri jabang bayi yang mungil terlahir. Berjenis kelamin laki-laki, tangis bayi memecah ketegangan dan kesunyian di rumah kayu sederhana tersebut. Tradisi di kampung setempat, setiap anak yang lahir selalu ditulis di tiang rumah yang terbuat dari kayu untuk menandakan masa kelahiran.

Kini, di rumah Hamzah dan Nurjannah kedatangan jagoan kecil yang menggemaskan, melengkapi kehadiran empat anak sebelumnya. Bayi mungil itu kemudian diberi nama Fahri yang berarti "kebanggaanku". Fahri kecil tumbuh menjadi anak yang sehat, periang, dan suka bermain. Ia tumbuh di lingkungan keluarga dan masyarakat religius. Setelah kelahiran Fahri, masih ada 3 adiknya yang lahir kemudian. Jadi Fahri adalah anak kelima dari delapan bersaudara.

Bersama sahabat-sahabat kecilnya, ia suka sekali bermain ombak di pantai. Mancing ikan dan mandi di laut hampir menjadi kesehariannya. Kadang, ia bermain ke tambak milik tetangganya, melihat ikan bandeng yang sedang dipanen. Pemilik tambak suka memberi ikan bandeng, lalu bersama sahabat-sahabatnya dibakar dan disantap beramai-ramai. Tak ketinggalan sungai yang sangat jernih, jadi tempat bermain.

Sungainya sangat kaya dengan ikan, kerang, kepiting, dan udang. Untuk menangkap semuanya itu, Fahri dan para sahabat kecilnya tak perlu pancing. Cukup ditangkap dengan tangan kosong saja. Selain laut dan sungai, hutan juga menawarkan kekayaan lainnya, berupa buah-buahan yang langsung bisa dinikmati. Senang rasanya mengingat masa kecil di kampung. "Kalau kita main itu, tentu dikaitkan dengan hutan, laut, dan sungai," kata Fahri, mengenang masa kecil.

Bicara permainan favorit masa kecil, Fahri suka bermain gundu, adu ayam, dan petak umpet. Di kam-

pungnya juga ada tanah lapang tempat Fahri dan para sahabatnya bermain bola. Hampir semua permainan di tanah lapang, ia sangat suka. Ketika menginjak usia SMP, Fahri bahkan suka catur. Ia tergila-gila dengan catur. Setiap kali melihat orang nganggur, ia hampir lalu membuka papan catur dan mengajaknya bertarung.

"Waktu SMP suka sekali main catur. Saya dibeliin catur oleh abang saya. Jadi, ke mana-mana saya bawa papan catur itu," kenangnya, penuh tawa. Mengawali pendidikan formalnya, Fahri bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, tahun 1978. Ia siswa yang cerdas. Selalu menempati ranking pertama di kelasnya hingga lulus SMA. Hampir semua pelajaran di sekolahnya ia suka, terutama mata pelajaran bahasa Indonesia.

Anak-anak sekolah di kampungnya terbiasa berjalan kaki ke sekolah, karena memang tak ada angkutan umum di sana. Angkutan umum hanya ada delman yang di

Sumbawa disebut cidomo atau do-
kar. Pulang sekolah, biasanya Fahri langsung bermain ke laut, sungai, atau hutan. Di kampungnya tak ada yang membahayakan anak-anak untuk bermain. Bahkan, Fahri pernah bermain ke tengah hutan hingga malam.

Selepas Magrib, Fahri belajar agama dan membaca Al Quran pada ayahnya. Kebetulan sang ayah dahulunya adalah aktivis Masyumi. Bila malam tiba, kampung jadi gelap gulita tanpa penerangan. Rumah-rumah penduduk hanya diterangi lampu templok. Tak ada aktivitas belajar malam, apalagi hiburan malam. Kampung sangat sunyi bila malam tiba. Begitulah aktivitas anak seorang petani di kampung.

Malam di kampungnya baru ramai bila ada perhelatan kampanye pemilu, layar tancap, atau MTQ saja. Suasana seperti itu biasanya sangat disukai Fahri. Di keramaian MTQ, misalnya, ia suka membantu ibundanya menjajakan makanan di tengah keramaian. Ibundanya sangat

piawai masak. Penganan apa saja yang bisa menghasilkan uang, selalu dibuat ibunya. Fahri kecil pernah menjajakan kue mangkok, keripik singkong, gula-gula, dan lain-lain.

Aktivis Kampus

Setamat SD tahun 1984, Fahri melanjutkan ke SMP Muhammadiyah. Prestasi cemerlangnya terus berlanjut di SMP yang tak jauh dari rumahnya. Waktu terus bergulir mengganti hari-hari Fahri di kampung. Tahun 1987 lulus SMP dan melanjutkan ke SMA Muhammadiyah. Dari SD sampai SMA selalu bersekolah di Muhammadiyah. Itu lantaran masyarakat di kampungnya mayoritas Muhammadiyah.

"Sekolah yang bagus di sana, ya sekolah Muhammadiyah. Keluarga saya dari Masyumi, tidak ada cerita menyekolahkan anak di sekolah pemerintah. Muhammadiyah institusi yang sangat dominan di sana. 13 tahun saya sekolah di Muhammadiyah," ungkap Fahri. Selama bersekolah SMP hingga SMA, Fahri





Foto kenangan saat Fahri kecil bersama saudara-saudaranya (Fahri berdiri paling kiri)

sudah memahami pentingnya bahasa asing untuk meningkatkan kapasitas pergaulannya kelak.

Ketika masih di kampung, ia suka sekali mendengarkan siaran berita berbahasa Inggris dari Radio ABC Australia. Dia dengarkan perkembangan informasi dunia lewat radio sambil mempelajari bahasanya. Dengan begitu, kemampuan berbahasanya terus meningkat dan kapasitas intelektualnya terasah. Setamat SMA tahun 1990, Fahri kuliah

di Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, NTB. Fakultas itu yang terbaik dan favorit di kampusnya.

Masa kuliah di NTB tak menyenangkan hati pemuda Fahri. Ia merasa terkungkung oleh lingkungan yang membuatnya jenuh. Tak ada kemajuan berarti dari sisi peningkatan intelektualitas dan pergaulan. Ia ingin bergaul dengan orang-orang besar di Kota Jakarta. Ia ingin mendapatkan pergaulan yang bermutu untuk meningkatkan

kapasitas intelektual dan karirnya.

Atas saran kawan kuliahnya, Fahri diminta mendaftar kuliah di UI, Jakarta. Pemuda Fahri kemudian mengikuti bimbingan belajar kembali agar bisa lulus tes perguruan tinggi ternama di Indonesia itu. Keinginan merantau ke Jakarta sudah tak terbendung. Tekad sudah kuat. Tapi, masih ada yang mengganjal niatnya itu. Ibundanya merasa berat hati bila Fahri harus meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Apalagi di rumahnya anak laki-laki cuma dua orang selebihnya perempuan.

Tapi, pemuda Fahri tetap pada pendirian yang diyakininya benar. Ia ingin mendapatkan pencerahan dan meraih sukses di Ibu Kota. Doa dan impian terkabul. Ia diterima di Fakultas Ekonomi UI, tahun 1992. Fakultas bergengsi dan elit. Waktu itu kampusnya masih di Salemba, Jakarta Pusat. Pemuda Fahri tinggal di Masjid Arif Rahman Hakim, masjid kampus. Ia menjadi pengurus masjid dan aktif dalam berbagai kegiatan dakwah kampus.

Tak ketinggalan, ia juga membina taman kanak-kanak di masjidnya. Bahkan, anak-anak jalanan di sekitar kampus, dia bina pula. Pemuda Fahri bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Apalagi, penguasaan bahasa asing dan kepiawaiannya berkomunikasi, membuatnya begitu mudah bergaul dengan kalangan elit terdidik di Jakarta.

"Bahasa menentukan kapasitas pergaulan kita. Jadi, ketika sudah bisa berbahasa Inggris, mulai bisa bergaul dengan orang Jakarta. Itu mengantarkan saya pada komunikasi yang lebih luas, apalagi kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Di situ dikenal tempat anak orang-orang kaya. Kayaknya gagah banget kalau sudah bergaul dengan orang Jakarta," ujar Fahri, tersenyum.

Setahun tinggal di Salemba, kampus UI ternyata dipindah ke Depok, Jawa Barat. Fahri tak bisa lagi dekat dengan masyarakat di sekitar Salemba. Di Depok justru ia sibuk dengan aktivitas perkuliahan dan kegiatan kampus. Dosen pembimbingnya ketika masuk UI adalah Sri



Fahri di ruang kerja



Foto kenangan saat Fahri menikah dengan Farida Briani, tahun 1997

Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan. “Sri Mulyani mengajar mikro ekonomi dan agak pelit kalau kasih nilai,” mengenang sang dosen.

Hampir semua kegiatan kampus diikuti. Fahri ternyata lebih sibuk sebagai aktivis kampus daripada mengikuti perkuliahan. Karena jarang masuk kuliah, Fahri sempat ditegur Sri Mulyani, karena nilainya terus turun. “Nilai kamu pas-pasan, nih. Kamu kebanyakan baca koran daripada teks kuliah,” ungkap Fahri, mengutip pernyataan Sri Mulyani.

Di kampus, Fahri dan kawan-kawan aktivis pers mahasiswa, aktif menerbitkan Warta UI, koran kampus yang sangat kritis. Koran tersebut kemudian dibredel karena menulis sisi gelap rektorat. Selain



Foto bersama keluarga tercinta, hidup bahagia

di pers mahasiswa, Fahri juga pernah menjadi Humas dan juga Ketua Litbang, Senat Mahasiswa UI. Di Fakultasnya sendiri, Fahri adalah pendiri Forum Studi Islam FE UI. Di luar kampus, Fahri sempat magang menjadi wartawan untuk beberapa media, seperti *Republika* dan *Suara Hidayatullah*.

Menjadi Politisi

Lulus kuliah tahun 1996, Fahri langsung bekerja di Program Extension FE UI. Di situ ia menyusun program perkuliahan sebagai staf pimpinan. Bersama Fahri, ada Zulki-flimansyah dan Mustafa Kamal yang sama-sama direkrut menjadi staf dan kini menjadi kawan satu partai di PKS. Oleh Direktur Program, Fahri sering ditugaskan mencari dosen untuk mengajar di program tersebut. Di antara para dosen yang ia tugaskan mengajar adalah Jero Wacik mantan Menteri ESDM dan Anis Matta Presiden PKS sekarang.

Sambil bekerja di Program Extension, Fahri juga melanjutkan studi magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, akhir 1997. Yang menjadi Direktur Program Pascasarjana ini adalah Sri Mulyani. "Tapi baru tiga bulan kuliah, reformasi meletus. Akhirnya, kuliah terhenti dan larut dalam gerakan reformasi," kenang Fahri lagi. Kawan-kawannya menyarankan dia untuk ikut berperan lebih jauh bersama para mahasiswa

seluruh Indonesia, menumbangkan rezim ORBA.

Saat reformasi bergulir, Fahri menggagas berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Dia sebagai deklarator sekaligus ketua umum pertama. Bersama tokoh reformasi Amien Rais, Fahri berkeliling kota menghadiri berbagai pertemuan dan demonstrasi untuk menyuarakan pentingnya suksesi kepemimpinan nasional.

Aktif dalam gerakan reformasi mengantarnya ke panggung politik. Tahun 1998-1999, Fahri diangkat menjadi Anggota MPR RI. Dunia politik sudah tak asing bagi mantan Ketua Departemen Pengembangan Pemuda ICMI ini. Ia benar-benar terjun ke dunia politik secara total bersama Partai Keadailan (PK) sejak 1998 yang dideklarasikan bersama tokoh-tokoh yang sekarang menjadi PKS.

Tiga kali pemilu secara berturut-turut, mantan Wakil Ketua Fraksi PKS itu melenggang ke Senayan sebagai wakil rakyat dari dpil NTB. Periode pertama pada 2004-2009 dan dilanjutkan pada 2009-2014. Pada 2014-2019 merupakan priode ketiganya di DPR. Kali pertama menjadi anggota dewan, Fahri berkiprah di Komisi VI yang membidangi industri, perdagangan, UKM, koperasi, dan BUMN. Lalu, secara berturut-turut pindah ke Komisi III dan Komisi

VII. Fahri juga pernah ditugaskan di BAKN dan Badan Kehormatan DPR.

Bahagia Bersama Keluarga

Sibuk sebagai anggota dewan, Fahri tak melupakan perannya sebagai ayah. Di rumahnya ada istri tercinta Farida Briani yang dinikahinya tahun 1997. Farida adalah dokter spesialis bedah Ongkologi dari UI. Dari hasil pernikahannya, Fahri dikaruniai lima anak, masing-masing Faris Nabhan, Farah Nashita, Fayha Haniya, Fayqa Hanifa (alm), dan terakhir Keneisyia yang diasuh menjadi bagian keluarganya.

Bila ada waktu bersama keluarga, Fahri kerap mengajak rekreasi keluarga. Destinasi favoritnya ke Sumbawa, tanah leluhurnya. Kadang ke Lombok dan Bali. Di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan, Fahri masih bisa menyempatkan waktu untuk menulis buku. Di antara karyanya adalah "Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat", "Negara, Pasar, dan Rakyat", "Ke Mana Ujung Century", serta "Demokrasi, Transisi, dan Korupsi".

Dalam mendidik buah hati tercintanya, Fahri berusaha tak berjarak. Ia upayakan sedekat mungkin. Bila ada kesenjangan jarak dengan anak-anak, akan selalu muncul dampak negatif pada kehidupan anak-anaknya. Satu hal yang dipahaminya, anak-anak akan tumbuh dengan dua nilai. Nilai yang pertama, diisi oleh orangtua seperti agama, kejujuran, dan karakter. Dan nilai kedua diisi dari luar rumah.

Sisi lain Fahri Hamzah, ia ternyata menyukai lagu-lagu dari tiga penyanyi legendaris; Iwan Fals, Ebiat G Ade, dan Rhoma Irama. Menurutnya, hanya tiga penyanyi itu yang sering terdengar lantunannya saat kecil di kampung. Mendengar lagu Begadang dan Darah Muda dari Rhoma Irama, seketika teringat masa kecil. Begitu juga saat mendengar lagu Bento dan Bongkar (Iwan Fals), serta Menjaring Matahari dan Camelia 1,2, dan 3 (Ebiat). Lagu-lagu tersebut selalu menyisakan nostalgia menarik tentang tanah kelahirannya.

(mh) foto: naefurodjie, andri/parle/hr



Kunker Komisi XI DPR ke Sumut **TARGET PENERIMAAN MELESET HINGGA TEMUAN UTANG DBH**

Suasana rapat Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan jajaran BI wilayah Sumut, OJK, dan Pimpinan Perbankan Sumut



Wakil Ketua Komisi XI Gus Irawan Pasaribu

Awan cerah menyambut kedatangan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI saat mendarat di Bandara Internasional Kualanamu Medan, Sumatera Utara (Sumut) awal Desember lalu (8/12). Disambut jajaran Kanwil Kementerian Keuangan Sumut, Tim Kunker Komisi XI DPR rehat sejenak di ruang VIP untuk selanjutnya menuju Gedung Kanwil Ditjen Pajak Sumut.

"Kita sudah di penghujung tahun 2014, sangat penting bagi kami se-

laku anggota dewan mengetahui sejauh mana capaian kinerja jajaran Kemenkeu Provinsi Sumut karena akan mempengaruhi hasil secara keseluruhan di tingkat pusat (nasional)," ungkap Gus Irawan Pasaribu selaku Ketua Tim Kunker dalam sambutannya.

Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumut, Harry Mulya, yang mewakili jajaran Kemenkeu Provinsi Sumut mengakui bahwa secara umum yang menjadi kendala adalah terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), luas wilayah geografis yang tidak didukung infrastruktur, serta sarana dan prasarana Teknologi Informasi (TI) yang belum memadai.

Mendengar jawaban klasik tersebut, anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno sontak mengkritisnya. Menurutnya, sudah saatnya jajaran Kemenkeu Sumut mengubah paradigma yang sudah turun-temurun tersebut. Organisasi yang modern seharusnya justru membutuhkan SDM yang ramping dengan didukung sarana IT yang mumpuni. "Ada paradoks, semakin banyak

pengawasan justru semakin besar kebocoran," tegas Hendrawan.



Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno

Kekosongan Dirut Bank Sumut Dipertanyakan

Malam harinya, rombongan Tim Kunker Komisi XI DPR bertemu dengan Kepala OJK Kantor Regional 5 Sumatera Achmad Fauzie, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut-Aceh Difi A Johansyah, dan pimpinan perbankan di Medan, termasuk Direktur Umum PT. Bank Sumut HM Yahya dan Direktur Pemasaran Ester Junita

Ginting.

Lowongnya Dirut PT. Bank Sumut yang sudah hampir 2,5 tahun menjadi bahasan hangat dalam pertemuan tersebut. Anggota Komisi XI Hasrul Saleh mempertanyakan kepada OJK terkait struktur pengurus bank yang belum lengkap, yang berpengaruh pada kinerja bank. "Apakah OJK menganggap hal ini tidak penting atau sengaja melakukan pembiaran?" kritik Hasrul. Jika memang demikian, Hasrul menilai OJK tidak maksimal melakukan tugasnya mengawasi bank.

Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumatera Achmad Fauzie mengakui



Anggota Komisi XI Rudi Hartono Bangun

masalah kekosongan Dirut Bank Sumut. Menurutnya, sudah dua kali diajukan calon Dirut dan Direksi lain tapi tidak lulus *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan). Achmad Fauzie berharap, Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang memegang amanah dapat segera menyelesaikannya. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat untuk yang ketiga kali sudah bisa direalisasikan," pungkas Fauzie.

Gubernur Sulut Didesak Lunasi Utang DBH

Esok harinya, giliran Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang didesak Tim Kunker Komisi XI DPR RI untuk segera melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Anggota Komisi XI Rudi Hartono Bangun (F-PD) menyayangkan sikap Pemprov Sumut yang terkesan menahan pembayaran hutang DBH. Hal ini terlihat dari tunggakan DBH yang terakumulasi sejak tahun 2011.

"Ini bisa mengganggu roda perekonomian di tingkat Kabupaten/Kota," kata Rudi.



Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam

Sedangkan Ecky Awal Mucharam (F- PKS) menyarankan agar Pemprov Sumut segera menyusun jadwal pembayaran hutang DBH. "Perlu ada pengawasan internal yang akuntabel agar kasus seperti ini tidak terulang," imbuh Ecky.

Achmad Hatari Politisi Nasdem tak mau ketinggalan, dia menekankan bahwa DBH bukan semata-mata bantuan tapi hak bagi Pemkab/Pem-

Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuad Lubis mengakui Pemprov Sumut kekurangan dana sehingga belum dibayarkannya DBH dan Bagi Hasil Pajak (BHP) secara bertahap.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2013, terdapat sebesar Rp 2,185 triliun atas hutang tahun 2011, 2012 dan 2013. Pada 2013 dianggarkan sebesar Rp522,121 miliar, realisasi PAD 2013 sebesar Rp 3,685 triliun, maka kewajiban DBH kepada Kab/Kota sebesar Rp 1,227 triliun.

Ahmad Fuad Lubis menyebutkan kewajiban DBH kepada Kab/Kota sampai dengan 2014 yang belum dianggarkan pada 2013 sebesar Rp 854,982 miliar, tahun 2014 Rp 997,796 miliar. Jadi totalnya Rp 1,852 triliun.

Gubernur berjanji pihaknya pada 2015 telah menganggarkan sebesar Rp 2,3 triliun yang diproyeksikan untuk membayar kewajiban kepada Kab/Kota tahun anggaran 2015 sebesar Rp 1,3 triliun. Dengan demikian, Rp 1 triliun digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 1,852



Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho

kot, karena dari situlah program pembangunan infrastruktur bisa berjalan. "Lebih baik membangun delapan proyek tapi fungsional daripada 30 proyek tapi acak-acakan," jelasnya.

Dari Golkar, Muhammad Misbakhun mensinyalir adanya temuan hutang DBH yang mencapai Rp 2,185 triliun sejak tahun 2011, 2012 dan 2013, yang menyebabkan laporan Pemerintah Daerah hanya mendapatkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho bersama

triliun.

"Pemprov Sumut berkomitmen melunasi hutang DBH secara bertahap dan tahun 2016 diharapkan bisa lunas," janji Gatot.

Rombongan Tim Kunker Komisi XI dipimpin Gus Irawan Pasaribu didampingi M. Prakosa, Hendrawan Supratikno, M. Idris Laena, M. Misbakhun, Andi Achmad Dara, Haerul Saleh, Wilgo Zaenar, Yasti Soepredjo Mokoagow, Ahmad Najib Qudratullah, Rudi Hartono Bangun, Rooslynda Marpaung, Bertu Merlas, Karsiyah, Ecky Awal Mucharam, Achmad Hatari. (Naefuroji) foto: naefurodjie/parle/hr



Kunker Komisi IX DPR ke Kaltim MENGGALI INFORMASI DI PROVINSI KAYA

Hari sudah gelap ketika pesawat yang membawa rombongan Komisi IX DPR mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Menggali banyak informasi penting di bidang layanan kesehatan jadi target utama di provinsi kaya tersebut.

Agenda dua hari penuh betul-betul dimanfaatkan untuk mengorek sebanyak mungkin informasi dari Pemda Kaltim. Seiring diluncurkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh pemerintahan baru, banyak daerah kewalahan menyesuaikan diri dengan program tersebut. Tumpang tindih layanan dan penerima kartu ganda dengan fungsi yang sama kerap terjadi, termasuk di Kaltim.

Secara umum, layanan kesehatan di Kaltim relatif baik. Bahkan, apresiasi disampaikan anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati. Politisi PPP itu mengapresiasi Pemprov Kaltim yang membangun kawasan bebas asap rokok di instansi-instansi pemerin-

tah, termasuk bandara. Terbitnya Perda kawasan bebas rokok sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kata Okky awal Desember lalu di Samarinda.

Apresiasi juga disampaikan Anggota Komisi IX lainnya Aditya Anugrah Moha. Menurutnya, Pemprov Kaltim sedang meningkatkan layanan kesehatan termasuk menyesuaikan dengan program KIS yang baru saja diluncurkan Presiden Joko Widodo. Beberapa rumah sakit pratama di ujung perbatasan Kaltim dengan Malaysia juga terus dibangun, walau akses menuju layanan kesehatan itu sedikit menghadapi kendala infrastruktur.

"Kami memberikan *support* dan motivasi agar Kaltim sebagai salah satu daerah terkaya di Indonesia bisa betul-betul menjadi *pilot project* untuk dicontoh oleh daerah-daerah lain," kata politisi muda Partai Golkar itu. Untuk menghadapi akses infrastruktur, Aditya menyarankan agar dibicarakan lintas sektoral oleh pemerintah dan lintas komisi di DPR. Ini penting, agar masyarakat di

perbatasan bisa mudah mengakses layanan kesehatan yang dibangun Dinas Kesehatan setempat.

"Kunjungan kerja ke Kaltim itu lumayan banyak memberikan informasi tentang kesiapan pelayanan dasar dan kesiapan BPJS. Menurut saya, beberapa persoalan positif bisa ditarik kesimpulannya. Contohnya adalah sistem satu atap yang dibangun oleh pemerintah setempat dengan membangun koordinasi antara dinas kesehatan dan BPJS yang selama ini sudah berjalan cukup kondusif," nilai Aditya.

Sementara Okky memuji pula bahwa di Kaltim ada pusat layanan kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus. Ini terobosan yang bagus. Anak-anak penderita autisme bisa ditampung di sini. Selain itu, angka kematian bayi di Kaltim menurun. Pusat kesehatan ibu dan anak cukup memadai di Kaltim.

Pengidap HIV-AIDS Tinggi

Satu hal yang mengagetkan semua anggota tim kunker ini adalah angka penderita HIV-AIDS

cukup tinggi di Kaltim. Dinas Kesehatan Kaltim mencatat, setidaknya ada 865 jiwa yang dinyatakan positif terjangkit HIV-AIDS. Sekitar 500-an orang sudah meninggal akibat virus ini. Imam Suroso Anggota Komisi IX DPR yang turut serta dalam rombongan mengawatirkan angka tersebut.

"Saya sudah minta Kepala Dinas Kesehatan untuk mendrop obat antivirus yang menghilangkan virus HIV itu. Pencegahan preventif perlu dilakukan. Contohnya, semua kompleks lokalisasi, pub, karaoke,



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati

hukumnya wajib untuk diinjeksi antivirus. Positif atau negatif terjangkit HIV harus disuntik. Itu tanggung jawab puskesmas dan rumah sakit setempat. Kalau tidak mau disuntik usir saja, karena bila dibiarkan bisa berbahaya," katanya di Balikpapan, Kaltim

Kaltim yang memiliki kekayaan alam luar biasa berupa minyak, gas, dan batubara, tentu menjadi magnet bagi para pendatang untuk bermigrasi ke wilayah tersebut. Banyaknya masyarakat urban di Kaltim, tentu membawa risiko sosial dan kesehatan. Salah satunya adalah menjangkitnya penyakit menular. Apalagi, di Kaltim banyak tempat hiburan malam dan lokalisasi.

Selama ini, nilai Imam, Pemda Balikpapan dan Pemprov Kaltim belum optimal melakukan pencegahan. Puskesmas setempat harus keliling memberi pemahaman bagi para pekerja seks di tempat lokalisasi. Kesehatan para pekerja dan pendatang harus diperhatikan. "Se-

lain suntik anti-HIV, suntik antisivilis juga perlu diberikan. Semua virus ini mudah mewabah," ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Hal yang sama dillontarkan Okky. Pihaknya merasa tercengang mendengar penjelasan Dinas Kesehatan Kaltim saat mengadakan pertemuan dengan Wakil Wali Kota Balikpapan. Tingginya kasus HIV-AIDS di Kaltim perlu mendapat perhatian semua pihak. Saat yang sama, publik tak perlu memberi stigmatisasi kepada para pengidap HIV-AIDS. Sosialisasi berbasis komunitas perlu dilakukan, terutama kepada para PSK. Sosialisasi kepada kaum pria yang selalu mendatangi lokalisasi juga tak kalah pentingnya.

Sementara Aditya menyarankan, ada langkah preventif yang dilakukan



Anggota Komisi IX Imam Suroso

Dinas Kesehatan Kaltim untuk mendeteksi kemungkinan penyebarannya dari para pendatang. Untuk itu, semua pintu masuk di pelabuhan dan bandara perlu memperketat pemeriksaan kesehatan, agar kasus HIV-AIDS tak terus meningkat di Kaltim. "Ini jadi konsekuensi logis ketika Kaltim jadi daerah urban yang dikunjungi oleh masyarakat dari daerah lain, bahkan lintas negara."

BPJS Kesehatan

Sejak dirilis Kartu Indonesia Sehat (KIS) sempat terjadi tumpang tindih kepesertaan BPJS Kesehatan. Banyak penerima kartu ganda dengan fungsi yang sama, yaitu KIS dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dinas Kesehatan Kaltim merilis bahwa warga miskin penerima KIS sebanyak 72.036 orang. Warga miskinnya sendiri berjumlah 587.828 jiwa.

Dan yang menjadi sorotan, ternyata di Kaltim ada aktivasi kartu BPJS Kesehatan selama 7 hari. Peserta BPJS Kesehatan tidak bisa langsung mengakses layanan kesehatan setelah mendaftar. Menurut Okky, mestinya tak perlu ada aktivasi seperti itu. "Sakit, kan, enggak bisa nunggu. Ketika orang sudah mengurus kartu, harusnya dapat nomor dan langsung bisa dipakai sambil menunggu kartunya jadi," harap Okky.

Dia mengungkapkan, di Jawa Timur ternyata ada kasus bayi meninggal lantaran kartu BPJS-nya belum dapat diakses setelah didaftarkan. Masalah aktivasi ini jadi temuan menarik saat melakukan kunker di Kaltim. Berbeda dengan di Jakarta Selatan, warga miskin bisa langsung mendapat layanan kesehatan setelah mendaftar, walau kartunya belum jadi.



Anggota Komisi IX Aditya Anugrah Moha

Senada dengan Okky, Aditya juga menyesalkan adanya aturan aktivasi tersebut. Ini persoalan serius. Ketika ada warga yang sekarat, tak mungkin harus menunggu layanan kesehatan hingga kartunya aktif. Banyak masyarakat yang tidak tahu dengan kebijakan aktivasi tersebut. "Masyarakat harus mengetahui hal ini. Masalahnya, masyarakat tidak tahu. Kalau tahu, mungkin masyarakat akan melawan kebijakan seperti itu. Jadi, perlu dicari terobosan agar kartu BPJS Kesehatan di daerah bisa segera diakses." (mh) foto; iwan armianas, husen/parle/hr



TERKAIT KENAIKAN BBM, DPR KUNJUNGI TIGA DAERAH DI INDONESIA

Tim Kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Totok Daryanto di Provinsi Kalimantan Tengah

Terkait dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Komisi VII DPR yang salah satu fungsinya dibidang pengawasan, pada awal Desember ini, berkesempatan melakukan kunjungan spesifik ke tiga daerah di Indonesia, yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat.

Kedatangan mereka kali ini, untuk melihat secara langsung dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan Presiden Joko Widodo tanggal 18 November lalu.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi VII DPR menemukan bahwa jumlah SPBU di Kota Palangkaraya masih sangat kurang untuk melayani kebutuhan BBM untuk masyarakat setempat.

Akibat dari kurangnya jumlah SPBU, kata Ketua Tim Kunjungan Totok Daryanto (F-PAN), kepada Parlemen-taria, berdampak pada hadirnya pengecer BBM yang menjual harga lebih tinggi kepada masyarakat.

Untuk itu, tambah Totok, pihaknya berharap, daerah yang belum terlayani hadirnya SPBU, diharapkan Pemda bisa membuat aturan supaya tidak tumpang tindih,

“Misalnya saja di dekat SPBU jangan sampai ada pengecer termasuk juga tempat yang jauh yang belum terlayani SPBU bisa dengan diatur oleh Pemda ber-

sama dengan Pertamina. Karena sekarang ini harga di pengecer berlipat lipat, dari harga normalnya,” terangnya.

Oleh karena itu, menurut Totok, Komisi VII DPR akan meminta Pertamina untuk mengupayakan penambahan fasilitas SPBU tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan BBM subsidi.

Sebelumnya, dalam pertemuan Tim Komisi VII DPR dengan PT.Pertamina, jajaran Pemprov Kalteng, BPH Migas. Pertamina menyampaikan, mengenai minimnya SPBU tersebut, mereka menyanggupi untuk menambah jumlah SPBU.

Pertamina menurut Faris Azis selaku GM Pertamina Marketing Operational Region VI, mereka sedang mencari alternatif-alternatif lain, termasuk jenis SPBU yang lebih kecil dari yang ada sekarang.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan mengenai perlunya aturan soal pengecer BBM subsidi diwilayah terpencil, menurut Kadis Pertambangan Pemrov Kalteng Syahril Tarigan mengusulkan adanya payung hukum mengenai pengecer ini, karena saat ini larangan terhadap pengecer BBM itu hanya pada aturan dimana setelah dari SPBU, BBM tidak boleh dijual kembali. “Ini payung hukum yang ada sekarang, tapi ada juga aturan yang mengatakan dalam radius berapa ki-

lometer dari SPBU boleh ada pengeceran," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Totok mengatakan untuk pengecer perlu ada payung hukum untuk melegalkan kehadiran pengecer BBM ketika pemerintah dalam hal ini Pertamina belum menyediakan *outlet* atau SPBU yang memasok kebutuhan BBM untuk masyarakat.

Totok menambahkan, pihaknya tengah mencari solusi agar kehadiran para pengecer itu tidak dianggap melanggar hukum. "Jadi pengecer-pengecer itu pada dasarnya adalah cara swadaya dari masyarakat untuk mengatasi kebutuhannya sendiri, ketika pemerintah (Pertamina-red) belum bisa menyediakan SPBU BBM bersubsidi. Kita mengharapkan dengan itu diatur, menjadikan lebih terkendali baik dari sisi distribusi serta harganya yang sampai ke masyarakat," kata Totok.

Sementara itu, M Franshurullah Asa dari BPH Migas yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan jika dilihat dari pendekatan hukum, kehadiran para pengecer BBM itu sebenarnya salah. Meski begitu, para pengecer sangat bermanfaat bagi daerah-daerah tertentu. "Ada bahasa mengenai pengecer ini yakni ilegal bermanfaat. Dia (pengecer-red) ilegal tapi bermanfaat pada kondisi tertentu karena Pertamina belum mampu hadir di kabupaten-kabupaten terpencil," katanya.

M Franshurullah Asa menilai kalau mengacu pada UU Migas, keberadaan para pengecer itu jelas menyalahi, karena pengecer harus resmi terdaftar sebagai penyalur di Pertamina. "Jadi harus ada izin niaganya. Tapi para pengecer-pengecer itu kan nilai omsetnya kan kecil. Tidak mungkin pengecer itu punya izin niaga, karena kalau punya izin niaga omsetnya kan hingga milyaran rupiah. Jadi ngga mungkin mereka punya izin niaga," jelasnya.

Rombongan Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR ke Prov. Kalteng di ikuti juga oleh Neni Moerniaeni (F-Partai Golkar), Katherine A Oendoen (F-Partai Gerindra), M Zairullah (FPKB) dan Jamaluddin Jafar (FPAN).

Pertamina Belum Siap Hadapi Persaingan Perdagangan Bebas

Sementara itu, salah satu anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR ke Prov. Jawa Tengah, Harry Poernomo (F-Gerindra) menilai PT Pertamina belum siap menghadapi persaingan perdagangan bebas.

"Saya melihat perkembangan yang ada dari paparan Pertamina menunjukkan belum adanya kesiapan PT. Pertamina untuk menghadapi perdagangan bebas," kata Harry saat pertemuan Tim Komisi VII DPR dengan Vice President People Management PT Pertamina, GM Pertamina Semarang, Anggota Komite BPH Migas, Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah dan Direktur Bareskrim Polda Jawa Tengah di Aula Terminal BBM Semarang Group, Pengapo, Semarang.

Untuk itu Harry berharap, PT. Pertamina bisa membuat berbagai *project* program dalam rangka pembangunan infrastruktur distribusi BBM baik subsidi maupun non subsidi.

Ia juga menyarankan agar PT Pertamina meminta kepada DPR atau kepada pejabat daerah untuk berpihak



Tim Kunker Komisi VII DPR RI di Provinsi Jawa Tengah dipimpin Wakil Ketua Mulyadi

guna melindungi PT Pertamina, "Pertamina juga secara sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan betul-betul menjadi perusahaan yang dibanggakan dan layak dibantu serta dilindungi," pintanya.

Menurut Harry, mengapa ini ia ungkapkan, karena sering kali mengamati kosongnya BBM jenis Pertamina di beberapa wilayah di Jawa Tengah, diantaranya Kota Semarang dan Yogyakarta.

"Dari itulah, bisa saya lihat, Pertamina belum siap menghadapi persaingan perdagangan bebas," tegasnya.

Pada kesempatan ini juga, dirinya juga meminta kepada Pemda Jawa Tengah, agar ketika akan memberikan ijin mendirikan bangunan atau ijin usaha apapun pada PT Pertamina tidak 'diobral'.

Demikian pula kepada BPH Migas diminta keberpihakannya, karena menurut Harry posisi BPH Migas sangat strategis bukan hanya dalam hal pengawasan atau alokasi kuota tetapi bagaimana caranya juga memfasilitasi dan mendorong PT Pertamina dan perusahaan swasta lain untuk membangun infrastruktur BBM dan Gas di seluruh wilayah Indonesia.

"Perusahaan swasta diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi aturan, dan tidak memberi kesempatan kepada swasta membuka peluang tumbuhnya mafia Migas," tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR Mulyadi (F-Demokrat) mengatakan dalam pertemuan ini banyak masukan dan hal-hal yang perlu di lakukan pengecekan di lapangan, baik itu terkait ketersediaan BBM, kelangkaan BBM dan penyalahgunaan BBM itu sendiri oleh oknum-oknum tertentu

"Untuk itu, yang menjadi kunci adalah pihak Kepolisian, karena jika tidak ada polisi, kita tidak bisa menerbitkan," ujar politisi dari Partai Demokrat ini.

Oleh sebab itu, menurut Mulyadi, Komisi VII perlu meninjau langsung bagaimana kondisi di Semarang, karena di tempat lain sering terjadi penyalahgunaan BBM bahkan ada yang di *back up* oleh pihak-pihak tertentu.

Dijelaskan Mulyadi, bahwa salah satu tugas DPR adalah memastikan jangan sampai terjadi kerugian negara yang berdampak kepada masyarakat. "Semakin banyak BBM yang digunakan untuk kepentingan yang sebetulnya tidak ada kepentingannya untuk masyarakat

kat miskin, maka makin besar pula kerugiannya karena pemerintah harus menambah alokasi anggaran terus," jelasnya.

Dengan mengunjungi langsung ke lapangan, Mulyadi berharap, ada masukan-masukan yang baik untuk Pertamina terutama mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian BBM. Begitu pula permasalahan yang dihadapi masyarakat.

"Dari masukan-masukan tersebut, tentunya akan dijadikan bahan dalam rapat-rapat dengan pemerintah," pungkasnya.

Selain Mulyadi selaku Ketua Tim dan Harry Poernomo, Tim Kunjungan kali ini juga diikuti oleh anggota Komisi VII DPR Bowo Sidik Pangarso (F-PG), Ramson Siagian (F-Gerindra), Mat Nasir (F-PD), Andriyanto Johan Syah (F-PAN), dan Agus Sulistyono (F-PKB).

Anggota DPR Desak Pemerintah Buat Kartu Diskon Nelayan

Di Provinsi Jawa Barat, Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR yang dipimpin oleh Kardaya Warnika (F-Gerindra) bersama Lucky Hakim (F-PAN) dan Inas Nasrullah Zubir (F-Hanura) mengunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Indramayu dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Banker Pelabuhan Kejawanan Cirebon.

Disana anggota Komisi VII DPR RI Inas Nasrullah Zubir mendesak pemerintah membuat Program Kartu Diskon Nelayan, yang nantinya dipergunakan membeli bahan bakar solar untuk bahan bakar perahu nelayan, hal ini karena dia melihat subsidi solar untuk nelayan pelaksanaannya masih tidak tepat sasaran.

"BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi ini untuk nelayan yang mana?, justru saya melihat para juragan besar yang menikmatinya," kata Inas yang juga politisi Hanura ini.

Inas menambahkan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo jangan hanya terbatas hanya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Sejahtera, "Kasih Nelayan yang tepat sasaran yaitu kartu diskon BBM untuk nelayan. Itu yang benar-benar tepat sasaran kepada nelayan yang memiliki kapal-kapal kecil. Kartu Diskon dengan nama bersangkutan sudah tertera disitu dan ada chipnya," tegasnya.

Pada kunjungan itu, dia tidak melihat nelayan yang benar-benar susah, mereka tidak mempermasalahkan BBM naik asalkan, BBM tetap tersedia. Misalkan pemilik kapal mempunyai lebih 100 dari kapal di bawah 30 GT, apakah pantas untuk tetap disubsidi. "Persoalannya apakah pantas dia (Juragan Nelayan-red) mendapatkan BBM bersubsidi?," ungkapnya lagi.

Maka dari itulah, harus dilakukan pendataan terkait nelayan yang pantas untuk mendapatkan subsidi BBM, melalui Kartu Diskon Nelayan. "Harus didata dengan benar nelayan yang memiliki kapal sendiri memang untuk mencari nafkah dengan kapalnya, itulah yang harus disubsidi, bukan juragan kapal yang disubsidi. Ini salah sasaran kepada cukung-cukong. Para cukong yang dapat subsidi, bukan nelayan kecil. Ini yang harus dihindari," katanya.

Dia setuju BBM subsidi solar juga dihapuskan, karena menguntungkan orang-orang tertentu, termasuk mafia migas yang melakukan pencurian dan memainkan harga subsidi. Dengan kartu tersebut otomatis nelayan yang jadi 'juragan', itu jangan dikasih.

"Kuota akan berkurang banyak jika digunakan untuk kapal yang besar-besar. Dengan adanya kartu tersebut, otomatis juragan nelayan besar jangan dikasih," harapnya.

Pada kesempatan yang sama, bertempat di Unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra di Pantai Song, Kabupaten Indramayu Ketua Tim Kunjungan Komisi VII Kardaya Warnika menilai apapun kebijakan yang dilakukan oleh negara adalah untuk rakyat, termasuk para nelayan. "Kami dari Komisi VII ingin melihat secara pasti dampak kenaikan BBM pada nelayan," jelasnya.



Tim Kunker Komisi VII DPR RI di SPBN Indramayu, Jawa Barat dipimpin Ketua Kardaya Warnika

Dalam pertemuan dengan sejumlah nelayan mereka mengeluhkan setelah harga solar naik, antrian ternyata masih panjang dan lama. Sudah sebulan masih juga belum mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapalnya, sehingga mereka belum bisa melaut untuk mencari ikan.

Salah seorang nelayan, Taryono, mengharapkan antrian BBM bagi nelayan dapat dipercepat. Sebelumnya dalam tiga hari sudah dapat jatah BBM, tapi sekarang sudah sebulan belum juga mendapatkan giliran pengisian BBM.

"Saya rasa keberatan, jadi tolonglah bapak bijaksana bagaimana caranya nelayan jangan terhambat karena BBM, supaya ekonomi rakyat tidak tersendat-sendat," keluhnya kepada para anggota dewan yang hadir.

Kasan, seorang nahkoda kapal nelayan juga menginginkan agar solar sebagai bahan bakar kapalnya agar mudah untuk memperolehnya, "Saya orang kecil, harga solar naik tidak dipermasalahkan tapi yang penting orang kecil jangan dipersulit untuk mendapatkannya," katanya. (nt/sc/as) foto: nita, suciati, agung/parle/hr



BERIKAN MASYARAKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN BENCANA

Tim Kunker Komisi VIII foto bersama pengungsi Sinabung

Bencana alam adalah ketentuan Tuhan yang pasti berlaku. Bencana boleh ada, tetapi kita semua bisa mengantisipasi sehingga ketika bencana terjadi siap beradaptasi. “Pemerintah harus memberikan pengetahuan dan pendidikan yang cukup sehingga sikap tanggap terhadap bencana terbentuk dan bersemangat untuk bangkit kembali,” demikian ditegaskan Ketua Komisi VIII DPR Saleh P. Daulay ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sumut pada reses Desember lalu.

Selain mengirim Tim ke Propinsi Sumut, Komisi VIII DPR pada masa reses pertama DPR periode 2014-2019 ini juga mengirim dua tim ke Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Propinsi Maluku Utara.

Menurut Saleh, Komisi VIII pada reses ini memfokuskan kunjungan ke daerah bencana Gunung Sinabung untuk melihat langsung apa yang dilakukan pemerintah. “

Intinya Komisi VIII tidak abai, tidak lupa, terbukti tiga anggota Dewan asal Sumut ikut dalam kunker ini,” katanya.

Politisi PAN ini menyebut, negara Jepang, setiap saat terjadi bencana khususnya gempa bumi, tetapi ketahanan mereka luar biasa sehingga tetap survive hidup. Dalam konteks ini, Tim DPR bisa memberi semangat pada pengungsi dan korban bencana alam tersebut supaya bisa beraktifitas normal kembali seperti sedia kala sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan dapat segera dirasakan.

Tim Komisi VIII dalam pertemuan di Posko Bencana Sinabung menyerahkan sumbangan sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan jalan ke relokasi pemukiman di wilayah Pemda Karo. Selain itu juga bantuan Rp 2 miliar untuk menyelesaikan 50 unit rumah, sumbangan dari Kemensos sebesar Rp 120 juta serta bantuan untuk bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah

sebesar Rp 200 juta. Bantuan untuk Posko Relawan juga diberikan sebesar Rp 100 juta dari Badan Amil Zakat Nasional yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Daerah Sumut.

Tidak ketinggalan Tim ini juga mengunjungi tempat pengungsian yang tak jauh dari Posko Sinabung, selain bersilaturahmi juga berdialog dan memberi semangat kepada keluarga dan anak-anak pengungsi. Sempat bercengkrama dan berfoto bersama sebagai tanda solidaritas kepada anak bangsa yang sedang menerima musibah. Secara spontan anggota Dewan juga memberi sumbangan dan diterima dengan sukacita keluarga pengungsi.

Komisi VIII DPR mengharapkan semua bantuan bagi korban letusan gunung Sinabung, Sumut diperuntukkan secara maksimal. Jangan sampai ada keluhan masyarakat tidak bisa ke pasar karena jalannya rusak atau relokasinya tidak sempurna. “Bantuan-bantuan tersebut akan kami awasi betul, sesuai tidak



Tim Kunker Komisi VIII menggelar pertemuan dengan Gubernur NTB

dengan peruntukannya. Mudah-mudahan bisa disalurkan dengan semestinya,” tandas Saleh.

Dipimpin langsung oleh Ketua-nya Saleh P. Daulay, Tim Komisi VIII DPR beranggotakan, Agus Susanto, M. Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Jalaludin Rakhmat dari Fraksi PDI Perjuangan, Endang Maria Astuti, Endang Srikarti Handayani dan Delia Pratiwi BR. Sitepu dari FPG, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan H.R. Muhammad Syafi'i dari Fraksi Gerindra, Linda Megawati dari FPD, M. Asli Chaidir dari Fraksi PAN, Maman Imanul Haq dari FPKB, Ahmad Mustaqim dari FPP, Hj. Tri Murni dari Fraksi Partai Nasdem, Lalu Gede Syamsul Mujahidin dari Fraksi Hanura.

Masih Minim

Masih terkait dengan bencana, Tim Kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Maluku Utara menilai masih minim dalam pengadaan sistem peringatan dini atau *early warning system*. Padahal, wilayah ini termasuk dalam wilayah *ring of fire*, sehingga berpotensi terjadi bencana alam.

Anggota Tim Kunker, Choirul Muna mengatakan hal itu saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Maluku Utara, beserta jajarannya, Senin (8/12). Ia menyatakan, setidaknya Indonesia masih membutuhkan 70 ribu sistem peringatan

dini untuk dipasang di daerah-daerah rawan bencana.

“Kami memperlakukan sistem peringatan dini. Karena Indonesia ini membutuhkan 70 ribu sistem peringatan dini, sedangkan yang terpasang baru 500. Ini sangat sedikit, bahkan dari 500 alat ini ada yang dicuri. Berarti untuk Maluku Utara juga sangat kurang,” tegas Muna.

Politisi Nasdem ini ingin tercipta koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk masalah peringatan dini, termasuk masalah kesiapan sumber daya manusia ketika menghadapi bencana.

“Kalau perlu, anggaran bencana *on call* itu ditingkatkan. Saat ini, dana *on call* itu untuk seluruh Indonesia hanya Rp 1,6 triliun. Itu sangat kecil. Maluku utara ini terletak di atas lempengan. Jika itu realistis, akan kami dorong,” janji Muna.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah. Ia menilai, Maluku memiliki potensi bencana yang luar biasa. Apa pasal, ia melihat dari udara ketika di pesawat menuju Bandara Sultan Baabullah, Ternate, hampir seluruh pulau dipenuhi oleh Gunung Gamalama, yang diketahui termasuk gunung berapi dan masih aktif.

“Kalau gunungnya meletus, lari-

nya kemana? Dan ternyata bukan hanya Pulau Ternate, tapi ada lima gunung merapi di sini. Apalagi, Maluku Utara ini terletak di atas lempengan Samudra Pasifik. Pilihannya, memang harus persiapan dan pengurangan resiko bencana,” jelas Ledia.

Ia mengakui, selama ini pemerintah terkesan selalu memberi perhatian kepada pulau Sumatera, karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga berpotensi menimbulkan tsunami yang cukup besar.

“Namun kita tidak boleh lupa, bahwa badai juga sering terjadi di Filipina, yang berpotensi berimbas kepada Maluku. Jika terjadi gempa di Maluku, mereka tidak tahu kalau bisa berpotensi tsunami. Mereka akan tahu lima menit kemudian, pemberitahuan dari Jakarta. Ini memang *early warning system*-nya kurang,” imbuh Ledia.

Sebelumnya, Kepala BPBD Provinsi Maluku Hasan Ahmad menyatakan, bahwa Maluku terletak di atas tiga lempengan yang saling bertubrukan, sehingga pada posisi geografis ini, Maluku malah berpotensi mendapat 12 bencana yang sangat mematikan dan berbahaya bagi nyawa manusia.

Hasan menambahkan, sistem peringatan dini terjadinya bencana masih menggunakan sistem SMS dari BNPB dan BMKG. Yang mengkhawatirkan, jeda waktu antara informasi dari pusat ke potensi bencana sangatlah singkat. Sehingga, BPBD cukup sulit untuk menginformasikan kepada masyarakat luas.

“Yang menjadi persoalan, kalau kami memiliki *handphone* yang terdaftar di BMKG dan BNPB, kasihan masyarakat luas kami yang tidak memiliki *handphone*, atau memiliki *handphone*, namun nomornya tidak terdaftar. Padahal peristiwa peringatan dini ini harus tersebar, terutama masyarakat pesisir pantai,” jelas Hasan.

Ia menambahkan, bahwa tidak ada sistem peringatan dini tsunami di Maluku, sehingga tidak adanya alat seperti ini, pihaknya tidak bisa menyampaikan informasi peristiwa bencana. Apalagi, masyarakat Maluku

tersebar di setidaknya 700 pulau.

Teknologi Destilasi

Sementara Tim Kunker Komisi VIII ke NTB berharap penanganan kekeringan di Provinsi ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi **destilasi** atau penyulingan air laut. Langkah ini diperlukan agar bencana kekeringan tidak menimbulkan dampak pada ketahanan pangan karena NTB merupakan lumbung bagi daerah Timur Indonesia.

Sejumlah kebijakan yang telah dilakukan seperti pembuatan embung dinilai tidak optimal karena intensitas hujan yang kecil. Namun patut diperhatikan pendekatan teknologi dalam mengatasi kekeringan harus didukung penelitian dan anggaran yang memadai.

"Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB perlu mengusulkan anggaran untuk pengembangan teknologi mengatasi kekeringan melalui destilasi air laut menjadi air tawar," kata Itet Tridjajati Sumarijanto anggota Komisi VIII DPR RI saat berdialog dengan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Mataram, NTB, Kamis (11/12/14).

Ia menyebut Provinsi NTB yang dikelilingi laut sangat mendukung penerapan teknologi destilasi. Keberhasilan sejumlah negara menyuling air laut menjadi air tawar patut diuji coba.

Sementara itu Ketua Komisi VIII Deding Ishak, memimpin kunjungan kerja mengatakan kinerja mitra kerja khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di daerah yaitu BPBD, perlu lebih baik.

"Komisi VIII sangat mengapresiasi sekaligus dukungan terutama terkait peningkatan alokasi anggaran untuk dekonsentrasi yang diharapkan bersinergi dengan anggaran dana melalui APBD provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB," kata Deding politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Pada bagian lain anggota Tim Kunker dari Fraksi PAN Desi Ratnasari mengutarakan bahwa BPBD harus melakukan persiapan dan strategi dalam melaksanakan pe-



Tim Kunker Komisi VIII meninjau sungai aliran lahar dingin, gunung Gamalama, Maluku

nggulan bencana kekeringan yang terjadi saat ini. Hal paling penting menurutnya, membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat.

"BPBD perlu membangun kesadaran masyarakat bencana terjadi dalam kehidupan mereka dalam siklus tertentu. Mereka bisa menjadi orang-orang yang mandiri untuk mengantisipasi hal itu (bencana) tanpa tergantung lagi pada pemerintah," jelasnya.

Gubernur NTB Zainul Mujdi menjelaskan penanganan kebencanaan yang dilakukan BPBD NTB cukup bagus. Pemerintah Daerah (Pemda) akan terus mendorong karena menyadari wilayahnya rentan bencana.

"Pemda sedang merencanakan Raperda Kebencanaan di DPRD. Kami harapkan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu, Penanganan kebencanaan di NTB dapat lebih baik," paparnya.

Menurut Gubernur NTB, tidak hanya Perda dan penanganan

bencana setelah terjadi, tapi Pemda juga berusaha mengembangkan model pembangunan yang ramah lingkungan, sehingga potensi bencana itu bisa berkurang.

Pemprov menurutnya sedang mempromosikan kawasan Gunung Rinjani sebagai Rinjani Geopark dengan konsep konservasi lingkungan. Diharapkan Gunung Rinjani yang memberikan suplay sekitar 80% untuk kebutuhan air masyarakat Lombok, dapat terjaga kualitas lingkungannya.

"Dengan Gunung Rinjani menjadi geopark maka seluruh pihak akan punya kewajiban untuk menjaganya dengan baik dan dengan demikian potensi longsor dan banjir dan kebencanaan yang lain dapat diminimalisir," ungkapnya, selain itu juga, akan dikembangkan pada Gunung Tambora. Hal ini diletakkan dalam payung NTB Hijau yaitu program mengurangi resiko bencana atau memperkuat mitigasi bencana. (mp, sf, as) foto: mastur, agung, sofyan/parle/hr



KONTROVERSI KARTU JOKOWI DI MATA DPR

Belum lama ini, Pemerintah meluncurkan kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kehadiran ke tiga kartu tersebut, memang sudah diprediksi sebelumnya, yaitu untuk melindungi masyarakat yang rentan terkena dampak pencabutan BBM bersubsidi.

Kartu tersebut memiliki perbedaan, dari sisi warna, kartu KIP berwarna biru tua dan putih. Sementara KIS berwarna hijau-putih. Di bagian depan ketiga kartu itu terdapat gambar peta Indonesia dan Garuda Pancasila. Sebuah chip di bagian belakang digunakan untuk menyimpan data pemegang kartu. Untuk tahap awal ada 18 kabupaten yang akan mendapatkan, sementara ke depan pembagian kartu itu akan terus dilakukan di seluruh kabupaten/kota di 33 provinsi hingga akhir Desember 2014 ini.

Belum saja tuntas program terse-

but, faktanya sudah mendapat komplain dari sejumlah keluarga tidak mampu di Kabupaten Rembang, mereka sangat resah karena belum menerima pencairan dana kompensasi setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), begitu juga dengan Kota Depok, banyak yang belum menerima kartu sakti dari Pemerintahan Jokowi.

Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mempertanyakan program kompensasi BBM seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). "Program itu harus menunggu momentum yang tepat karena itu kita meminta dipertimbangkan



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

lagi," ujarnya kepada Parleментарia.

Menurutnya, DPR sangat bingung terhadap program kompensasi BBM tersebut, karena sebelumnya pemerintah mengaku proyek percetakan kartunya menggunakan program CSR BUMN. "Anggaran tersebut menggunakan dana CSR Bank Mandiri untuk mengcover seluruh kompensasi percetakan kartu program kompensasi BBM itu," ujar Politisi dari Partai PAN ini.

Menurutnya, kaedah hakekat CSR itu diantaranya bahwa harus memiliki kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sementara kartu ini untuk nasional. "Komisi XI DPR juga mempertanyakan soal itu saat Rapat Badan Musyawarah (Bamus), bahkan khusus program KIS itu berdasarkan rujukan Posyandu, dan seharusnya ada exercise tertentu," paparnya.

Sebelumnya, memang sempat terjadi perbedaan tafsiran mengenai anggaran kartu sakti tersebut, misalnya saja Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyajikan penjelasan yang tidak seragam mengenai sumber pembiayaan KIP,

yang masuk dalam APBN. Sedangkan Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kalla menegaskan, sumber pendanaan KIS, KIP dan KKS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014.

Dia menambahkan, pemerintah harus membangun semangat saling menghargai antar lembaga pemerintah agar tidak terjadi salah pengertian terhadap suatu kebijakan.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dia mempertanyakan tender fisik kartu pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR. "Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali 15 juta orang, sudah berapa coba?" terangnya.

Dia mengakui, Program unggulan Presiden Joko Widodo yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) memang belum dibahas di DPR karena masih adanya polemik di DPR. "Memang masih ada polemik di DPR akibat adanya dua kubu Koalisi Indonesia

ada saja pelanggaran ke dua maka jadi kacau," kata Fahri di Gedung DPR.

Ia menuturkan itikad baik dari negara untuk rakyat harus dibarengi dengan legalitas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. "Ingat kasus Century diawal 2009, pemerintah bilang itu itikad baik selamatkan bangsa dari krisis ekonomi dunia, efeknya orang masuk bui. Itikad baik bukan satu-satunya, tapi legal prosedural penting dan harus dipenuhi," ungkapnya.

Dia menambahkan, pemerintah dalam meluncurkan 'kartu sakti' seharusnya berkoordinasi dengan DPR, bukan saja membahas target dan capaian program pemerintah, namun juga terkait anggaran dana yang membutuhkan dana triliunan rupiah. Pasalnya, anggaran dana tersebut dimungkinkan masih menggunakan APBN 2014 di Pemerintahan SBY. "Itulah yang kita takutkan, kalau tidak mengajak Dewan, bisa tidak legal," katanya.

Mengkopi BPJS

Wakil Ketua DPR RI Agus Herman-to menilai kartu sakti Jokowi tersebut betul-betul mengkopi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti era SBY lalu. Diakui pada era SBY, berbagai program seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BPJS dibuat untuk kepentingan rakyat guna meredam dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dia mengatakan, program BPJS merupakan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Pembayaranannya, ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sementara terkait KIP, Agus menilai itu merupakan jelmaan BSM. "Jumlahnya memang sama, mekanismenya juga. Begitu pun yang lain, itu mengkopi kebijakan Pak SBY," ucapnya.

Dia menambahkan, apabila ke tiga kartu dijalankan maka pemerintah terindikasi melakukan pelanggaran Undang-undang APBN. "Yang ada di Undang-undang APBN, di Pasal 19,



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

KIS dan KKS. Pratikno mengatakan bahwa pencetakan tiga kartu itu dibiayai dengan dana CSR BUMN.

Sementara Mensos Khofifah menuturkan, sumber pendanaan ketiga kartu itu adalah dana bantuan sosial

Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP)," ujarnya.

"Kami baca UU, betapa rawan sekarang ini dalam rezim KPK kalau ada pelanggaran UU. Delik pemberantasan korupsi sudah jadi satu unsur,



Presiden Jokowi saat meluncurkan KIS, KIP, dan KKS di Kantor Pos Pusat Jakarta

namanya adalah BSM. Kalau pakai namanya KIS itu sudah berbeda lagi. Apa bisa menggunakan anggaran dengan beda mata anggaran?," tanya Agus.

Sebelumnya, Komisi XI DPR juga telah mencoba meminta penjelasan pemerintah terkait kartu sakti KIP, KIS serta KKS dengan memanggil langsung Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Hal itu bertujuan untuk mengetahui anggaran yang digunakan dalam membiayai Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah diluncurkan. Namun Raker tersebut batal dikarenakan kesibukan Menteri Keuangan, dan direncanakan dijadwalkan ulang setelah reses, Januari 2015 mendatang.

"Komisi XI DPR telah menyurati Menkeu secara resmi untuk memberi penjelasan kepada DPR. Namun karena situasi politik di DPR belum solid, serta padatnya agenda menteri, rapat akhirnya ditunda," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal.

Menurut Jon, Komisi XI DPR ingin mendengarkan langsung terkait anggaran ke tiga kartu tersebut. "Komisi XI kemarin sudah mengirim surat resmi untuk mengundang Menkeu, mau mendengar karena ada beberapa informasi terkait KIS dan lainnya itu. Kita ingin mendengar langsung, sehingga bisa melihat dimana urgensinya," tandasnya.

Politikus PAN itu menjelaskan, keterangan pemerintah soal program "Kartu Sakti" Jokowi itu penting untuk mengetahui bagaimana penggunaannya, dari mana mata anggarannya, sampai pada realisasi program tersebut untuk siapa saja. Sebagai wakil rakyat, DPR harus mengetahuinya.

Perdebatan dan kontroversi terkait kartu sakti Jokowi akan semakin mencuat setelah reses Januari mendatang pasca damainya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Berbagai isu muncul diantaranya soal anggaran kartu sakti tersebut, penyebarannya, maupun soal percetakan kartu itu. (si) foto: naefurodjie/parle/hr



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto



Fadli Zon dan anggota delegasi DPR RI

Dialog Kunci Menuju Parlemen Asia

DPR RI kembali mempromosikan pentingnya dialog untuk menjembatani sejumlah persoalan yang dihadapi sejumlah negara di kawasan Asia. Keberhasilan proses dialog ini bisa dikatakan sebagai pintu pertama menuju terbentuknya Parlemen Asia. "Saya mendorong semua pihak untuk bersama mempromosikan dialog, menyelesaikan perbedaan dan menahan diri dari setiap tindakan yang akan melepaskan kita dari ikatan persabatan diantara bangsa-bangsa di Asia," kata Fadli Zon Ketua Delegasi Indonesia dalam Sidang Pleno Ketujuh, *Asian Parliamentary Assembly (APA)* di Lahore, Pakistan, awal Desember lalu.

Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan saat ini bangsa di Asia memi-

liki sejumlah perbedaan di bidang sumber daya, tingkat demokrasi, persoalan sosial dan budaya, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan politik. Konflik berkepanjangan, kekerasan dan instabilitas adalah tantangan utama di kawasan ini. Anggota parlemen yang tergabung dalam APA menurutnya perlu berperan langsung untuk meyakinkan pemerintah masing-masing untuk melakukan aksi nyata, mengkoordinasikan upaya bersama, menunjukkan keinginan politik untuk

Dukung Palestina

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam ini selanjutnya mengingatkan seluruh delegasi pada isu Palestina yang juga sahabat dan anggota keluarga besar Asia. Fadli menye-

but sudah sangat banyak resolusi yang mengancam dengan keras apa yang dilakukan Israel di Palestina. Tapi faktanya Israel tetap dengan sengaja berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum internasional. Menurutnya dalam pembicaraan dengan Makarim Wibisono, *UN Special Rapporteur* pada masalah HAM terhadap penguasaan wilayah Palestina sejak tahun 1967 terungkap fakta bahwa dalam sidang Majelis Keamanan PBB, Israel menyebut dirinya bukan menjajah tetapi menguasai kembali tanah orang Yahudi.

"Pada saat itu Majelis Keamanan tidak melakukan apapun. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi," tandasnya berapi-api. Ia melanjutkan pesan sangat kuat perlu diki-



Hamdhani memimpin sidang

rimkan untuk menunjukkan Palestina berhak pada tanah mereka, pada kemerdekaan mereka. "Solidaritas anggota parlemen lewat kunjungan langsung ke Palestina, Gaza, Tepi Barat dapat menjadi pesan bahwa kita anggota parlemen, perwakilan rakyat, ini memberikan sinyal kuat bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina," tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.

Delegasi DPR juga didukung empat anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) lainnya yaitu Alimin Abdullah (F-PAN), Hamdhani (F-Partai Nasdem), Kartina Yudhisti (F-PPP) dan Syofwatillah Mohzaib (F-Partai Demokrat).

Hamdhani Pimpin Sidang Komite Ekonomi

DPR RI terpilih secara aklamasi untuk memimpin Komite Ekonomi dalam Plenary Session Ketujuh *Asian Parliamentary Assembly* di Lاهori, Pakistan, 1-3 Desember. Ketua Delegasi Indonesia Fadli Zon memutuskan kehormatan untuk memimpin jalannya sidang diberikan kepada anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Hamdhani. "Tentu ini kehormatan dan tantangan bagi saya bagaimana memimpin jalannya Sidang Parlemen Internasional. Banyak terjadi perdebatan seperti Delegasi Kamboja, China, Pakistan yang menekankan, mereka ingin ada keseimbangan pembangunan perekonomian di kawasan Asia. Pengelolaan ekonomi

harus ada keseimbangan, jangan ada satu negara GDP-nya tinggi lainnya rendah," kata politisi Nasdem ini usai rapat.

Ia menyebut sejumlah isu mengemuka dalam persidangan diantaranya tentang *climate change*, Protokol Kyoto yang seharusnya didukung negara maju, ketidakseimbangan pengelolaan kawasan hutan dan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Isu kemiskinan lanjut Hamdhani juga mendapat perhatian. Pengentasan kemiskinan

sangat kompleks dan memiliki tantangan lokal, nasional, regional dan global multi dimensi serta tidak dapat dipisahkan dari strategi nasional negara untuk pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu anggota delegasi Iran Hossein Nejabar meminta perhatian peserta sidang agar rencana pembangunan pipa gas dan BBM yang melintas dari negaranya menuju Pakistan dan India dapat segera direalisasikan. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung penyebaran energi dan mendukung pembangunan di sejumlah negara. Zhao Baige, Ketua Delegasi Tiongkok mengingatkan kawasan Asia

Anggota Delegasi DPR RI Syofwatillah Mohzaib dalam sidang Komite Sosial dan Budaya juga meminta isu buruh migran menjadi perhatian. Ia mengingatkan DPR pernah menjadi tuan rumah sidang APA pada tahun 2011 yang khusus membahas masalah buruh migran. Sidang di Pakistan kali ini seharusnya dapat menetapkan langkah yang lebih maju.

"Indonesia meminta dukungan anda untuk mengadopsi rancangan resolusi karena menunjukkan komitmen APA dalam menghormati hak-hak migran, pada saat yang sama melambangkan prinsip bertetangga, persahabatan yang baik dengan cara saling menghormati," katanya.

Anggota delegasi DPR Kartika Yudhisti menyuarakan pentingnya partisipasi politik perempuan dalam Sidang Perempuan Parlemen APA. Ia menyebut berdasarkan data UN Women, persentase rata-rata anggota parlemen perempuan di Asia baru mencapai 18,4 persen. Menurutnya patut diperjuangkan ketentuan konstitusi yang menjamin partisipasi perempuan dalam politik.

Dalam sidang Komite Politik anggota BKSAP Alimin Abdullah menggarisbawahi pentingnya menguatkan hubungan antar anggota APA berdasarkan prinsip saling menghormati dan percaya. Terkait isu terorisme ia menekankan perlunya langkah komprehensif. "Peningkat-



Syofwatillah Mohzaib bicara dalam Sidang Komite Sosbud

sering menghadapi bencana alam yang terlambat diantisipasi. "65 persen bencana alam terjadi di Asia, persiapan menghadapi bencana dan strategi pasca bencana berdasarkan community-based perlu dilakukan," tekan dia.

an UU nasional dan membangun kapasitas SDM merupakan langkah penting melawan terorisme," tutur dia.

DPR Tuan Rumah Komite Ekonomi APA



Kartika Yudhistira bicara dalam Sidang Perempuan Parlemen APA

Sidang Pleno Ketujuh *Asian Parliamentary Assembly* (APA) menetapkan DPR sebagai tuan rumah sidang *Standing Committee on Economic Matters*. Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penguatan diplomasi parlemen DPR menyatakan kesiapan melaksanakan agenda Majelis Parlemen Asia tersebut. "Iya ini sebagai satu bentuk kepercayaan kepada DPR dari Sidang Pleno

APA yang baru saja berakhir, tentu akan kita laksanakan karena UU juga mengamanatkan DPR perlu mengambil peran," kata Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon usai acara penutupan Sidang Pleno Ketujuh APA. Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini menambahkan sidang *standing committee* ini diperkirakan akan dilaksanakan pertengahan tahun depan. Kegiatan ini merupakan per-

temuan pendahuluan menjelang Sidang Pleno Kedelapan APA yang dijadwalkan akan berlangsung akhir tahun 2015 nanti di Phnom Penh, Kamboja.

Sementara itu Ketua Komite Ekonomi pada Sidang Pleno Ketujuh APA Hamdhani menyatakan pertemuan selama 3 hari di Lahore telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Dalam Deklarasi Lahore ditegaskan keinginan untuk Pasar Energi Asia yang terintegrasi. "Kekuatan energi paling dominan itu ada di Asia Barat, sekarang kenapa kekuatan itu tidak kita arahkan ke timur atau selatan Asia sehingga dapat memperbaiki ketahanan energi mereka. Ada semangat Asia disitu karena selama ini sumber daya energi Asia banyak mengalir ke wilayah lain," tandas politisi FP Nasdem ini. Hal lain yang mengemuka dalam resolusi sidang yang dihadiri 23 negara itu adalah pentingnya urgensi mewujudkan Asia yang lebih hijau. Itu bisa dicapai dengan memperbaiki kualitas udara, menjamin pengurangan emisi berbahaya, melakukan langkah penghijauan dan meminimalkan dampak perubahan iklim. (iky)

foto: ibnur khalid/parle/hr.

SYAL PERJUANGAN UNTUK FADLI ZON



Ketua Delegasi DPR RI dalam Sidang Pleno Ketujuh APA Fadli Zon baru saja selesai menyampaikan pidato dihadapan parlemen dari 23 negara dalam Sidang Pleno

Ketujuh Asian Parliamentary Assembly (APA) di Lahore, Pakistan. Tepuk tangan apresiasi yang disampaikan hadirin atas pidatonya masih belum reda.

Sesaat sebelum Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini akan kembali duduk di kursinya tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Ketua Delegasi Palestina Zuhair Sanduqa. Pria berkumis tebal ini menghampiri dan segera mengalungkan syal berwarna hijau berhiaskan simbol perjuangan bangsa Palestina kepada Fadli Zon.

"Thank you Indonesia," itu sepenggal ucapan yang bisa didengar pada saat anggota Parlemen Palestina ini mengalungkan syalnya. Terlihat ada sedikit kekagetan di wajah Fadli pada saat menerima kejutan tak terduga itu.

Bisa dipastikan kalungan syal ini sebagai penghargaan atas pidato Ketua Delegasi Indonesia yang tegas dan lantang menyerukan dukungan bagi perjuangan Palestina, merdeka dari penjajahan Israel.

Drama singkat ini ditutup dengan salaman hangat dua tokoh. Tepuk tangan yang semula reda kembali membahana menyaksikan adegan di bagian kursi delegasi Indonesia itu. (iky) foto: ibnur khalid/parle/hr.



Muchsin Alatas & Titiek Sandhora

Pasangan Abadi yang Tak Ingin Berpolitik

Sedikit sekali pasangan artis yang mampu mempertahankan mahligai pernikahannya hingga puluhan tahun lamanya. Muchsin Alatas dan Titiek Sandhora, satu dari sedikit pasangan artis yang mampu mematahkan anggapan orang akan kehidupan artis yang identik dengan kawin-cerai. Ditemui Rahayu Setiowati dari Parlemenaria, pasangan yang telah memiliki tujuh orang cucu ini membagikan kisah dan rahasia cinta keduanya.

Pasangan Fenomenal

Di era 60-an hampir dipastikan tidak ada yang tidak mengenal nama Titiek Sandhora. Hampir semua radio memutar lagu *Si Boncel* karya Jessy Wenas yang menjadi salah satu hits di album perdana Titiek. Tentu tidak hanya suara merdunya yang langsung melejitkan namanya sebagai penyanyi pop ternama, melainkan juga wajahnya yang cantik, plus kulit putih mulus dengan rambut panjangnya mulai dijadikan idola anak muda di masanya.

Sukses dengan album perdananya tersebut diiringi dengan peluncuran album-album selanjutnya, seperti *Merantau*, *Si Jago Mogok*, *Fujiyama*, *Tante Cerewet*, *Sayonara*, *Potong Padi*, *Putus Cinta* dan lain-lain. Tak berbeda dari album perdananya, album-album yang diluncurkan Titiek itu pun menuai kesuksesan.

Di saat yang bersamaan nama Muchsin Alatas pun menjadi pembicaraan orang. Penyanyi asal Makassar yang mengawali karirnya di ibukota dengan bergabung dalam grup band Arulan ini sukses membawakan Lagu *Merana*. Bahkan Muchsin sempat berduet dengan Elya Kadham menyanyikan lagu India *Sawan Ka Mahina* yang kemudian mengguncangkan dunia musik tanah air.

Apa jadinya jika dua artis yang tengah naik daun itu diduetkan dalam satu panggung? Ya itulah kira-kira pertanyaan "iseng" yang ada dalam benak Jasir Sjam, Jessy Wenas dan A Riyanto. Ketiga pencipta lagu yang sangat populer di zamannya. Khusus Jasir Sjam, ialah orang yang cukup berjasa menemukan bakat menyanyi Titiek sekaligus mengan-

tarkannya menuju dapur rekaman.

S i a p a sangka jika "keisengan" Jasir Sjam cs itu membuahakan hasil yang sangat luar biasa. Berkat tangan emasnya, Muchsin dan Titiek berhasil menjadi pasangan duet yang sangat fenomenal di zamannya. Tidak tanggung-tanggung lewat lagu *Adam dan Hawa*, dan *Dunia Belum Kiamat* pasangan ini pun semakin bersinar hingga ke mancanegara. Berturut-turut keduanya kembali berduet lewat tembang *Hatiku Hatimu*, *Percaya Harapan & Cinta*, *Hati Pengembara*, *Saling Percaya*, *Tanggung Bulan*, *Burung Murai*, *Bon*, *Pegang-Pegang Tali*.

Uniknya, kemesraan dan kekompakan pasangan ini tidak sebatas di atas panggung. Dalam kehidupan sehari-hari keduanya pun mulai terlihat mesra. *Witting tresno jalaran soko kulino*, cinta tumbuh akibat selalu bersama. Hingga kemudian keduanya pun sepakat tidak hanya berduet di atas panggung melainkan, pasangan duet dalam mengarungi kehidupan selanjutnya. Di tahun 1972 keduanya pun menikah dan dikaruniai tiga orang putra-putri yakni, Bobby, Beby dan Bella.

"Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah memiliki tujuh orang cucu dari tiga anak kami, Bobby, Beby dan Bella," ungkap Titiek.

Saat ditanya resep langgengnya kehidupan rumah tangganya, Titiek mengaku tidak ada yang aneh dan berlebihan. Saling percaya, saling mengerti dan saling terbuka. Tiga prinsip itulah yang menjadi kunci keharmonisan rumah tangganya. Bahkan hingga saat ini keduanya tidak pernah merasa bosan kendati harus selalu bersama di setiap kesempatan. Hal tersebut pun diamini



Muchsin seraya berharap hanya mautlah yang bisa memisahkan keduanya.

Menampik Tawaran Berpolitik

Dikatakan pria yang identik dengan kumis tebalnya ini, ia selalu terbuka kepada sang istri, termasuk ketika beberapa saat silam ada tawaran lain di luar dunia seni. Ya, ketika para pekerja seni berlomba-lomba hijrah ke panggung politik tanah air, tawaran yang sama pun sempat mendatangi Muchsin. Ia diminta untuk menjadi kader dan caleg salah satu partai politik. Tidak hanya itu, tawaran dalam birokrat pun pernah menghampirinya. Namun semua itu terpaksa ditampiknya.

"Saya sempat diskusi dengan istri akan tawaran-tawaran tersebut. Namun istri tidak mengijinkannya. Ia mengaku tidak ingin jauh dari saya," kata Muchsin seraya melirik mesra sang Istri.

Wanita pemilik nama lengkap

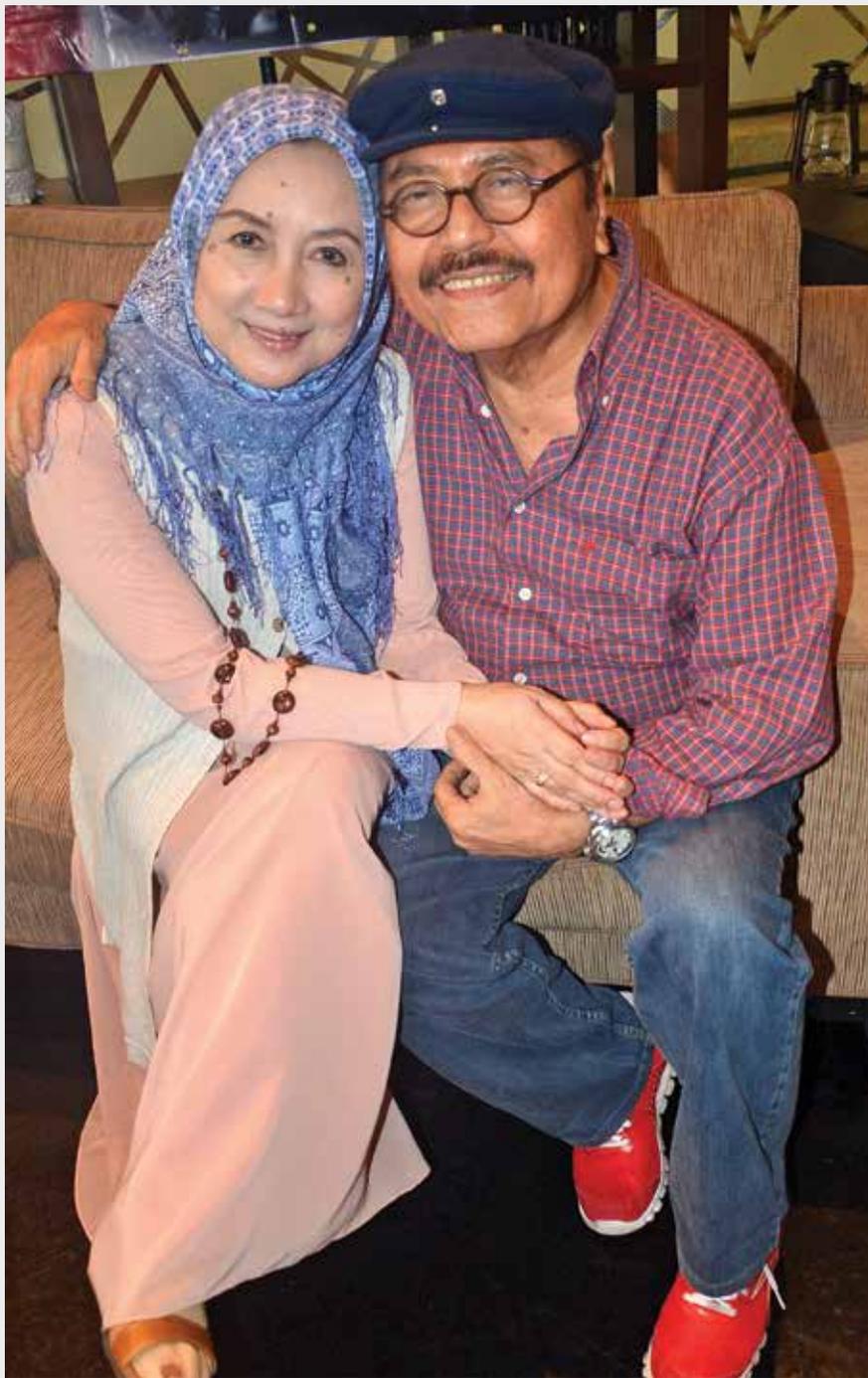
Oemijati Sandhora ini langsung menjelaskan, bahwa segala jabatan yang menghampiri sang suami itu diyakininya bukan pekerjaan yang mudah. Melainkan tugas mulia yang menyangkut nasib jutaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Sementara ia menyadari usia sang suami sudah tidak muda lagi, dimana kemampuan sang suami pun sudah tidak seprima sebelumnya. Agar tidak setengah-setengah menjalankan tugas yang diemban sang suami, Titiek menyarankan sang suami untuk menampik tawaran tersebut.

“Saya tidak ingin dia stress. Saya ingin dia (suami) sehat jasmani dan rohani. Jadi janganlah dikasih beban yang berat-berat. Kalau waktu usia 30 tahun-an sih tidak masalah. Tapi

“ Ya, ketika para pekerja seni berlomba-lomba hijrah ke panggung politik tanah air, tawaran yang sama pun sempat mendatangi Muchsin. Ia diminta untuk menjadi kader dan caleg salah satu partai politik. Tidak hanya itu, tawaran dalam birokrat pun pernah menghampirinya. Namun semua itu terpaksa ditampiknya. ”

ini kan usia sudah tidak muda lagi. Lebih baik menikmati hidup, habiskan waktu sama saya, anak-anak dan cucu-cucu,” papar wanita kelahiran 20 Januari 1954 ini.

Mendengar alasan sang istri itulah yang akhirnya meluluhkan hasrat Muchsin untuk tidak mengamini tawaran yang datang dari dunia politik. Namun dibalik itu semua, Muchsin dan Titiek pun berharap agar para pemimpin, baik yang be-



rada di pemerintahan maupun legislatif agar benar-benar menjalankan tugas dan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.

“Seperti masyarakat Indonesia umumnya kami berdua pun berharap agar para pemimpin dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Karena harus diakui bahwa Indonesia sangat kaya dan sangat cantik. Oleh karena itu

kami berharap kekayaan alam Indonesia itu harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia secara adil dan merata, itulah tugas yang tidak mudah juga Legislatif, sebagai pengawas pemerintah. Dan DPR sendiri pun harus bisa menjadi panutan atau contoh yang baik untuk semuanya,” papar Muchsin yang diamini sang Istri. (Ayu) foto: ayu/parole/hr



BURT PRIORITASKAN SARANA PRASARANA DPR RI

Saat ini, BURT DPR Periode 2014-2019 tengah gencar-gencarnya melakukan perbaikan baik sarana maupun prasarana di lingkungan Setjen DPR RI. Belum lama ini bahkan, Ketua BURT Roem Kono melakukan peninjauan ke berbagai lokasi di lingkungan Setjen DPR RI diantaranya, ruangan Press Room DPR RI tempat berbagai wartawan melakukan kegiatan jurnalistik serta Bagian Pemberitaan DPR RI, khususnya ruang Redaksi Parlemen, dan TV Parlemen.

"DPR sebagai lembaga tinggi negara sudah pasti paling banyak menerima tamu baik itu tamu kenegaraan dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, sarana dan prasarananya juga harus segera diperbaiki. Karena gedung merupakan simbol dari lembaga itu sendiri," ujar Ketua BURT Roem Kono.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam sisi sarana dan prasarana. Diantaranya adalah penataan lobi Gedung Nusantara III yang kerap menjadi tempat penerimaan tamu negara, press room atau media center di Gedung Parlemen. "Itu semua harus ditata ulang, mengingat tidak sedikit wartawan yang lebih memilih berada di luar ruang press dibanding berada di dalam media center. Hal tersebut dikarenakan kurang mema-

dainya fasilitas di dalam ruangan," tandasnya.

Soal SDM, lanjutnya, kesetjengan harus meningkatkan SDM mereka terutama bagi kesekretariatan komisi bukan hanya tertib administrasi saja tetapi bisa mengkaji kebijakan DPR, dalam rangka mengkoordinir tiap komisi, jadi tidak selalu legislasi tetapi hal yang strategis.

"Sekarang masih teknis administrasi belum mengarah strategis administrasi yang menunjang kegiatan dewan. Badan Fungsional Keahlian (BFK) sangat tepat sekali dalam rangka mendukung kinerja DPR karena fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan sangat penting untuk ditingkatkan, karena itu BFK penting mengkoordinir tenaga ahli yang sudah ada sekarang ini. Kita berharap tenaga ahli tidak berpikir sendiri tetapi ada wadah sumber kajian yang dimilikinya," paparnya.

Saat ini, paparnya, BURT telah melakukan rapat dan melakukan evaluasi skala prioritas terutama di dalam APBN 2015, khususnya penguatan dan kinerja DPR RI. "Diantaranya yaitu memprioritaskan bagi anggota Dewan dan kesetjengan, masalah tata kelola manajemen pengelolaan sarana dan prasarana. Kita juga akan membahas ke tiga masalah peningkatan kinerja dari aspek daya dukungan tenaga ahli

yang harus ditingkatkan," jelasnya.

Terkait pelayanan publik, kata Roem Kono, Setjen DPR RI jangan terjebak hanya persoalan teknis kehumasan semata, tetapi juga menyiapkan teknologi yang semakin berkembang. Ke depan harus semakin berinovasi dalam meningkatkan daya dukung bagi DPR dan masyarakat.

"Kita ingin bagaimana dapat melayani semua aspek bisa berjalan untuk mendukung rakyat. Penyediaan SDM itu harus disiapkan, dan betul-betul orang Humas kalau hanya penerima tamu saja dan dibiarkan saja dan tidak disampaikan aspirasinya susah, siapkan sarana dan siapkan aspirasi melalui jaringan internet dan diakses komisi yang menangani hal itu," jelasnya.

Ke depan, harapnya, kita dapat menyusun serta melakukan penataan secara baik dan mampu memobilisir kesetjengan baik tenaga dan pikiran sehingga dapat mengembalikan kewibawaan DPR dalam rangka meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan reputasi Dewan.

"Pelatihan IT, peningkatan sarana pers, penting dan harus diantisipasi kedepannya, karena itu saya akan mengusulkan supaya ada perbaikan dalam rangka meningkatkan fasilitas media massa dan perangkat teknologi didalamnya," ujarnya.



Ketua BURT Roem Kono saat meninjau Wisma DPR RI di Kopo Puncak Bogor

Buka Akses Informasi

Sementara Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winariko mengatakan, Setjen DPR RI akan selalu memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat diantaranya membuka akses seluas-luasnya agar mereka bisa datang ke DPR, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan terhadap Dewan. "Bahkan yang demo kita fasilitasi agar bisa ketemu walaupun ada aturannya, misalnya dibatasi 25 orang kedalam itu karena keterbatasan ruangan saja.

Kita juga memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) itu ada Websitenya juga ada online, jadi, informasi apapun yang diminta akan diberikan sepanjang masuk kategori Publik. Namun ada juga informasi yang dikecualikan, dasarnya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Banyak dari media massa, LSM, minta informasi dari PPID dan kita berupaya semaksimal mungkin memberikannya sepanjang informasi dalam kuasa kita," ujarnya.

Dia mengatakan, Setjen DPR RI memiliki Humas yang bertugas menyalurkan delegasi masyarakat, sementara di Biro Pengawasan Legislatif ada Pengaduan Masyarakat dengan membuka akses melalui sms, surat maupun datang langsung menyampaikan keluhan yang dihadapinya masyarakat untuk disampaikan

kepada dewan. "Ada websitenya biasanya akan kita kaji respon masyarakat. Terkait dengan Humas di Bagian Penerangan, staf di bagian ini banyak menerima murid SD, SMA yang datang untuk mengeta-



Ketua BURT Roem Kono saat meninjau Press Room DPR RI

hui tentang DPR, bisa mendaftar sebelumnya dan kita layani dengan mengajak wisata parlemen," jelasnya.

Kendalanya, lanjut Djaka, pengaduan masyarakat itu tidak dalam posisi menyelesaikan tetapi menganalisa, mengkaji dan memberikan kepada komisi terkait, jadi tingkat responsifnya bisa saja ditanyakan dalam Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja atau dibawa dalam Kunjungan Kerja

Selain itu, tambahnya, terkait kelembagaan, data atau informasi PPID tidak dipegang langsung tetapi ada di Bagian Arsip dan Dokumen. "Jadi kita perlu waktu lagi memperoleh informasi data tersebut, yang kita inginkan bagaimana itu bisa efektif seperti di Kementerian Perhubungan dimana Humas dan Arsip Dokumentasi menjadi satu semua dokumennya," jelasnya.

Sementara itu, masih adanya budaya kerja dimana masih ada unit kerja yang tidak menyampaikan seluruh informasi kepada publik dan termasuk yang memproduksi informasi tersebut, padahal, unit kerja tidak perlu takut karena PPID yang akan menseleksinya.

"Selain itu, pemeliharaan dokumen yang kurang, padahal kalau pengarsipan bagus cukup beberapa hari selesai. Ini masih belum rapi terdokumentasi," jelasnya.

Karena itu, terangnya, perlu didorong penggunaan IT yang semakin

intensif jadi lebih mudah terdokumentasi. "Kelembagaan dan ketata laksanaan akan ditata, dan dibuat SOP, serta membentuk maklumat pelayanan, waktu, biaya kalau memang ada. Kalau dari sisi aturan perlu kita buat aturan, dan Menpan tiap tahun ada *checklist* apa saja yang sudah dilakukan bahkan ada pemperingkatannya," terangnya. (si/nt/sc) foto: iwan armanias/parle/hr



INDAHNYA PERDAMAIAAN

Sejak DPR periode 2014 – 2019 dilantik pada 1 Oktober 2014, bukan rahasia lagi ada dua kubu yang berseteru yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)

Kubu KMP terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kubu KIH terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Perseteruan ini akhirnya berakhir, dimana ke dua koalisi telah menandatangani kesepakatan islah pada Senin, 17 November 2014 di gedung Parlemen. Penandatanganan ini mengakhiri perseteruan ke dua kubu di DPR.

Perdamaian diantara dua kubu ini juga ditegaskan Ketua DPR RI Setya Novanto saat membacakan Pidato

Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 – 2015 pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (5/12). Di akhir pembacaan pidatonya, Setya membacakan sebuah pantun yang diakui merupakan titipan dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

“Geger pemilu mendapat mandat, partai biasa berbeda suara. DPR bersatu membela rakyat, kerja sama untuk Indonesia,” ucap Setya dalam menutup pidatonya.

Usai membacakan pantun, Setya langsung disambut tepuk tangan oleh para anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna tersebut. Dalam pidatonya, Setya menceritakan keberhasilan DPR dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Setya menyebut konflik tersebut sebagai bagian dari proses menuju kematangan berdemokrasi.

“Tetapi DPR patut berbangga karena pada akhirnya telah dicapai kesepakatan islah dua kubu koalisi di DPR,” kata Setya.

Selain soal islah antara KMP dan

KIH, Setya juga menuturkan tentang kegiatan di bidang legislasi. Dalam 2 bulan masa kerja yang sudah dilalui, DPR telah mengesahkan satu buah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional DPR periode 2014-2019.

Dengan telah disepakatinya RUU perubahan atas Undang-undang MD3, lanjut Setya, DPR sangat berharap dalam masa sidang berikutnya akan menjadi awal baru bagi DPR dan Pemerintah untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih baik.

“Mulai sekarang sudah tidak ada istilah Kubu KMP dan Kubu KIH, yang ada Anggota DPR RI periode 2014-2019 yang akan bekerja bersama-sama menjalankan amanah rakyat,” kata Novanto.

Ucapan yang sangat menyejukkan didengar seluruh masyarakat Indonesia. Dan ternyata Damai itu Indah (tt) foto: naefu-rodjie/parle/hr.

Bung PARLE

